

Buku Profil Gender dan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan, 2024
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara



SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK
SIGA



Kata Sambutan

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahNya, atas tersusunnya Buku Profil Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.

Buku Profil ini disusun untuk membantu Informasi tentang kondisi Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Kalimantan Utara serta sekilas Profil Dinas DPPPAPKB Provinsi Kalimantan Utara.

Kami berharap semoga Buku Profil ini memberikan informasi yang bermanfaat

**Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Kalimantan Utara**



Burhanuddin, S.Sos., M.Si



TIM PENYUSUN



Penanggung Jawab dan Ketua

Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Anggota

- Imransyah, SE
 - Hendra Kurniawan, S.Psi
 - Agus Muhammad Maulana, S.STP
 - Naufalul Ikba, S.Tr.Stat
 - Muhammad Nurul Alam Hasyim, SST
 - Anggia Firmanti Hermadita, S.Tr.Stat
 - Yunidha Ekasara, S.Si
 - Romih, S.Sos
 - Dhonny Ika Saputra
 - Petma Yosia Lolo, SE
-

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	I
KATA SAMBUTAN	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	VI
DAFTAR GAMBAR	IX
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN	3
2.1 VISI.....	5
2.2 KONDISI GEOGRAFIS	6
2.3 KONDISI IKLIM	8
2.4 DEMOGRAFI.....	8
2.5 PENDUDUK	9
2.6 PERSEBARAN DAN KEPADATAN PENDUDUK.....	10
2.7 SOSIAL EKONOMI.....	11
2.7.1 KEMISKINAN	11
5.1.1 RATA – RATA PENGELUARAN PER KAPITA	12
5.1.2 PENDUDUK BERDASARKAN STATUS PEKERJAAN UTAMA.....	13
5.1.3 PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	14
3.1 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	16
3.2 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)	20
3.3 INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)	23
3.4 INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG).....	26
4.1 PROFIL PEREMPUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG SOSIAL	30
4.1.1 KONDISI KEMISKINAN EKSTREM DI PROVINSI KALTARA	31
4.1.2 ANALISIS DATA DEPRIVASI PEREMPUAN DI KALIMANTAN UTARA BERDASARKAN REGSOSEK	32



4.1.2.1 PENDIDIKAN.....	32
4.1.2.2 KESEHATAN.....	32
4.1.2.3 DISABILITAS	33
4.1.2.4 INFRASTRUKTUR DASAR	33
4.1.2.5 KETENAGAKERJAAN	33
4.2 PROFIL PEREMPUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG KESEHATAN	34
4.2.1 UMUR HARAPAN HIDUP (UHH) PEREMPUAN.....	34
4.2.2 PENDUDUK YANG MENGALAMI KELUHAN KESEHATAN DALAM SEBULAN TERAKHIR.....	35
4.2.3 ANGKA KESAKITAN	36
4.2.4 AKSES KESEHATAN MASYARAKAT.....	37
4.2.5 KELUARGA BERENCANA.....	40
4.3 PROFIL PEREMPUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG PENDIDIKAN	42
4.3.1 ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) MENURUT JENJANG PENDIDIKAN SD, SLTP DAN SLTA.....	42
4.3.2 ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) PENDUDUK BERUMUR 5-18 TAHUN	43
4.3.3 ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) MENURUT JENJANG PENDIDIKAN SD, SMP DAN SMA	43
4.3.4 ANGKA MELEK AKSARA PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KE ATAS.....	45
4.3.5 PENDUDUK PEREMPUAN MENURUT JENIS PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN.....	45
4.3.6 RATA-RATA LAMA SEKOLAH	47
4.4 PROFIL PEREMPUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG EKONOMI DAN KETENAGA KERJAAN.....	48
4.4.1 KREDIT USAHA RAKYAT (KUR).....	48
4.4.2 PEREMPUAN PELAKU USAHA PERIKANAN	48
4.4.3 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT).....	50
4.4.4 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)	51
4.4.5 PEREMPUAN PEKERJA TENAGA MANAJER, PROFESIONAL, ADMINISTRASI DAN TEKNIISI.....	53
4.4.6 PEREMPUAN MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA.....	53
4.4.7 PEREMPUAN MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA.....	54



4.5	PROFIL PEREMPUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN.....	55
4.5.1	PARTISIPASI DI LEMBAGA LEGISLATIF	55
4.5.2	PARTISIPASI DI LEMBAGA EKSEKUTIF	56
4.5.3	PENGURUS DAN ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL DAN POLITIK	58
4.6	PROFIL PEREMPUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG HUKUM DAN HAM	59
5.1	PROFIL ANAK PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG SOSIAL.....	64
5.1.1	PENDUDUK USIA ANAK.....	64
5.1.2	STATUS PERKAWINAN ANAK	65
5.1.3	HAK SIPIL KEPEMILIKAN AKTE KELAHIRAN ANAK.....	66
5.1.4	ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS	67
5.2	PROFIL ANAK PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG KESEHATAN.....	68
5.2.1	ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) DAN ANGKA KEMATIAN BALITA (AKBA)	68
5.2.2	PERSENTASE ANAK USIA 0-59 BULAN DIIMUNISASI	69
5.2.3	RATA-RATA LAMA PEMBERIAN ASI EKSklusif PADA BAYI	70
5.3	PROFIL ANAK KALIMANTAN UTARA BIDANG PENDIDIKAN	71
5.3.1	PESERTA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) JALUR FORMAL DAN JALUR NON FORMAL / PENDIDIKAN PRASEKOLAH	71
5.3.2	PESERTA PENDIDIKAN SD, SMP, SMA DAN SMK	72
5.3.3	SISWA PUTUS SEKOLAH	73
5.4	PROFIL ANAK PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG HUKUM DAN HAM	74
5.4.1	ANAK KORBAN KEKERASAN MENURUT UMUR (0-17 TAHUN).....	74
5.4.2	ANAK KORBAN KEKERASAN MENURUT STATUS PENDIDIKAN	75
5.4.3	ANAK KORBAN KEKERASAN MENURUT TEMPAT KEJADIAN	75
5.4.4	ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM	76
5.4.5	ANAK PENGHUNI LEMABAGA PEMASYARAKATAN	77



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Wilayah Administrasi Pemerintahan Menurut Kecamatan, Desa/Kelurahan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	7
Tabel 2	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Kalimantan Utara Tahun 2023-2024	9
Tabel 3	Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan menurut Kabupaten/Kota Kalimantan Utara Tahun 2024	11
Tabel 4	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024	12
Tabel 5	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	15
Tabel 6	IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022-2024	17
Tabel 7	Umur Harapan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota 2022-2024	18
Tabel 8	Harapan Lama Sekolah Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2022-2024	18
Tabel 9	Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi dan Kabupaten/Kota 2022-2024	19
Tabel 10	Pengeluaran Perkapita Pertahun (Rp.000) Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2022-2024	19
Tabel 11	IPG Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022-2024	20
Tabel 12	Umur Harapan Hidup Laki-laki & Perempuan Kab/Kota Tahun 2022-2024	21
Tabel 13	Harapan Lama Sekolah Laki-laki dan Perempuan Kab/Kota Tahun 2022-2024	22
Tabel 14	Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan Kab/Kota Tahun 2022-2024	22
Tabel 15	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Perempuan (Rp.000) Kab/Kota Tahun 2022-2024	23
Tabel 16	IDG Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2022-2024	24
Tabel 17	Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kab/Kota Tahun 2022-2024	25
Tabel 18	Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kab/Kota Tahun 2022-2024	25
Tabel 19	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	25
Tabel 20	IKG Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2022-2024	27
Tabel 21	Proporsi Perempuan Pernah Kawin 15-49 tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam 2 Tahun Terakhir Tidak di Fasilitas Kesehatan Menurut Kab/Kota, 2022-2024	27
Tabel 22	Proporsi Perempuan Pernah Kawin 15-49 tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Yang Pertama Kali Berumur Kurang dari 20 tahun Menurut Kab/Kota, 2022-2024	28
Tabel 23	Keterlibatan Perempuan di Legislatif Kab/Kota tahun 2022-2024 (persen)	28
Tabel 24	Persentase Penduduk Perempuan dengan Pendidikan Minimal SMA Menurut Kab/Kota Tahun 2022-2024	29



Tabel 25 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kab/Kota 2022-2024.....	29
Tabel 26 Data Deprivasi Perempuan Berdasarkan REGSOSEK.....	32
Tabel 27 Umur Harapan Hidup Kab/Kota Tahun 2022-2024	35
Tabel 28 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Kab/Kota dan Tempat Berobat Jalan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	38
Tabel 29 Persentase Penduduk yang berobat Jalan menurut Tempat berobat Jalan berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Utara 2024.....	39
Tabel 30 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	39
Tabel 31 Persentase Penduduk yang Rawat Inap menurut Tempat Rawat Inap 2024 menurut Kab/Kota Provinsi Kalimantan Utara	39
Tabel 32 Persentase Perempuan pernah Kawin berumur 15-49 tahun menurut Alat/Cara KB yang digunakan di Provinsi Kalimantan Utara 2024	41
Tabel 33 Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara 2023-2024	42
Tabel 34 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	43
Tabel 35 Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Kalimantan Utara 2024.....	45
Tabel 36 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke atas Menurut Kab/Kota dan Status Bersekolah Tahun 2024.....	46
Tabel 37 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2022-2023	47
Tabel 38 Jumlah Perempuan Penerima Kredit Usaha Rakyat menurut Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara 2024	48
Tabel 39 Jumlah Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan menurut Jenis Kelamin dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	49
Tabel 40 TPT Penduduk berdasarkan Kab/Kota di Kalimantan Utara 2022-2024.....	51
Tabel 41 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penduduk Usia 15 Tahun menurut Kab/Kota Tahun 2022-2024	52
Tabel 42 Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional menurut Kab/Kota Tahun 2021-2024	53
Tabel 43 Penduduk Perempuan 15 tahun ke Atas yang bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kalimantan Utara 2024	54
Tabel 44 Penduduk Perempuan 15 Tahun ke Atas yang bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kalimantan Utara Tahun 2022-2024.....	54
Tabel 45 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kab/Kota Tahun 2022-2024...	56
Tabel 47 Jumlah Keterlibatan Perempuan di Lembaga Eksekutif Pemda 2024	57
Tabel 48 Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Umur di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024	60
Tabel 49 Jumlah Korban Kekerasan Perempuan berdasarkan Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	60
Tabel 50 Jumlah Korban Kekerasan Perempuan berdasarkan Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	61



Tabel 51 Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Bentuk Kekerasan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 62

Tabel 52 Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Tempat Kejadian di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 63

Tabel 53 Jumlah Perempuan Penghuni LAPAS di Kalimantan Utara 2023-2024..... 63

Tabel 54 Jumlah Perempuan Penghuni LAPAS berdasarkan Pekerjaan di Kalimantan Utara Tahun 2024 63

Tabel 55 Jumlah Penduduk Anak berstatus Kawin menurut Jenis Kelamin dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024..... 65

Tabel 56 Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kelahiran dan KIA menurut Kab/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2024..... 66

Tabel 57 Data Peserta Didik Anak Berkebutuhan Khusus menurut Kab/Kota 2024 67

Tabel 58 Persentase Imunisasi pada Anak Usia 0-59 Bulan menurut Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024..... 69

Tabel 59 Persentase penduduk berumur 0-23 bulan yang pernah diberi ASI menurut Kab/Kota Tahun 2024..... 70

Tabel 60 Rata-rata Lama Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 70

Tabel 61 Persentase Penduduk berumur 0-6 Tahun menurut Kab/Kota dan Keikutsertaan Pendidikan prasekolah Tahun 2024 71

Tabel 62 Persentase Penduduk berumur 0-6 Tahun yang Pernah/Masih mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Kab/Kota dan Jenis Pendidikan Pra Sekolah Tahun 2024 71

Tabel 63 Jumlah Peserta Pendidikan menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pendidikan Tahun 2024 72

Tabel 64 Jumlah Siswa Putus Sekolah menurut Kab/Kota dan Jenis Pendidikan 2024 73

Tabel 65 Jumlah Korban Kekerasan Anak berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Usia di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 74

Tabel 66 Jumlah Korban Kekerasan Anak berdasarkan Status Pendidikan dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 75

Tabel 67 Jumlah Korban Kekerasan Anak berdasarkan Tempat Kejadian dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 75

Tabel 68 Jumlah Anak berhadapan dengan Hukum berdasarkan Jenis Kelamin dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 76

Tabel 69 Jumlah Anak berhadapan dengan Hukum berdasarkan Jenis Pidana di Pengadilan Negeri di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024..... 76

Tabel 70 Jumlah Anak Penghuni LAPAS berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024 77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Persentase penduduk berdasarkan jenis kelamin Provinsi Kalimantan utara Tahun 2024	9
Gambar 2	Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.....	10
Gambar 3	Persebaran Penduduk Kabupaten/Kota Kalimantan Utara Tahun 2024	10
Gambar 4	Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan Makanan Dan Bukan Makanan Kalimantan Utara Tahun 2024	13
Gambar 5	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita (Rupiah) Menurut Kab/Kota 2024	13
Gambar 6	Persentase Penduduk Usia 15 Keatas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama 2024	14
Gambar 7	Persentase Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kalimantan Utara Tahun 2024	14
Gambar 8	Angka Kemiskinan Kab/Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 – 2024	30
Gambar 9	Angka Kemiskinan Ekstrem Provinsi Kalimantan Utara 2021-2024.....	31
Gambar 10	Trend Umur Harapan Hidup Perepmuan Kab/Kota 2022-2024.....	35
Gambar 11	Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap	36
Gambar 12	Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin Kalimantan Utara 2022-2024.....	37
Gambar 13	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan terakhir di Provinsi Kalimantan Utara 2022-2024.....	38
Gambar 14	Persentase Penduduk yang pernah rawat Inap dalam setahun Terakhir di Provinsi Kalimantan Utara 2024.....	40
Gambar 15	Persentase Perempuan yang Pernah Kawin berumur 15-49 tahun menurut Kab/Kota dan Partisipasi KB di Kalimantan Utara 2024	40
Gambar 16	Angka Partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Kalimantan Utara 2023-2024	42
Gambar 17	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal di Kalimantan Utara 2024.....	43
Gambar 18	Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk di Kalimantan Utara 2023-2024...	44
Gambar 19	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf di Kalimantan Utara 2024	45
Gambar 20	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, Dan Ijazah/STTB Tertinggi Yang Dimiliki Tahun 2024	47
Gambar 21	Persentase Pelaku Usaha Perikanan menurut Jenis Profesi dan Jenis Kelamin di Kalimantan Utara 2024	50
Gambar 22	TPT Penduduk Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 – 2024	51
Gambar 23	TPAK Penduduk Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	52
Gambar 24	Proporsi Penduduk Perempuan 15 Tahun ke Atas yang bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kalimantan Utara.....	53
Gambar 25	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.....	55



Gambar 26 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Tahun 2022-2024..... 56

Gambar 27 Persentase Perempuan di Lembaga Eksekutif menurut Pemda 2024 57

Gambar 28 Persentase Anggota Pengurus/Kader Parpol Perempuan Tahun 2024 58

Gambar 29 Persentase Anggota Legislatif terhadap Jumlah Pengurus/Kader Parpol Perempuan Tahun 2024 59

Gambar 30 Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Usia Menurut Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara 2024 60

Gambar 31 Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Pendidikan menurut Kab/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2024 61

Gambar 32 Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Utara 2024 61

Gambar 33 Jumlah Korban Kekerasan menurut Bentuk Kekerasan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 62

Gambar 34 Jumlah Korban Kekerasan Menurut tempat Kejadian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 62

Gambar 35 Jumlah Penduduk Anak 0-16 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 64

Gambar 36 Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang berstatus Kawin atau berstatus Hidup bersama sebelum Umur 18 Tahun di Kalimantan Utara 2020-2024 ... 65

Gambar 37 Jumlah Anak berumur 0-17 Tahun menurut Kab/Kota dan Kepemilikan Akte Kelahiran dan KIA di Kalimantan Utara 2024 66

Gambar 38 Data Peserta Didik Anak Berkebutuhan Khusus menurut Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara 2024 68

Gambar 39 Angka Kematian Bayi Provinsi Kalimantan Utara Hasil Long Form SP2020 ... 69

Gambar 40 Jumlah Peserta Pendidikan menurut Jenis Pendidikan 2024 72

Gambar 38 Data Peserta Didik Anak Berkebutuhan Khusus menurut Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara 2024 68

Gambar 39 Angka Kematian Bayi Provinsi Kalimantan Utara Hasil Long Form SP2020 ... 69

Gambar 40 Jumlah Peserta Pendidikan menurut Jenis Pendidikan 2024 72

Gambar 41 Persentase Siswa Putus Sekolah Jenis Pendidikan Tahun 2024..... 73

Gambar 42 Jumlah Anak Korban Kekerasan berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan 69

Gambar 43 Persentase Korban Kekerasan Anak berdasarkan Tempat Kejadian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 72

Gambar 44 Jumlah Anak sebagai Pelaku berdasarkan Tingkat Pendidikan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 76

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak adalah hal yang mutlak mesti dilakukan dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak merupakan strategi pembangunan yang dilakukan untuk memastikan 5 kelompok rentan dalam masyarakat yang terdiri dari perempuan, lansia, kaum disabilitas, perempuan hamil dan anak-anak dapat memiliki akses yang sama dalam pembangunan, partisipasi yang sama dalam pelaksanaan pembangunan, kontrol yang sama dalam pembangunan serta menerima dan merasakan manfaat pembangunan yang sama pula. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu isu yang menjadi pokok bahasan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (2005-2025) Provinsi Kalimantan Utara. Gender dan anak adalah isu lintas sektor yang melibatkan stakeholder berbagai bidang pembangunan.

Isu gender dan anak bukanlah merupakan hal yang baru saja mengemuka. Secara global sudah ada konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) yang di Indonesia sudah dirafikasi dengan UU No. 7 Tahun 1984 dan juga Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional; serta Penandatanganan Konvensi Hak-Hak Anak PBB pada tanggal 20 November 1989 yang sudah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 1990 dan juga dengan menetapkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mendeklarasikan menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orangtua anak atau pengasuhnya yang sah. CEDAW (*Committee on the Elimination of Discrimination Against Women*) dan Konfensi Hak Anak sebagai suatu komitmen global seharusnya menjadi payung pembentukan perundang-undangan disemua negara dalam meniadakan diskriminasi terhadap perempuan dan pemenuhan hak anak.

Pentingnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) diakui sebagai persoalan penting oleh Indonesia dan tercermin pada dokumen – dokumen Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1978, 1993, 1988, 1993 dan 1999. GBHN dan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 1999-2004 menyebutkan secara khusus kesetaraan gender sebagai



salah satu tujuan khusus pembangunan dan GBHN menambahkan pentingnya perbaikan status perempuan untuk mencapai kesetaraan gender. Tonggak lain dalam upaya meniadakan diskriminasi terhadap perempuan adalah kesepakatan Beijing yang dikenal dengan Beijing Platform For Action (BPFA) pada tahun 1995. Ada dua belas wilayah kritis yang harus mendapat perhatian Negara jika ingin menghapus diskriminasi terhadap perempuan menegakkan Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG). Saat Millenium Development Goals (MDGs) disepakati lebih satu dekade lalu, persoalan kesetaraan gender telah menjadi fokus perhatian. Kesetaraan gender menjadi salah satu Tujuan yang harus dicapai dalam MDGs. Sekarang di era Sustainable Development Goals (SDGs), kesetaraan gender masih menjadi Tujuan (*Goals*) yang harus dicapai pada tahun 2030.

Dalam perspektif gender, penyediaan data, analisis dan pelaporan terpilah menurut jenis kelamin dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi tentang pengalaman khusus dalam kehidupan sebagai perempuan dan laki-laki. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin menjadi inti dalam menghasilkan Statistik Gender yaitu informasi yang mengandung isu gender termasuk didalamnya isu anak, sebagai hasil dari analisis gender. Data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak diberbagai bidang pembangunan agar responsif gender dan responsif terhadap pemenuhan hak anak. Isu gender dan anak selama ini kurang diperhitungkan dalam berbagai proses kebijakan pembangunan. Masalah utama yang selalu mengemuka adalah ketersediaan data terpilah kurang memadai. Sebagai akibatnya kebijakan, program, kegiatan pembangunan tidak responsif terhadap kebutuhan, kesulitan sebagai perempuan dan/atau sebagai laki-laki dan tidak memihak bagi kepentingan terbaik bagi anak, dan disebut buta gender. Hasilnya ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan dan kehidupan masih terus berlanjut. Untuk mengatasi permasalahan di atas diperlukan data terpilah menurut jenis kelamin dan umur sebagai pembuka wawasan adanya kesenjangan/ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan.

Data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA). Data gender dan anak dapat membantu para pengambil keputusan antara lain untuk:

- (i) mengidentifikasi perbedaan (kondisi/ perkembangan) keadaan perempuan dan laki-laki, termasuk anak, dalam dimensi tempat dan waktu
- (ii) mengevaluasi dampak dari intervensi pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki;



- (iii) mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemaslahatan perempuan dan laki-laki yang responsif terhadap masalah, kebutuhan, pengalaman perempuan dan laki-laki.

Data Gender dan Anak diharapkan dapat menjadi media bagi seluruh OPD dan Instansi Vertikal untuk bersinergi terkait data-data terpilah yang berkaitan dengan isu gender. Data ini selanjutnya menjadi bahan dasar bagi OPD dan Instansi Vertikal dalam merencanakan kegiatan atau program yg responsif gender.

Data terpilah adalah data berdasarkan jenis kelamin (*sex-disaggregated data*) berupa data kuantitatif atau data kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan.

Data terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, dan lain-lain.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Secara umum, publikasi ini disusun bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi perempuan dan anak dan capaian pembangunan manusia berdasarkan gender dan anak. Oleh karena itu, penyajian informasi dalam publikasi ini disajikan dalam bentuk data terpilah menurut jenis kelamin dan umur, sehingga dapat diperoleh gambaran keterbandingan kondisi perempuan terhadap laki-laki serta kondisi anak di Provinsi Kalimantan Utara. Termasuk didalamnya adalah indikator pembangunan manusia berbasis gender, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Selain itu, publikasi ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi anak-anak di Kalimantan Utara yang dilihat dari indikator Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) serta dari aspek demografi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kekerasan terhadap anak dan beberapa informasi lainnya terkait perilaku bepergian, tindak kejahatan dan teknologi informasi.

1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyajian publikasi ini dibagi dalam lima bab, yaitu:

- Bab I **Pendahuluan**; yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika penyajian;
- Bab II **Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Utara**; yang membahas tentang letak geografis dan demografi;
- Bab III **Indikator Kinerja Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara**; yang mencakup gambaran pencapaian pembangunan manusia, pencapaian pembangunan gender dan pencapaian pemberdayaan gender;



- Bab IV **Profil Perempuan**; yang mencakup gambaran pencapaian pembangunan manusia, pencapaian pembangunan gender dan pencapaian pemberdayaan gender;
- Bab V **Profil Anak**; yang membahas tentang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan;



GAMBARAN UMUM

2.1 VISI

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2025 adalah “TERWUJUDNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG BERUBAH, MAJU DAN SEJAHTERA”. Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah Maju dan sejahtera yang berarti mewujudkan masyarakat Kalimantan Utara yang memiliki semangat berubah dan maju dalam memenuhi kebutuhan hidup serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan di seluruh sektor pembangunan. Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi yang dijalankan yakni :

1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja;
3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawaskan;
4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasiskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;
7. Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara;

8. Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Milenial dalam pembangunan;
10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional.
12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota;
13. Mewujudkan pembangunan yang berbasis RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun.
14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kudat, Kabupaten Kerayan, Kabupaten Apo Kayan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian misi ke 9 yaitu **“Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Milenial dalam pembangunan”** yang diimplementasikan melalui kegiatan Pemberdayaan ekonomi perempuan dalam mendukung peningkatan indeks pemberdayaan perempuan; Penguatan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam upaya penurunan keluarga pra sejahtera.

2.2 KONDISI GEOGRAFIS

Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan provinsi ke 34 di Indonesia dan merupakan provinsi termuda dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 4 (empat) Kabupaten dan 1(satu) kota, yaitu :

1. Kabupaten Malinau dengan ibukota Malinau Kota;
2. Kabupaten Bulungan dengan ibukota Tanjung Selor;
3. Kabupaten Tana Tidung dengan ibukota Tideng Pale;
4. Kabupaten Nunukan dengan ibu kota Nunukan;
5. Kota Tarakan dengan ibukota Tarakan.

Provinsi Kalimantan Utara merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 56 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi 1°21'36"-4°24'55" Lintang Utara dan 114°35'22"-118°03'00" bujur Timur. Provinsi Kalimantan Utara merupakan hasil pemekaran dari Provinsi induknya yaitu Provinsi Kalimantan Timur, menjadi salah satu pintu gerbang



pembangunan di wilayah Indonesia bagian tengah, berbatasan langsung dengan negara bagian tetangga Malaysia yaitu bagian Sabah dan Serawak.

Secara geostrategis Provinsi Kalimantan Utara berbatasan dengan :

- 1. Batas Utara : Negara Malaysia Bagian Sabah
- 2. Batas Selatan : Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kertanegara dan Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur
- 3. Batas Timur : Laut Sulawesi
- 4. Batas Barat : Negara Malaysia Bagian Serawak

Letaknya yang sangat strategis dan menguntungkan, karena daerahnya dilewati oleh alur pelayaran yang termasuk dalam kategori alur laut kawasan Indonesia II (ALKI II) yang sering dilewati oleh kapal-kapal yang berlayar dari perairan Indonesia ke alur pelayaran Internasional meliputi Kawasan Malaysia, Filipina, Brunei, Singapore, dan negara-negara Asean, serta negara-negara Asia Pasific seperti Hongkong, Korea Selatan dan Jepang. Provinsi Kalimantan Utara memiliki sumber daya alam yang melimpah berupa hasil bumi minyak dan gas alam, batubara, emas, batu gamping, sirtu, pasir kuarsa, mineral lainnya, kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan dan industri serta kekayaan budaya dan pariwisata. Secara geografis Provinsi Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan Negara bagian Malaysia, Laut Kalimantan di sebelah timur dan Kalimantan Timur di sebelah selatan.

Tabel 1. Wilayah Administrasi Pemerintahan Menurut Kecamatan, Desa/Kelurahan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Kab/kota	Luas (km ²)	Jml Kec	Jml Desa	Jml Kel
Malinau	38.902,00	15	109	0
Bulungan	13.880,00	10	81	7
Tana tidung	3.504,0	5	32	0
Nunukan	13.564,00	21	234	8
Tarakan	251,00	4	0	20
Kalimantan utara	70.101,00	55	449	35

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, tepatnya dengan Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia. Untuk daerah daratan terdapat + 1.038 km garis perbatasan antara Provinsi Kalimantan Utara dengan Negara Malaysia.



Luas wilayah administrasi ± 75.467,70 Km², terdiri dari :

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Kabupaten Malinau | : ± 38.902,00 Km ² |
| 2. Kabupaten Bulungan | : ± 13.880,00 Km ² |
| 3. Kabupaten Tana Tidung | : ± 3.504,00 Km ² |
| 4. Kabupaten Nunukan | : ± 13.564,00 Km ² |
| 5. Kota Tarakan | : ± 251,00 Km ² |

Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas wilayah 70.101,00 Km² dengan 55 kecamatan, 484 desa/kelurahan yang tersebar di 5 kabupaten/kota. Dari 484 tersebut, 242 desa/kelurahan berada di Kabupaten Nunukan. Desa yang dimaksud termasuk kelurahan dan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

2.3 KONDISI IKLIM

Kondisi iklim di Provinsi Kalimantan Utara pada umumnya sama dengan kondisi iklim pada provinsi lainnya di Indonesia, yakni beriklim tropis dengan mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Durasi penyinaran matahari di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 54,13 persen sementara jumlah curah hujan sebesar 2.982,60 mm³ dengan rata-rata jumlah hari hujan adalah 280 hari selama tahun 2024.

Suhu udara rata-rata di Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2024 sekitar 27,84°C dengan suhu udara maksimal mencapai 37,00°C dan temperatur minimal hingga 22,80°C. Kondisi tekanan udara di Provinsi Kalimantan Utara adalah 1.010,04 mb dengan rata-rata kecepatan angin 1,08 knots.

2.4 DEMOGRAFI

Penduduk dapat berperan sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan. Bila pembangunan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, maka penduduk dalam hal ini sebagai obyek pembangunan yang menikmati hasil pembangunan tersebut. Pada sisi lain, penduduk juga dapat dipotensikan sebagai penggerak pembangunan yang berarti peran penduduk sebagai subyek pembangunan yang tidak hanya menikmati hasilnya akan tetapi juga berperan aktif dalam proses pembangunan.

Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas tentu menjadi impian sebagai salah satu modal dasar dalam pembangunan. Kualitas penduduk dapat dilihat dari beberapa sisi; pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Selanjutnya keadaan dan kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan. Jumlah penduduk yang besar diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai maka akan menjadi penopang bagi pembangunan. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar namun diikuti dengan tingkat

kualitas penduduk yang rendah, maka penduduk tersebut akan menjadi beban bagi pembangunan dan akan menghambat jalannya proses pembangunan.

2.5 **PENDUDUK**

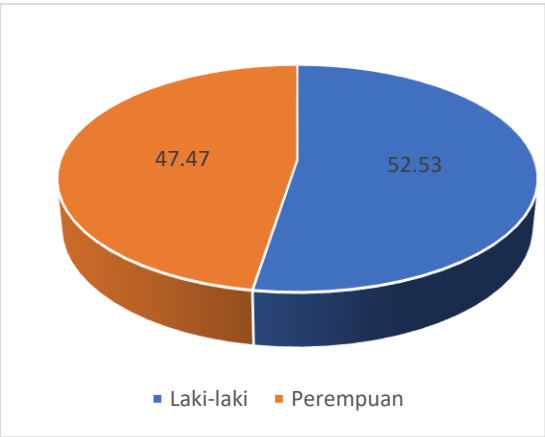
Jumlah penduduk di suatu daerah selalu mengalami perubahan karena adanya faktor kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Di Kalimantan Utara perkembangan penduduknya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2023 jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 743,1 ribu jiwa yang tersebar di lima kabupaten/kota. Jumlah penduduk yang paling banyak terdapat di Kota Tarakan, yaitu sekitar 246,9 ribu jiwa. Selanjutnya adalah Kabupaten Nunukan, Bulungan, Malinau masing-masing jumlah penduduknya 217,6 ribu jiwa, 165 ribu jiwa dan 84,8 ribu jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Kabupaten Tana Tidung yang merupakan kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten Bulungan, yaitu sebanyak 28,6 ribu jiwa.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Kalimantan Utara Tahun 2023-2024

Kab/kota	Jumlah penduduk (ribu)		Laju pertumbuhan penduduk (%)	
	2023	2024	2023	2024
Malinau	85,5	86,5	2,08	1,28
Bulungan	158,1	160,2	2,33	1,45
Tana tidung	27,5	28,2	4,11	2,57
Nunukan	207,9	210,9	2,49	1,55
Tarakan	251,1	253,9	1,94	1,20
Kalimantan utara	730,0	739,8	2,28	1,42

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

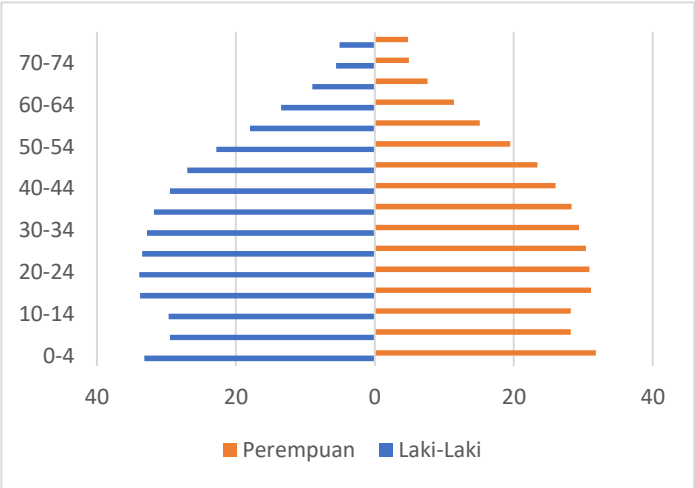
Gambar 1. Persentase penduduk berdasarkan jenis kelaminProvinsi kalimantan utara Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Pada tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara komposisi penduduk terbanyak pada penduduk Laki-Laki sebesar 52,53 persen (388,6 dalam ribuan jiwa) sedangkan penduduk perempuan sebesar 47,47 persen (351,2 dalam ribuan jiwa).

Gambar 2. Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024



Dilihat dari piramida penduduk pada tahun 2024 maka kelompok penduduk usia produktif menempati proporsi penduduk terbesar di Provinsi Kalimantan Utara. Tentu hal tersebut perlu disikapi secara bijak. Dimana jumlah penduduk usia produktif yang cukup besar tersebut jangan sampai menjadi beban pembangunan di masa mendatang. Perlunya dimulai

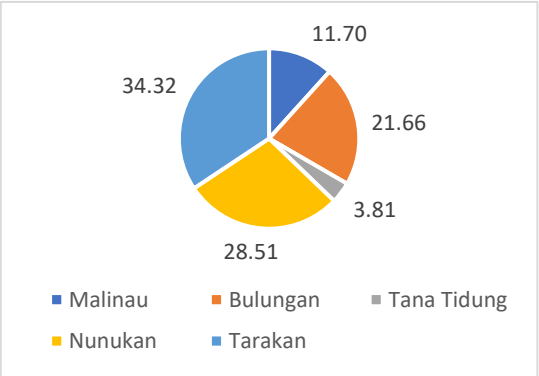
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

dari saat ini untuk peningkatan kualitas SDM di berbagai bidang. Begitu juga dengan cukup tingginya usia produktif di Kalimantan Utara perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM agar dapat menjadi SDM yang handal terutama dalam memasuki era digital dan teknologi saat ini.

2.6 PERSEBARAN DAN KEPADATAN PENDUDUK

Persebaran penduduk menggambarkan distribusi jumlah penduduk dimasing-masing suatu wilayah. Sedangkan kepadatan penduduk suatu wilayah adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah yang memperlihatkan rata-rata jumlah penduduk setiap kilometer persegi.

Gambar 3. Persebaran Penduduk Kabupaten/Kota Kalimantan Utara Tahun 2024



Persebaran penduduk yang tidak merata perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan daya dukung terhadap lingkungan. Persebaran penduduk di Kalimantan Utara secara geografis dapat dikatakan belum merata sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk antar daerah yang cukup besar. Pada tahun 2024 di Kalimantan Utara sebaran penduduk

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

yang terbanyak di Kota Tarakan, yaitu sekitar 34,32 persen dari seluruh total penduduk. Selanjutnya adalah di Kabupaten Nunukan 28,51 persen, Bulungan 21,66

persen dan Malinau 11,70 persen. Wilayah yang sebaran penduduknya paling kecil adalah Kabupaten Tana Tidung hanya 3,81 persen

Tabel 3. Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan menurut Kabupaten/Kota Kalimantan Utara Tahun 2024

Kab/Kota	Penduduk (Ribu Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk/ Km ²
Malinau	86,5	38.902,00	2
Bulungan	160,2	13.880,00	12
Tana Tidung	28,2	3.504,0	6
Nunukan	210,9	13.564,00	15
Tarakan	253,9	251,00	1011
Kalimantan Utara	739,8	70.101,00	10

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

2.7 SOSIAL EKONOMI

2.7.1 KEMISKINAN

- 1 BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Standar minimum yang digunakan untuk menentukan apakah penduduk dianggap telah mampu memenuhi kebutuhan dasar tersebut adalah garis kemiskinan.
- 2 Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.
- 3 Garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 – 2024 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2024, garis kemiskinan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp 854.294. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan pada Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi sejumlah 47,83 ribu penduduk (6,32 persen) dari sebelumnya 47,97 ribu penduduk (6,45 persen). Indeks Kedalaman



Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 adalah 0,640. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 adalah 0,190.

Tabel 4. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024

Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)		Persentase Penduduk Miskin	
	2023	2024	2023	2024
Malinau	5,95	6,45	6,54	6,94
Bulungan	12,19	11,95	8,99	8,76
Tana Tidung	1,47	1,50	4,62	4,47
Nunukan	11,88	12,61	5,33	5,73
Tarakan	16,49	15,32	6,10	5,56
Kalimantan Utara	47,97	47,83	6,45	6,32

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

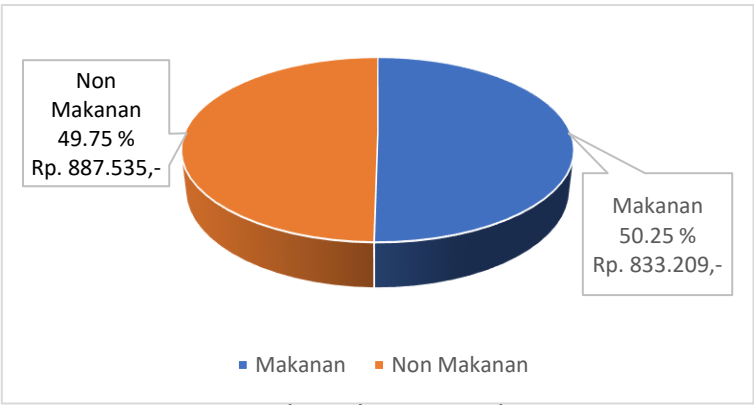
Dilihat Dari tabel di atas terjadi penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024. Apabila dilihat dari segi jumlah, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2024. Penurunan tersebut dapat dilihat terjadi pada sebagian Kabupaten Kota di wilayah Kalimantan Utara.

2.7.2 RATA – RATA PENGELUARAN PER KAPITA

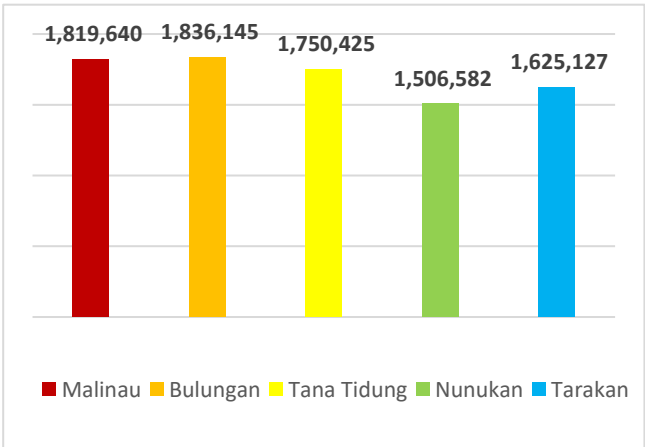
Rata-rata pengeluaran per kapita adalah salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Di Provinsi Kalimantan Utara, proporsi rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan lebih besar dibandingkan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok makanan.

Pada tahun 2024, rata-rata pengeluaran per kapita selama satu bulan untuk kelompok bukan makanan sebesar Rp. 887.535,- sedangkan untuk kelompok makanan sebesar Rp. 833.209,-. Sehingga, total rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp. 1.693.577,-. Nilai ini meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp. 1.570.185,98. Proporsi terbesar untuk kelompok pengeluaran bukan makanan adalah perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 30,06 persen. Proporsi terbesar untuk kelompok pengeluaran makanan adalah makanan dan minuman jadi sebesar 13,45 persen.

Gambar 4. Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan Makanan Dan Bukan Makanan Kalimantan Utara Tahun 2024



Gambar 5. Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita (Rupiah) Menurut Kab/Kota Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024



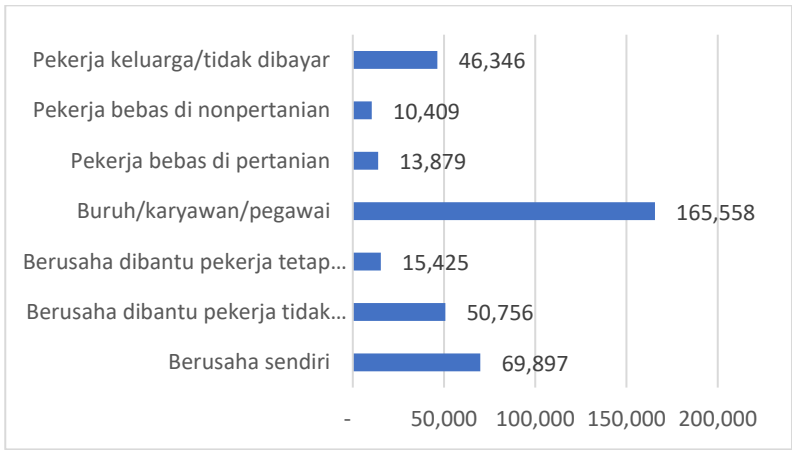
Jika dilihat menurut kabupaten / kota, maka rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk di Kab Bulungan merupakan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024, adapun yang terendah pada Kabupaten Nunukan.

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

2.7.3 PENDUDUK BERDASARKAN STATUS PEKERJAAN UTAMA

Status/kedudukan pekerjaan adalah jenis kedudukan kepala rumah tangga /anggota rumah tangga dalam pekerjaan utama. Pada Tahun 2023 status pekerjaan utama penduduk Prov. Kalimantan Utara terbanyak sebagai Buruh/ Karyawan/ Pegawai sebanyak 165.558 jiwa, lalu diikuti oleh Berusaha Sendiri sebanyak 69.897 jiwa dan Berusaha dibantu pekerja tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar sebanyak 50.756 jiwa.

Gambar 6 Persentase Penduduk Usia 15 Keatas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kalimantan Utara tahun 2024



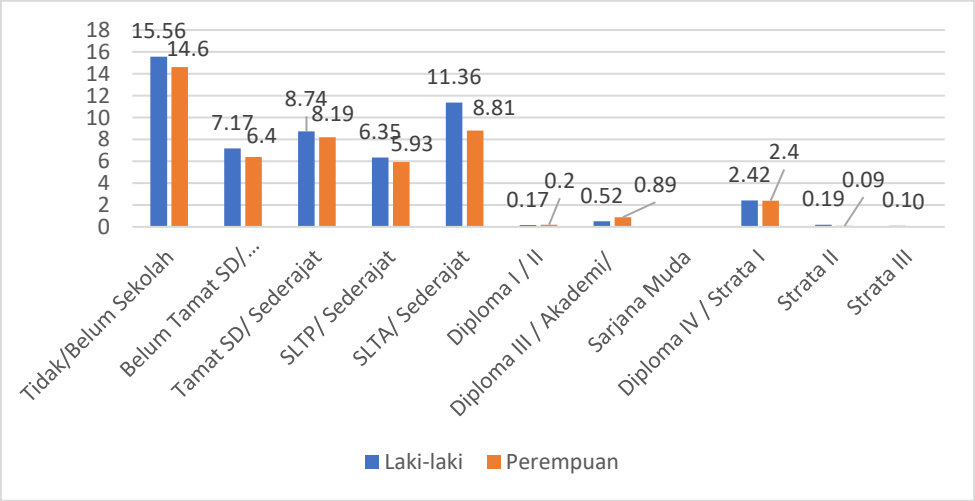
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

2.7.4 PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan menjadi salah satu ukuran untuk melihat kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat Pendidikan yang diselesaikan maka semakin baik kualitas penduduk di suatu wilayah. Pada tahun 2023 komposisi penduduk Provinsi Kalimantan Utara terbanyak pada Penduduk yang Tidak/Belum Sekolah sebesar 29,31 persen, lalu diikuti oleh Penduduk dengan Tingkat Pendidikan SLTA/Sederajat sebesar 19,58 persen.

Gambar 7. Persentase Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kalimantan Utara Tahun 2024





Sumber: Disdukcapil Prov. Kaltara

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Pendidikan	Laki-Laki		Perempuan		Total	%
	N	%	N	%		
Tidak/Belum Sekolah	119.475	15,71%	112.078	14,73%	231.553	30,44%
Belum Tamat SD/ Sederajat	54.213	7,13%	48.281	6,35%	102.494	13,47%
Tamat SD/ Sederajat	65.970	8,67%	61.740	8,12%	127.710	16,79%
SLTP/ Sederajat	47.951	6,30%	44.861	5,90%	92.812	12,20%
SLTA/ Sederajat	86.636	11,39%	67.051	8,81%	153.687	20,20%
Diploma I / II	1.297	0,17%	1.459	0,19%	2.756	0,36%
Diploma III / Akademi/ Sarjana Muda	3.924	0,52%	6.703	0,88%	10.627	1,40%
Diploma IV / Strata I	18.421	2,42%	18.440	2,42%	36.861	4,85%
Strata II	1.437	0,19%	708	0,09%	2.145	0,28%
Strata III	57	0,01%	22	0,00%	79	0,01%
Kalimantan Utara	399.381	52,50%	361.343	47,50%	760.724	100,00%

Sumber: Disdukcapil Prov. Kaltara

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMBANGUNAN PEREMPUAN & ANAK KALIMANTAN UTARA

3.1 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Angka IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

1. Manfaat IPM

- IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk)
- IPM merupakan salah satu indikator target pembangunan pemerintah dalam pembahasan asumsi makro di DPR-RI
- IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)
- Komponen IPM (HLS, RLS, dan Pengeluaran) merupakan indikator yang digunakan dalam penghitungan Dana Insentif Daerah (DID)

2. Status IPM

Status IPM menggambarkan level pencapaian pembangunan manusia dalam suatu periode:

- Sangat tinggi : $IPM \geq 80$
- Tinggi : $70 \leq IPM < 80$
- Sedang : $60 \leq IPM < 70$
- Rendah : $IPM < 60$

Pembangunan manusia di Kalimantan Utara terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Utara mencapai 73,41. Angka ini meningkat sebesar 0,53 poin atau tumbuh sebesar 0,73 persen dibandingkan tahun 2023. Status capaian pembangunan manusia Kalimantan Utara berstatus “tinggi”.

Angka IPM yang terus meningkat menggambarkan Kualitas kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan hidup penduduk Kalimantan Utara yang terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 6 IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022-2024

Kab/Kota	2022	2023	2024
Malinau	73,55	74,00	74,72
Bulungan	72,56	73,20	73,83
Tana Tidung	69,45	70,06	70,95
Nunukan	67,88	68,43	69,27
Tarakan	76,75	77,61	78,03
Kalimantan Utara	72,21	72,88	73,41
Nasional	73,77	74,39	75,02

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Meski secara umum pembangunan manusia di Kalimantan Utara mengalami kemajuan, namun kesenjangan pembangunan manusia antar kabupaten / kota masih terjadi. Disparitas kesenjangan pembangunan manusia yang digambarkan dengan besaran IPM pada tahun 2024 bervariasi antara 69,27 s/d 78,03 dengan

IPM tertinggi di Kota Tarakan dan IPM terendah di Kabupaten Nunukan.

Kesenjangan juga ditunjukkan dengan memperhatikan posisi relatif antara IPM kab/kota terhadap rata-rata IPM Provinsi, terlihat bahwa IPM Kota Tarakan berada diatas IPM Provinsi, sementara IPM kabupaten lainnya berada dibawah nilai IPM Provinsi. Sementara IPM Provinsi Kalimantan Utara masih dibawah Nasional sehingga perlu langkah-langkah yang komprehensif untuk meningkatkan IPM terutama dari sisi pendapatan yang identik dengan pengeluaran perkapita yang masih berada jauh dari pengeluaran perkapita Nasional.

Berdasarkan komponen pembentuk IPM, dari dimensi kesehatan, Bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,15 tahun, lebih lama 0,22 tahun dibandingkan tahun 2023. Dari Dimensi Pendidikan, Anak-anak yang pada tahun 2024 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan yang sama dengan



pencapaian nasional yaitu selama 13,21 tahun, lebih lama 0,01 tahun dibandingkan tahun 2023, dan Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,35 tahun, lebih lama 0,01 tahun dibandingkan tahun 2023. Dari dimensi pemenuhan kebutuhan hidup, Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk pada tahun 2024 sebesar 10,197 juta rupiah per tahun, meningkat 463 ribu rupiah dibandingkan tahun 2023.

Tabel 7. Umur Harapan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota
Tahun 2022-2024

Kab/Kota	2022	2023	2024
Malinau	73,23	73,25	73,27
Bulungan	73,80	73,83	73,87
Tana Tidung	73,44	73,47	73,51
Nunukan	73,09	73,11	73,13
Tarakan	74,21	74,24	74,27
Kalimantan Utara	73,51	73,54	73,57
Nasional	73,70	73,93	74,15

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Adapun Kota Tarakan merupakan wilayah dengan Umur Harapan Hidup tertinggi di provinsi Kalimantan Utara, dan memiliki UHH di atas nasional pada tahun 2024.

Tabel 8. Harapan Lama Sekolah Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2022-2024

Kab/Kota	2022	2023	2024
Malinau	13,33	13,34	13,35
Bulungan	13,03	13,04	13,25
Tana Tidung	12,38	12,39	12,61
Nunukan	12,67	12,68	12,69
Tarakan	14,04	14,21	14,22
Kalimantan Utara	13,06	13,20	13,21
Nasional	13,10	13,15	13,21

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Trend Harapan Lama Sekolah Kalimantan Utara meningkat dari 13,20 tahun (2023) menjadi 13,21 tahun (2024). Seluruh kabupaten/kota menunjukkan tren peningkatan HLS secara konsisten setiap tahun. Kota Tarakan memiliki HLS tertinggi, sedangkan Kabupaten

Tana Tidung terendah. Pada tahun 2024, HLS Kalimantan Utara sudah setara dengan capaian nasional (13,21 tahun). Peningkatan HLS menunjukkan perbaikan akses dan kesempatan pendidikan, meskipun masih perlu ditingkatkan di beberapa wilayah.

Tabel 9 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Tahun 2022-2024

Kab/Kota	2022	2023	2024
Malinau	9,41	9,43	9,63
Bulungan	9,20	9,21	9,23
Tana Tidung	8,97	9,04	9,24
Nunukan	8,24	8,26	8,39
Tarakan	10,08	10,36	10,37
Kalimantan Utara	9,27	9,34	9,35
Nasional	8,69	8,77	8,85

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Rata-Rata Lama Sekolah Kalimantan Utara meningkat dari 9,34 tahun (2023) menjadi 9,35 tahun (2024). Seluruh kabupaten/kota menunjukkan peningkatan RLS secara konsisten selama periode 2022–2024. Kota Tarakan memiliki RLS tertinggi, sedangkan Kabupaten Nunukan terendah. RLS Kalimantan Utara lebih tinggi dibandingkan capaian nasional, yaitu 9,35 tahun (provinsi) dan 8,85 tahun (nasional) pada 2024. Peningkatan RLS menunjukkan perbaikan tingkat pendidikan penduduk, serta keberhasilan pembangunan sektor Pendidikan.

Tabel 10 Pengeluaran Perkapita Pertahun (Rp.000) Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2022-2024

Kab/Kota	2022	2023	2024
Malinau	10.304	10.708	11.190
Bulungan	9.641	10.205	10.581
Tana Tidung	8.012	8.386	8.707
Nunukan	7.446	7.787	8.265
Tarakan	11.596	11.992	12.451
Kalimantan Utara	9.350	9.734	10.197
Nasional	11.479	11.899	12.341

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Pengeluaran per kapita Kalimantan Utara meningkat dari 9.734 ribu rupiah (2023) menjadi 10.197 ribu rupiah (2024). Seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan pengeluaran per kapita secara konsisten setiap tahun. Kota Tarakan memiliki pengeluaran per kapita tertinggi dengan capaian 12.451 ribu rupiah, sedangkan Kabupaten Nunukan terendah pada 8.265 ribu rupiah. Pengeluaran per kapita Kalimantan Utara masih di bawah rata-rata nasional, yaitu 10.197 ribu rupiah (provinsi) dan 12.341 ribu rupiah (nasional) pada 2024. Peningkatan pengeluaran per kapita menunjukkan adanya perbaikan tingkat



kesejahteraan dan daya beli masyarakat, meskipun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai rata-rata nasional.

3.2 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian well-being laki-laki dan perempuan.

Metodologi penghitungan IPG mengacu pada metodologi baru yang digunakan oleh UNDP tahun 2010 menggambarkan rasio IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki.

Selama periode 2021-2024, terdapat peningkatan positif pada nilai IPG, baik di level Nasional maupun di wilayah Kalimantan Utara. Jika dibandingkan, terlihat bahwa isu kesetaraan gender masih merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Utara. Ukuran pembangunan manusia berbasis gender di wilayah Kalimantan Utara masih berada dibawah rata-rata Nasional. Pada tahun 2024 pencapaian pembangunan gender di Kalimantan Utara mencapai 88,77. Hal ini menunjukkan bahwa IPM perempuan lebih rendah dibandingkan IPM laki-laki. Kondisi yang terjadi di wilayah Kalimantan Utara tersebut juga merupakan gambaran kondisi yang dialami secara umum pada level nasional. Namun demikian, jika diperhatikan besaran tingkat capaian pembangunan manusia perempuan di Kalimantan Utara masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pembangunan manusia perempuan di level nasional. Artinya, tingkat ketimpangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki relatif lebih tinggi di Kalimantan Utara dibandingkan rata-rata nasional.



Dengan memperhatikan masing-masing komponen pembentuk IPG, terlihat bahwa secara umum capaian aspek pendidikan dan kesehatan baik untuk laki-laki dan perempuan di Kalimantan Utara lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi nasional. Hal ini ditunjukkan oleh besaran nilai indikator pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan besaran nilai rata-rata nasional dari tahun ke tahun. Namun demikian, komponen kesehatan dan pengeluaran menunjukkan kondisi sebaliknya.

Tabel 11. IPG Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022-2024

Kab/Kota	2022	2023	2024
Malinau	82,61	82,86	83,06
Bulungan	85,24	85,73	86,03
Tana Tidung	78,78	78,99	79,56
Nunukan	83,78	83,97	84,50
Tarakan	92,06	92,73	92,79
Kalimantan Utara	87,85	88,46	88,77
Nasional	91,63	91,85	91,85

IPG Provinsi Kalimantan Utara meningkat dari 88,46 (2023) menjadi 88,77 (2024).Seluruh kabupaten/kota menunjukkan peningkatan IPG secara konsisten selama periode 2022–2024. Kota Tarakan memiliki IPG tertinggi sebesar 92,79, sedangkan Kabupaten Tana Tidung terendah dengan capaian 79,56. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Utara, terlihat

berada diatas rata-rata Provinsi, jauh mengunggul pembangunan manusia berbasis gender.

Tabel 12. Umur Harapan Hidup Laki-laki & Perempuan Kab/Kota Tahun 2022-2024

Kab/Kota	2022		2023		2024	
	L	P	L	P	L	P
Malinau	71.30	71.73	71.30	71.75	71.32	71.76
Bulungan	71.71	73.70	71.72	73.74	71.75	73.75
Tana Tidung	70.75	71.66	70.77	71.70	70.78	71.72
Nunukan	70.63	72.23	70.65	72.24	70.66	72.25
Tarakan	73.48	74.61	73.51	74.63	73.54	74.65
Kalimantan Utara	70.70	74.54	70.72	74.75	70.76	74.79
Nasional	71,46	76,05	71,61	76,37	70,17	74,18

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Pada tahun 2024 Umur Harapan Hidup laki-laki dan perempuan di Kalimantan Utara meningkat secara bertahap selama periode 2022–2024. Perempuan memiliki UHH lebih tinggi dibandingkan laki-laki di seluruh kabupaten/kota dan tingkat provinsi setiap tahun. Pada tahun 2024, UHH Kalimantan Utara mencapai 70,76 tahun untuk laki-laki dan

74,79 tahun untuk perempuan. Kota Tarakan memiliki UHH tertinggi untuk laki-laki dan perempuan, sedangkan Kabupaten Tana Tidung dan Nunukan relatif lebih rendah.

Trend Harapan Lama Sekolah penduduk perempuan di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kenaikan dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Dimana pada tahun 2023 Harapan Lama Sekolah penduduk perempuan di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 13,63 tahun meningkat menjadi 13,64 tahun pada tahun 2024.

Harapan Lama Sekolah di Kalimantan Utara meningkat secara bertahap untuk laki-laki dan perempuan selama periode 2022–2024. Perempuan memiliki Harapan Lama Sekolah lebih tinggi dibandingkan laki-laki di tingkat provinsi setiap tahun. Pada tahun 2024, Harapan Lama Sekolah Kalimantan Utara mencapai 12,98 tahun (laki-laki) dan 13,64 tahun (perempuan).

Tabel 13. Harapan Lama Sekolah Laki-laki dan Perempuan Kab/Kota Tahun 2022-2024

Kab/Kota	2022		2023		2024	
	L	P	L	P	L	P
Malinau	13.2	13.85	13.22	13.86	13.23	13.87
Bulungan	13.22	12.8	13.23	13.02	13.32	13.24
Tana Tidung	12.58	12.23	12.59	12.27	12.61	12.5
Nunukan	12.66	12.72	12.67	12.74	12.68	12.75
Tarakan	13.55	14.47	13.56	14.76	13.57	14.77
Kalimantan Utara	12.95	13.42	12.97	13.63	12.98	13.64
Nasional	12,96	13,28	12,98	13,33	12,99	13,39

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Kota Tarakan memiliki capaian tertinggi untuk laki-laki dan perempuan, sedangkan Kabupaten Tana Tidung terendah.

Tabel 14. Rata-Rata Lama Sekolah Laki-laki dan Perempuan Kab/Kota Tahun 2022-2024

Kab/Kota	2022		2023		2024	
	L	P	L	P	L	P
Malinau	9.57	8.89	9.63	8.9	9.85	9.04
Bulungan	9.77	8.82	9.78	8.83	9.79	8.95
Tana Tidung	9.42	8.5	9.63	8.51	9.8	8.72
Nunukan	8.6	8.18	8.62	8.2	8.63	8.33
Tarakan	10.64	9.99	10.65	10.29	10.66	10.3
Kalimantan Utara	9.77	9.09	9.78	9.17	9.79	9.21
Nasional	8,99	8,39	9,07	8,48	9,17	8,54

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Rata-Rata Lama Sekolah di Kalimantan Utara meningkat secara bertahap untuk laki-laki dan perempuan selama periode 2022–2024. Laki-laki memiliki Rata-Rata Lama Sekolah lebih tinggi dibandingkan perempuan di tingkat provinsi setiap tahun.

Pada tahun 2024, Rata-Rata Lama Sekolah Kalimantan Utara mencapai 9,79 tahun (laki-laki) dan 9,21 tahun (perempuan).

Kota Tarakan memiliki capaian tertinggi dengan, sedangkan Kabupaten Nunukan terendah untuk laki-laki dan perempuan. Rata-Rata Lama Sekolah Kalimantan Utara pada

tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan nasional, yaitu 9,79 dan 9,17 tahun (laki-laki) dan 9,21 dibandingkan 8,54 tahun (perempuan).

Secara umum, level pengeluaran per kapita penduduk di Kalimantan Utara relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Jika dirinci menurut jenis kelamin, maka terlihat pula bahwa level pengeluaran per kapita, baik laki-laki dan perempuan, di wilayah Kalimantan Utara lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Lebih lanjut, terdapat perbedaan kecepatan perubahan komponen pengeluaran antar gender. Untuk Kalimantan Utara, peningkatan pendapatan laki-laki (yang diukur dengan nilai pengeluaran) lebih cepat dibandingkan peningkatan pada pendapatan perempuan.

Tabel 15. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Perempuan (Rp.000) Kab/Kota Tahun 2022-2024

Kab/Kota	2022		2023		2024	
	L	P	L	P	L	P
Malinau	15.283	5.443	15.742	5.655	16.439	5.921
Bulungan	14.802	6.600	15.398	6.886	15.955	7.054
Tana Tidung	11.912	4.058	12.309	4.228	12.781	4.379
Nunukan	10.797	4.605	11.299	4.788	11.984	5.074
Tarakan	16.132	10.170	16.675	10.425	17.316	10.812
Kalimantan Utara	13.239	6.161	13.703	6.384	14.345	6.704
Nasional	16.215	9.281	16.736	9.579	17.345	9.922

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Pengeluaran per kapita disesuaikan di Kalimantan Utara meningkat secara konsisten untuk laki-laki dan perempuan selama periode 2022–2024. Laki-laki memiliki pengeluaran per kapita lebih tinggi dibandingkan perempuan di seluruh kabupaten/kota dan tingkat provinsi. Pada tahun 2024, pengeluaran per kapita Kalimantan Utara mencapai 14.345 ribu rupiah (laki-laki) dan 6.704 ribu rupiah (perempuan).

3.3 INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)

IDG menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik, IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. Metode penghitungan IDG masih mengacu pada metodologi lama sampai Indeks Ketidaksetaraan Gender (IKG) bisa dihitung.

Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi. Untuk mengukur ketimpangan

gender pada bidang-bidang kunci pada partisipasi ekonomi dan politik, serta pengambilan keputusan. Nilainya berkisar antara 0-100 persen, Bila nilai IDG semakin tinggi (mendekati angka 100) maka perempuan semakin mengambil peran aktif yang penting dalam kehidupan ekonomi dan politik atau makin sempurna pemberdayaannya.

Komponen Pembentuk IDG

- Keterlibatan Perempuan di Parlemen
- Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi
- Sumbangan Pendapatan Perempuan

Capaian pemberdayaan gender diukur melalui indeks komposit yang disebut Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks tersebut digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusinya dalam aspek ekonomi maupun sosial.

Tabel 16. IDG Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2022-2024

Kab/Kota	2022	2023	2024
Malinau	69,10	72,55	76,58
Bulungan	65,72	65,55	53,78
Tana Tidung	60,82	61,54	61,10
Nunukan	77,41	78,68	73,85
Tarakan	59,15	58,61	68,54
Kalimantan Utara	61,92	58,86	67,83
Nasional	75,59	76,90	77,62

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

IDG Provinsi Kalimantan Utara meningkat secara keseluruhan dari 61,92 (2022) menjadi 67,83 (2024), meskipun sempat menurun pada tahun 2023 pada angka 58,86. Sebagian besar kabupaten/kota menunjukkan tren peningkatan IDG, terutama Kabupaten Malinau, Nunukan, dan Tarakan. Kabupaten Nunukan memiliki capaian IDG tertinggi, sedangkan Kota Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung relatif lebih rendah.

Terjadi peningkatan signifikan pada beberapa wilayah, seperti Malinau dan Tarakan, yang menunjukkan perbaikan peran perempuan dalam pembangunan. IDG Kalimantan Utara masih di bawah capaian nasional, yaitu 67,83 (provinsi) dibandingkan 77,62 (nasional) pada 2024.

Pemberdayaan perempuan juga diukur melalui indikator persentase perempuan sebagai tenaga profesional. Komponen ini menangkap informasi mengenai kondisi wanita dalam berperan aktif untuk pengambilan keputusan di masyarakat. Gambaran keterlibatan perempuan pada dunia pekerjaan sebagai tenaga profesional juga secara tidak langsung mengindikasikan kemampuan wanita turut berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Secara umum terlihat bahwa peran dan partisipasi perempuan Kalimantan Utara baik dalam pengambilan keputusan atau memberikan kontribusi secara aktif dalam bidang ekonomi, sosial dan politik masih perlu ditingkatkan. Pada aspek politik, indikator proporsi anggota

parlemen perempuan di Kalimantan Utara relatif lebih baik jika dibandingkan dengan proporsi perempuan yang aktif dalam politik pada level nasional.

Tabel 17. Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen
Kab/Kota Tahun 2022-2024

Kab/Kota	2022	2023	2024
Malinau	20,00	20,00	25
Bulungan	20,00	20,00	8
Tana Tidung	15,00	15,00	15
Nunukan	32,00	32,00	23.33
Tarakan	10,00	10,00	20
Kalimantan Utara	11,43	8,57	17.14
Nasional	21,74	22,14	22.46

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Persentase keterlibatan perempuan di parlemen Kalimantan Utara meningkat dari 8,57% (2023) menjadi 17,14% (2024), setelah sebelumnya menurun dari 11,43% (2022). Kabupaten Nunukan memiliki keterlibatan perempuan tertinggi, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2024. Kabupaten Bulungan mengalami penurunan signifikan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan menunjukkan peningkatan keterlibatan perempuan pada tahun 2024. Secara umum, keterlibatan perempuan di parlemen Kalimantan Utara masih di bawah rata-rata nasional, yaitu 17,14% (provinsi) dibandingkan 22,46% (nasional) pada 2024.

Dari tabel disamping terlihat bahwa peranan wanita dalam aktivitas pengambilan keputusan sudah cukup baik dengan kabupaten/kota memiliki besaran nilai yang relatif homogen. Komponen ketiga memberikan ukuran partisipasi perempuan dalam penciptaan pendapatan bagi keluarganya, sekaligus mengukur peran aktif wanita dalam aktivitas ekonomi. Indikator sumbangan pendapatan wanita menunjukkan bahwa relatif sedikit perubahan yang berarti selama tiga tahun terakhir. Selain itu, besaran nilai proporsi sumbangan pendapatan perempuan di Kalimantan Utara

Tabel 18. Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kab/Kota 2022-2024

Kab/Kota	2022	2023	2024
Malinau	33,57	45,63	45.16
Bulungan	43,79	46,16	44.07
Tana Tidung	43,66	50,45	41.78
Nunukan	37,91	49,12	43.94
Tarakan	48,38	45,92	51.95
Kalimantan Utara	43,18	46,97	46.49
Nasional	48,65	49,53	50.13

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Tabel 19. Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan Kabupaten/Kota Tahun 2022-2024

Kab/Kota	2022	2023	2024
Malinau	28,38	28,98	29.05
Bulungan	22,13	22,10	22.57
Tana Tidung	22,96	24,22	24.07



Nunukan	27,28	27,25	26.88
Tarakan	25,91	25,89	25.59
Kalimantan Utara	26,91	26,88	26.68
Nasional	37,17	37,09	37.31

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Sementara itu, pada level nasional peran perempuan dalam kegiatan ekonomi cenderung menurun.

Gambaran tersebut senada dengan kondisi yang digambarkan oleh komponen pendapatan pada indikator IPG, dimana kecepatan peningkatan pendapatan perempuan relatif lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan pendapatan laki-laki. Akibatnya, posisi perempuan secara ekonomi dapat tertinggal lebih jauh apabila tidak dilakukan upaya untuk mendorong peran dan pemberdayaan perempuan dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan terkait penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi perempuan, perlu ditingkatkan untuk memberikan peluang bagi perempuan untuk dapat terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi.

3.4 INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender merupakan Indeks yang menjelaskan sejauh mana kehilangan pencapaian keberhasilan pembangunan dalam tiga aspek pembangunan manusia (kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi) sebagai akibat adanya ketimpangan gender. Besaran Indeks Ketimpangan Gender antara 0 s/d 1. Semakin tinggi indeks (mendekati 1) maka semakin timpang capaian keberhasilan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

IKG Kalimantan Utara pada periode tahun 2022-2024 mengalami fluktuasi dalam capaiannya. Hal ini ditunjukkan oleh penurunan nilai IKG dari 0,444 di tahun 2022 menurun menjadi 0,452 di tahun 2023 kemudian meningkat menjadi 0,418 di tahun 2024. Nilai pada tahun 2024 kembali berada diatas rata-rata nasional yang sebelumnya di tahun 2023 sempat berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini hendaknya mendapat perhatian yang serius oleh pemerintah agar dapat menurunkan ketimpangan untuk mencapai keberhasilan pembangunan.

Tabel 20. IKG Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2022-2024

Kab/Kota	2022	2023	2024
Malinau	0,511	0,491	0.480
Bulungan	0,453	0,388	0.496
Tana Tidung	0,496	0,480	0.448
Nunukan	0,370	0,370	0.362
Tarakan	0,244	0,367	0.352
Kalimantan Utara	0,444	0,452	0.418
Nasional	0,459	0,447	0.421

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan komponen pembentuk IKG, dari dimensi kesehatan reproduksi, proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup tidak di fasilitas kesehatan pada tahun 2024 sebesar 0,060, Artinya dari 1000 perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup, 60 diantaranya melahirkan tidak di fasilitas kesehatan. Angka tahun 2024 ini meningkat 0,006 dibandingkan tahun 2023.

Tabel 21. Proporsi Perempuan Pernah Kawin 15-49 tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam 2 Tahun Terakhir Tidak di Fasilitas Kesehatan Menurut Kab/Kota, 2022-2024

Kab/Kota	2022	2023	2023
Malinau	0,207	0,168	0.166
Bulungan	0,074	0,045	0.084
Tana Tidung	0,157	0,130	0.075
Nunukan	0,039	0,045	0.040
Tarakan	0,001	0,023	0.029
Kalimantan Utara	0,056	0,054	0.060
Nasional	0,140	0,126	0.094

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Apabila dilihat berdasarkan kabupaten/kota, dapat dilihat Kota tarakan memiliki angka terendah yakni di angka 0,029, sedangkan tertinggi di kabupaten malinau yakni di angka 0,166. Jika dibandingkan dengan angka nasional, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan sudah berada di bawah angka Nasional, sedangkan Kabupaten Malinau masih berada di Atas Angka Nasional.

Masih pada dimensi kesehatan reproduksi, Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun pada tahun 2024 sebesar 0,272, Artinya dari 1000 perempuan usia 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup, 272 diantaranya melahirkan anak lahir hidup pertama saat berusia kurang dari 20 tahun. Angka tahun 2024 ini menurun 0,017 dibandingkan tahun 2023.



Tabel 22. Proporsi Perempuan Pernah Kawin 15-49 tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Yang Pertama Kali Berumur Kurang dari 20 tahun Menurut Kab/Kota, 2022-2024

Kab/Kota	2022	2023	2023
Malinau	0,390	0,359	0.348
Bulungan	0,336	0,330	0.302
Tana Tidung	0,277	0,297	0.330
Nunukan	0,343	0,335	0.270
Tarakan	0,191	0,209	0.230
Kalimantan Utara	0,292	0,289	0.272
Nasional	0,265	0,258	0.248

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Apabila dilihat berdasarkan kabupaten/kota, dapat dilihat Kota tarakan memiliki angka terendah yakni di angka 0,230, sedangkan tertinggi di kabupaten malinau yakni di angka 0,348. Jika dibandingkan dengan angka nasional, Hanya Kota Tarakan yang sudah berada di bawah angka Nasional, sedangkan 4 Kabupaten Lainnya masih berada di Atas Angka Nasional.

Berdasarkan dimensi pemberdayaan, persentase perempuan yang menjadi anggota legislative pada tahun 2024 sebesar 17,14 persen, Angka tahun 2024 ini meningkat 8,57 persen atau dua kali lipat dibandingkan tahun 2023.

Apabila dilihat berdasarkan kabupaten/kota, dapat dilihat Kabupaten Nunukan memiliki persentase tertinggi yakni di angka 23.33 persen, sedangkan terendah di Kabupaten Bulungan yakni di angka 8 persen. Kabupaten Bulungan dan Tana Tidung berada di bawah Angka Provinsi yang hanya di angka 17,14 persen, akan tetapi hanya Kabupaten Malinau dan Nunukan yang sudah lebih tinggi dari angka Nasional.

Tabel 23. Keterlibatan Perempuan di Legislatif Menurut Kab/Kota Tahun 2022-2024 (persen)

Kab/Kota	2022	2023	2024
Malinau	20,00	20,00	25.00
Bulungan	20,00	20,00	8.00
Tana Tidung	15,00	15,00	15.00
Nunukan	32,00	32,00	23.33
Tarakan	10,00	10,00	20.00
Kalimantan Utara	11,43	8,57	17.14
Nasional	21,74	22,14	22.46

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara



Masih pada dimensi pemberdayaan, Persentase Penduduk Perempuan dengan Pendidikan Minimal SMA pada tahun 2024 sebesar 40,6 persen. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2022-2023. Dari tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,35 persen poin.

Tabel 24. Persentase Penduduk Perempuan dengan Pendidikan Minimal SMA Menurut Kab/Kota, 2022-2024

Kab/Kota	2022	2023	2024
Malinau	42,61	43,08	44.13
Bulungan	39,73	41,29	39.88
Tana Tidung	40,76	38,64	40.59
Nunukan	33,61	32,87	31.47
Tarakan	48,27	49,47	47.13
Kalimantan Utara	41,48	41,95	40.6
Nasional	36,95	37,60	37.64

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Apabila dilihat berdasarkan kabupaten/kota, dapat dilihat pada Tahun 2024 Kota tarakan memiliki angka tertinggi yakni di angka 47,13 persen, sedangkan terendah di Kabupaten Nunukan yang hanya di angka 31,47 persen. Jika dibandingkan dengan angka nasional, hanya Kabupaten Nunukan yang masih berada di bawah angka nasional, sedangkan 4 kabupaten/kota lainnya sudah berada di atas angka nasional.

Berdasarkan dimensi Pasar Tenaga Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan pada tahun 2024 berada di angka 52,14 persen, Artinya dari 100 perempuan usia kerja, 52 – 53 diantaranya masuk dalam kelompok angkatan kerja. Angka tahun 2024 ini menurun 1,46 persen poin dibandingkan tahun 2023.

Tabel 25. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Menurut Kab/Kota, 2022-2024

Kab/Kota	2022	2023	2024
Malinau	59,10	59,97	57.83
Bulungan	42,24	57,19	53.51
Tana Tidung	55,17	61,09	58.41
Nunukan	48,51	54,36	58.03
Tarakan	49,62	47,90	44
Kalimantan Utara	49,30	53,60	52.14
Nasional	53,41	54,52	56.42

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Apabila dilihat berdasarkan kabupaten/kota, dapat dilihat Pada Tahun 2024 Kabupaten Tana Tidung memiliki angka tertinggi yakni di angka 58,41 persen, sedangkan terendah di Kota Tarakan yang hanya di angka 44 persen. Jika dibandingkan dengan angka nasional, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan masih berada di bawah angka nasional, sedangkan 3 kabupaten/kota lainnya sudah berada di atas angka nasional.

PROFIL PEREMPUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

4.1 PROFIL PEREMPUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG SOSIAL

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Utara, terutama di wilayah pedesaan dan kawasan terpencil. Namun, kemiskinan bukan hanya soal rendahnya pendapatan atau kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar, melainkan juga terkait erat dengan ketimpangan gender yang masih melekat di masyarakat. Perempuan sering kali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak kemiskinan akibat posisi sosial, ekonomi, dan budaya yang kurang mendukung mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan.

Perempuan di Kalimantan Utara, terutama di wilayah pedalaman, menghadapi berbagai hambatan struktural. Mereka memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja yang layak. Dalam banyak kasus, perempuan juga berperan sebagai kepala keluarga, baik karena suaminya bekerja di luar daerah, meninggal, atau karena perceraian. Meski demikian, kontribusi perempuan dalam perekonomian keluarga sering kali tidak diakui secara formal. Pekerjaan mereka di sektor informal atau sebagai pengelola rumah tangga jarang dihitung sebagai bagian dari pembangunan ekonomi.

Gambar 8. Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 – 2024

Kab/Kota	2021	2022	2023	2024
Malinau	7,30	6,64	6,54	6,94
Bulungan	10,03	9,32	8,99	8,76
Tana Tidung	5,15	4,45	4,62	4,47
Nunukan	6,79	6,13	5,53	5,73
Tarakan	6,71	6,30	6,10	5,56
Kalimantan Utara	7,36	6,77	6,45	6,32
Nasional	10,14	9,54	9,36	8,57

Dari data diketahui bahwa penurunan angka kemiskinan di provinsi Kalimantan utara relative stabil, walaupun sempat terjadi kenaikan angka kemiskinan pada tahun

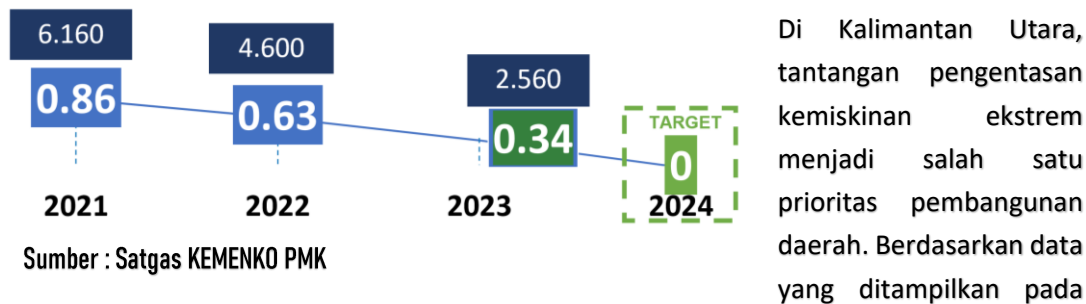
Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

2021, hal tersebut terjadi diakibatkan oleh situasi covid-19, setelah tahun 2021 terjadi penurunan yang konstan hingga mencapai angka 6,32%.

4.1.1 KONDISI KEMISKINAN EKSTREM DI PROVINSI KALTARA

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi di mana seseorang hidup dengan pendapatan di bawah ambang batas minimum yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Berdasarkan standar internasional Bank Dunia, kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai individu yang hidup dengan pengeluaran kurang dari \$1,90 per kapita per hari dalam paritas daya beli (PPP). Kriteria ini mencakup ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan mendasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Di Indonesia, penghitungan kemiskinan ekstrem disesuaikan dengan kondisi lokal berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Gambar 9. Angka Kemiskinan Ekstrem Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2018 – 2024



grafik, jumlah penduduk yang berada dalam kategori kemiskinan ekstrem menunjukkan tren penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun awal yang dicatat, terdapat 6.160 jiwa atau setara dengan 0,86% dari total populasi yang hidup dalam kemiskinan ekstrem.

Berbagai upaya pemerintah daerah, seperti pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses terhadap layanan dasar, dan program perlindungan sosial, berhasil menurunkan angka tersebut menjadi 4.600 jiwa (0,63%) pada periode berikutnya, dan kemudian turun lebih lanjut menjadi 2.560 jiwa (0,34%). Penurunan yang konsisten ini menunjukkan efektivitas program yang telah dijalankan, meskipun tantangan tetap ada untuk mencapai target nol kemiskinan ekstrem dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Capaian ini memberikan optimisme, namun juga menuntut kerja sama yang lebih intensif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Penghapusan kemiskinan ekstrem tidak hanya berbicara soal bantuan langsung, tetapi juga tentang pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, peningkatan infrastruktur di daerah terpencil, serta kebijakan yang inklusif untuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat.

4.1.2 ANALISIS DATA DEPRIVASI PEREMPUAN DI KALIMANTAN UTARA BERDASARKAN REGSOSEK

Berdasarkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), terdapat beberapa aspek utama yang menggambarkan deprivation perempuan di Kalimantan Utara. Analisis berikut ini memerinci kondisi di masing-masing aspek:

Tabel 26 Data Deprivasi Perempuan Berdasarkan REGSOSEK

Aspek	Deprivasi Variabel	Jumlah Total Perempuan	Jumlah Perempuan Miskin
Pendidikan	Perempuan dengan Ijazah Tertinggi SD/Setara/Tidak Punya Ijazah SD	9.916	2.188
Kesehatan	Perempuan dengan Keluhan Kesehatan Kronis/Menahun	23.281	2.327
	Disabilitas	5.085	814
Infrastruktur Dasar	Kepala Keluarga Perempuan yang Tidak Memiliki Rumah	10.150	1.058
Ketenagakerjaan	Perempuan Tidak Bekerja Usia 15 Tahun ke Atas	111.600	7.963

Sumber : Data Registrasi Sosial Ekonomi – Bappenas & BPS

4.1.2.1 PENDIDIKAN

Data menunjukkan bahwa terdapat 9.916 perempuan yang tingkat pendidikannya hanya mencapai SD, setara, atau bahkan tidak memiliki ijazah sama sekali. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.188 perempuan tergolong miskin. Rendahnya tingkat pendidikan pada kelompok perempuan ini menjadi hambatan utama dalam akses ke pekerjaan formal dan kesempatan ekonomi yang lebih baik. Hal ini memperkuat hubungan antara pendidikan rendah dan kemiskinan, di mana minimnya pengetahuan dan keterampilan mempersempit peluang mereka untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

4.1.2.2 KESEHATAN

Dalam aspek kesehatan, sebanyak 23.281 perempuan mengalami keluhan kesehatan kronis atau menahun. Dari angka tersebut, 2.327 perempuan berada dalam kondisi miskin. Perempuan dengan masalah kesehatan kronis menghadapi dua tantangan utama, yaitu kehilangan produktivitas dan beban biaya perawatan yang tinggi. Kondisi ini sering kali berdampak pada anggota keluarga lainnya, terutama jika perempuan yang sakit merupakan pencari nafkah atau pengelola rumah tangga.

4.1.2.3 DISABILITAS

Sebanyak 5.085 perempuan terdata sebagai penyandang disabilitas, dan 814 perempuan di antaranya berada dalam kondisi miskin. Disabilitas pada perempuan menambah dimensi kerentanan, mengingat adanya hambatan sosial dan ekonomi yang lebih besar dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, atau layanan dasar. Ketidakmampuan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi memperburuk kondisi perempuan penyandang disabilitas yang sudah rentan secara struktural.

4.1.2.4 INFRASTRUKTUR DASAR

Pada aspek infrastruktur dasar, terdapat 10.150 kepala keluarga perempuan yang tidak memiliki rumah layak huni, dengan 1.058 perempuan di antaranya berada dalam kategori miskin. Perempuan yang menjadi kepala keluarga tanpa akses terhadap rumah yang memadai tidak hanya menghadapi kerentanan fisik tetapi juga ketidakstabilan ekonomi. Kondisi ini juga berpotensi memperburuk situasi anak-anak yang mereka tanggung, baik dari segi kesehatan maupun pendidikan.

4.1.2.5 KETENAGAKERJAAN

Data ketenagakerjaan mencatat bahwa 111.600 perempuan berusia 15 tahun ke atas tidak bekerja, dengan 7.963 perempuan di antaranya berada dalam kategori miskin. Ketiadaan pekerjaan di kalangan perempuan ini mencerminkan minimnya akses ke lapangan kerja yang layak atau kendala lain seperti beban kerja domestik yang tidak seimbang. Kondisi ini menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara pengangguran perempuan dan kemiskinan, yang dapat memperburuk ketergantungan ekonomi pada pasangan atau anggota keluarga lainnya.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa perempuan di Kalimantan Utara menghadapi tantangan signifikan pada berbagai aspek kehidupan yang saling berhubungan, mulai dari pendidikan hingga ketenagakerjaan. Tingkat kerentanan yang tinggi pada kelompok perempuan ini memerlukan pemahaman mendalam mengenai akar permasalahan di setiap aspek untuk menentukan intervensi yang paling efektif

Pendekatan berbasis gender dalam penanganan kemiskinan menjadi penting untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan kesempatan yang setara dalam mengakses sumber daya dan peluang. Langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah, seperti pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan keterampilan, fasilitasi akses permodalan, dan pengembangan UMKM, telah membantu perempuan untuk menjadi lebih mandiri secara finansial. Fokus khusus diberikan kepada perempuan kepala keluarga dan pelaku usaha mikro di sektor informal, yang sering kali menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.

Di samping itu, penyediaan layanan kesehatan yang responsif gender, termasuk akses terhadap kesehatan reproduksi, menjadi prioritas penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Kesehatan perempuan tidak hanya berpengaruh terhadap kesejahteraan

mereka sendiri tetapi juga terhadap kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Selain itu, penguatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi perempuan muda di Kalimantan Utara juga merupakan investasi jangka panjang untuk memutus siklus kemiskinan lintas generasi.

Kemiskinan dengan perspektif gender bukan hanya tanggung jawab perempuan itu sendiri, tetapi juga membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Melalui kebijakan yang responsif gender, alokasi anggaran yang berpihak kepada perempuan, dan partisipasi aktif berbagai pihak, Kalimantan Utara dapat menciptakan pembangunan yang lebih inklusif. Dengan memberdayakan perempuan, kita tidak hanya memperbaiki kondisi individu, tetapi juga memperkuat fondasi sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Menyadari bahwa pemberdayaan perempuan adalah kunci untuk mencapai keadilan sosial, pendekatan berbasis gender dalam penanganan kemiskinan harus terus diutamakan. Provinsi Kalimantan Utara memiliki peluang besar untuk menjadi contoh bagaimana keadilan gender dapat berkontribusi langsung pada pengentasan kemiskinan dan keberlanjutan pembangunan.

4.2 PROFIL PEREMPUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG KESEHATAN

4.2.1 UMUR HARAPAN HIDUP (UHH) PEREMPUAN

Kesehatan adalah hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, yang tercermin dari kondisi fisik yang senantiasa sehat. Untuk mencapai hal tersebut, berbagai langkah telah diupayakan oleh pemerintah salah satunya melalui pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, leluasa dan murah. Bersama angka kesakitan dan angka kematian bayi, angka harapan hidup (AHH) di suatu negara merupakan elemen kunci yang sering dijadikan tolak ukur dari kinerja pemerintah dalam upayanya melaksanakan pembangunan kesehatan.

Definisi dari Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang diperkirakan dapat ditempuh oleh seseorang. AHH merupakan indikator penting yang mencerminkan taraf kesehatan masyarakat di suatu wilayah sebagai dampak dari pelaksanaan hasil pembangunan khususnya di bidang kesehatan. Kata kesehatan dapat dimaknai sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU RI Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan). Semakin tinggi AHH atau semakin lama umur hidup yang dijalani merupakan gambaran semakin tinggi derajat kesehatan dan kualitas hidupnya. Indikator ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi pembangunan dalam bidang kesehatan.



Umur Harapan Hidup saat Lahir perempuan (UHH perempuan) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang perempuan sejak lahir. Umur harapan hidup perempuan di Provinsi Kalimantan Utara dalam periode tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Untuk melihat rata-rata perkiraan umur perempuan di Kalimantan Utara pada Tabel berikut yang menyajikan perkembangan AHH perempuan Kalimantan Utara tahun 2022-2024.

Tabel 27. Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota Tahun 2022-2024

Kab/ Kota	2022		2023		2024	
	L	P	L	P	L	P
Malinau	71,95	75,41	71,96	75,43	71,97	75,46
Bulungan	72,26	76,19	72,27	76,23	72,31	76,28
Tana Tidung	71,29	75,7	71,31	75,74	71,34	75,79
Nunukan	71,07	75,22	71,08	75,25	71,09	75,28
Tarakan	73,49	76,75	73,52	76,78	73,59	76,83
Kalimantan Utara	71,34	75,79	71,36	75,83	71,38	75,87

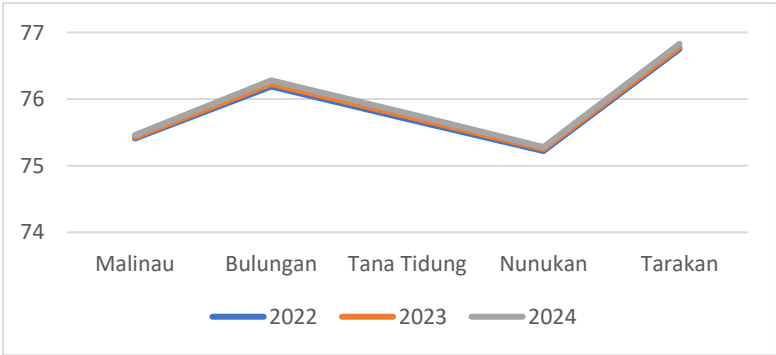
Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Umur harapan hidup perempuan di Provinsi Kalimantan Utara dalam dua tahun terakhir mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2023 umur harapan hidup perempuan di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 75,83 tahun mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 75,87 tahun.

Adapun Kota Tarakan, pada

Tahun 2024 menempati urutan pertama dengan umur harapan hidup tertinggi se Kalimantan Utara yaitu sebesar 76,83 tahun, menyusul Kabupaten Bulungan di posisi kedua dengan umur harapan hidup perempuan sebesar 76,28 tahun.

Gambar 10. Trend Umur Harapan Hidup Perempuan Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2022-2024



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

4.2.2 PENDUDUK YANG MENGALAMI KELUHAN KESEHATAN DALAM SEBULAN TERAKHIR

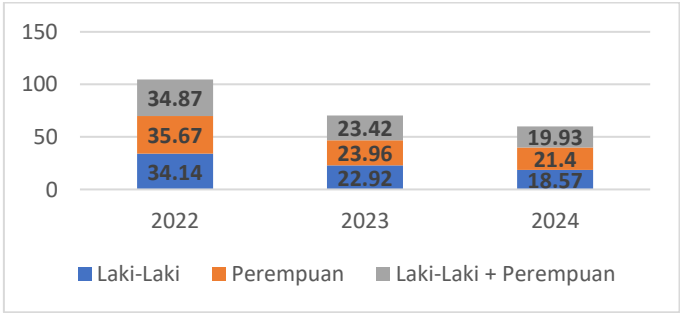
Keluhan kesehatan didefinisikan oleh Badan Pusat Statistik sebagai gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Gangguan kesehatan fisik dapat berupa sesak nafas, panas, diare, sakit kepala, penyakitkronis dan akut, atau gangguan kesehatan

karena kecelakaan. Sedangkan gangguan jiwa atau psikis dapat berupa rasa tertekan atau depresi, gelisah, ketakutan, trauma, skizofrenia, atau gangguan psikis lain yang berkaitan dengan gangguan cara berpikir (cognitive), kemauan (volition), emosi (affective), dan perilaku (psychomotor).

Kualitas kesehatan masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor biologis dan gaya hidup. Daya tahan perempuan lebih baik dibanding laki-laki. Menurut berbagai penelitian, laki-laki lebih rentan terhadap infeksi prenatal atau masalah lain di dalam kandungan dari sejak masa di dalam kandungan hingga lahir. Dilihat dari kromosomnya, sejak lahir wanita dibekali sepasang kromosom X yang mengandung sekitar 1100 gen, selain berperan penting dalam pengaturan hormone. Kromosom X juga berperan dalam fungsi vital tubuh lainnya, sementara pada laki-laki yang memiliki kromosom Y hanya mengandung sekitar 100 gen.

Statistik mengenai usia harapan hidup di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa usia harapan hidup perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Namun Meski perempuan memiliki usia harapan hidup yang lebih tinggi dari laki-laki, secara umum perempuan lebih

Gambar 11. Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan Dalam Sebulan Terakhir Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2024



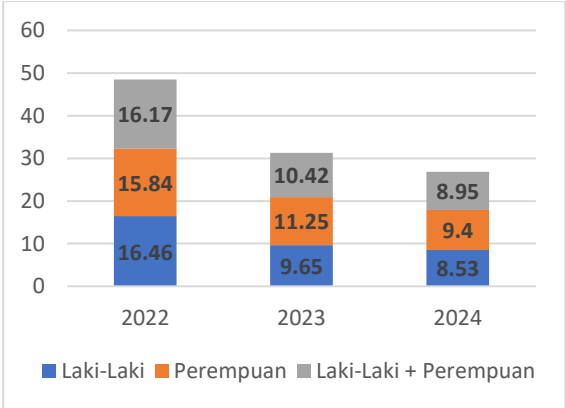
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

sensitif terhadap rasa sakit. Kondisi ini terlihat dari data keluhan kesehatan pada Gambar disamping. Dalam periode tahun 2022-2024, persentase perempuan yang mempunyai keluhan kesehatan lebih banyak dibanding laki-laki. Selama kurun waktu tersebut, penduduk yang mengalami keluhan kesehatan baik pada penduduk perempuan

4.2.3 ANGKA KESAKITAN

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti derajat kesehatan di wilayah tersebut semakin rendah atau menunjukkan bahwa angka kesakitan di wilayah tersebut tinggi (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Gambar 12. Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Angka kesakitan penduduk Kalimantan Utara tahun 2024 mencapai 8,95 persen, angka tersebut menurun dalam 3 tahun terakhir. Angka kesakitan penduduk Kalimantan Utara baik penduduk perempuan maupun penduduk laki-laki juga menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 angka kesakitan laki-laki sebesar 8,53 persen lebih rendah dibandingkan perempuan yang mencapai 9,4 persen.

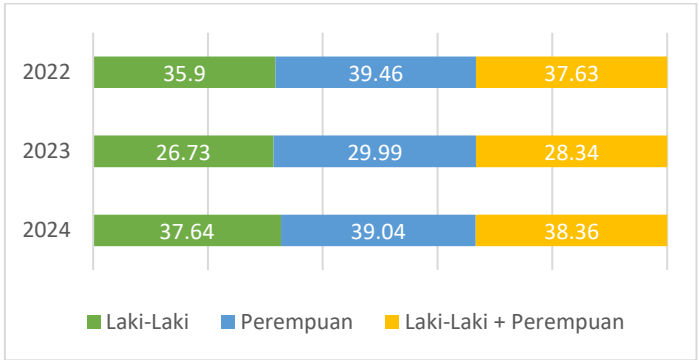
4.2.4 AKSES KESEHATAN MASYARAKAT

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan dapat dilihat dari ketersediaan / kemudahan mencapai fasilitas / tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk dalam akses fasilitas kesehatan antara lain jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, sosial ekonomi penduduk yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya, serta jenis pelayanan kesehatan. Ketersediaan serta keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan. Ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas dalam pelayanan kesehatan penduduk menjadi hal penting yang harus diperhatikan dan merupakan suatu keharusan. Selain jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia, derajat kesehatan penduduk tercermin dari persentase penduduk yang berobat ke fasilitas kesehatan. Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat.

Pada tahun 2024 persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan dalam satu bulan terakhir, tercatat sebesar 38,36 persen, sedangkan penduduk perempuan yang berobat jalan lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki sebesar 39,04 persen, dan penduduk laki-laki yang berobat jalan sebesar 37,64.

Dalam kurun waktu 2022-2024, baik penduduk laki-laki maupun perempuan yang mempunyai kesehatan dan berobat jalan memiliki kecenderungan berfluktuasi yang melakukan berobat jalan dalam satu bulan terakhir. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan persentase penduduk yang berobat jalan dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 38,36 persen.

Gambar 13. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Tabel dibawah ini menunjukkan persentase penduduk Kalimantan Utara yang mengaku melakukan rawat jalan menurut fasilitas kesehatan yang digunakan. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa puskesmas/puskemas pembantu masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk melakukan rawat jalan sebesar 48,06 persen di 5 Kab/kota, dimana Kab. Malinau tercatat dengan masyarakat yang terbanyak melakukan rawat jalan di puskesmas/pustu sebesar 68,74 persen, sedangkan yang terkecil melakukan rawat jalan di Kota Tarakan sebesar 30,11 persen. Pilihan kedua terbanyak masyarakat Kalimantan Utara untuk melakukan rawat jalan ketika mengalami keluhan kesehatan adalah RS Pemerintah sebesar 22,55 persen, dimana Kota Tarakan yang tercatat dengan masyarakat yang terbanyak melakukan rawat jalan sebesar 28,36, sedangkan yang terkecil melakukan rawat jalan RS Swasta yaitu sebesar 1,59 persen, ini disebabkan karena RS Swasta yang ada di Provinsi Kalimantan Utara masih sedikit.

Tabel 28. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Kab/Kota dan Tempat Berobat Jalan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Kabupaten/Kota	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktik dokter/bidan	Klinik/Praktik dokter bersama	Puskesmas/Pustu	UKBM/Praktik pengobatan tradisional/alternatif/lainnya
Malinau	17.45	-	16.52	NA	67.37	3.66
Bulungan	25.12	NA	6.07	7.83	61.81	NA
Tana Tidung	21.59	-	21.89	NA	50.75	NA
Nunukan	7.23	NA	25.73	19.34	48.20	NA
Tarakan	31.82	8.52	12.26	14.14	32.32	NA
Kalimantan Utara	20.49	3.39	16.39	13.41	48.26	NA

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara



Tabel 29. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat Jalan berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Tempat Berobat	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
Rumah Sakit Pemerintah	NA	NA	20,49
Rumah Sakit Swasta	NA	NA	3,39
Praktik dokter/bidan	NA	NA	16,39
Klinik/Praktik dokter bersama	NA	NA	13,41
Puskesmas/Pustu	NA	NA	48,26
UKBM	NA	NA	1,71

Tabel disamping menunjukkan indikator statistik yang menggambarkan proporsi penduduk yang telah menjalani pengobatan rawat jalan dalam kurun waktu tertentu, diklasifikasikan berdasarkan jenis fasilitas atau tempat layanan kesehatan

yang mereka pilih. Pada Tahun 2024 menunjukkan bahwa Penduduk Provinsi Kalimantan Utara lebih banyak memilih Puskesmas/Pustu sebagai tempat layanan kesehatan berobat jalan.

Tabel 30 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Jenis Kelamin	2021	2022	2023	2024
Laki – Laki	2,73	2,77	3,14	3,51
Perempuan	4,96	5,06	5,47	5,28
Laki – Laki + Perempuan	3,79	3,86	4,26	4,36

Tabel disamping menunjukkan indikator statistik yang menggambarkan proporsi penduduk yang pernah menjalani perawatan di fasilitas kesehatan dengan menginap selama minimal satu malam dalam jangka waktu satu tahun terakhir, dibandingkan dengan total populasi penduduk. Pada Tahun 2021 - 2024 menunjukkan bahwa Penduduk Provinsi Kalimantan Utara khususnya perempuan lebih banyak menerima layanan kesehatan dengan cara menginap di fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan medis.

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Tabel 31 Persentase Penduduk yang Rawat Inap menurut Tempat Rawat Inap, 2024 menurut Kab/Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Kabupaten /Kota	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktik bidan	Klinik/Praktik dokter bersama	Puskesmas	Praktik Pengobatan Tradisional/Alternatif/Lainnya
Malinau	83.88	NA	NA	-	3.02	-
Bulungan	84.37	NA	-	-	13.53	-
Tana Tidung	98.83	NA	-	-	0.75	-
Nunukan	76.93	7.51	NA	NA	13.03	-
Tarakan	70.60	23.74	NA	NA	2	-
Kalimantan Utara	77.83	12.7	NA	NA	7.28	-

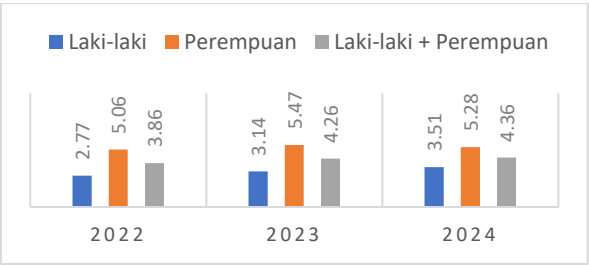
Dari Tabel disamping dapat diketahui bahwa RS pemerintah masih menjadi pilihan utama masyarakat ketika melakukan rawat inap sebesar 77,83 persen. Kemudian di RS Swasta sebesar 12,7 persen dan yang terendah di puskesmas sebesar 7,28 persen.

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara



Profil kesehatan penduduk di Kalimantan Utara juga dapat dilihat dari persentase penduduk menurut tempat rawat inap setahun terakhir pada tahun 2024. Selain berobat jalan perawatan inap juga merupakan upaya yang ditempuh untuk memperoleh kesembuhan dari sakit. Pada tahun 2024 persentase penduduk yang pernah rawat inap dalam satu tahun terakhir, tercatat sebesar 4,36 persen, dengan rincian penduduk perempuan yang pernah rawat inap lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki sebesar 5,28 persen, sedangkan penduduk laki-laki sebesar 3,51 persen yang pernah rawat inap selama tahun 2024.

Gambar 14 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir di Provinsi Kalimantan Utara 2024

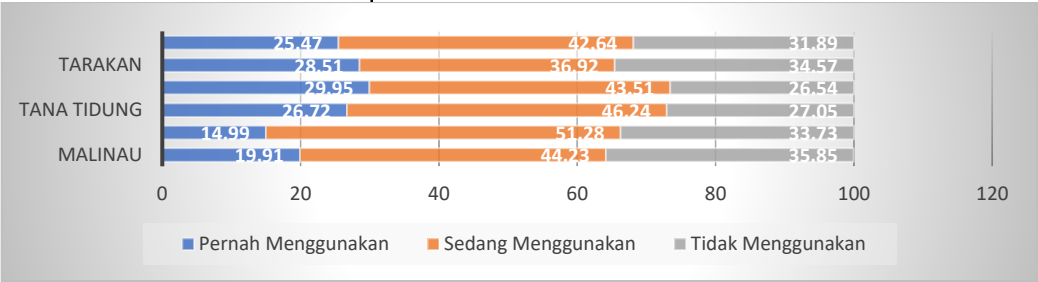


Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

4.2.5 KELUARGA BERENCANA

Keluarga berencana merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memastikan terwujudnya keluarga yang sehat dan berkualitas. Di Indonesia, salah satu badan negara yang secara khusus melaksanakan pembangunan keluarga berencana adalah Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Melalui program keluarga berencana, kesehatan ibu dan bayi dapat dipantau secara lebih baik, pengasuhan dan pendidikan anak lebih berkualitas, menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan yang beresiko, kehamilan yang tidak diinginkan, serta mencegah terjadinya penyakit menular seksual. Dengan keluarga berencana, diharapkan dapat mendorong risiko angka kematian pada ibu dan bayi. Penggunaan alat kontrasepsi yang tepat dan aman merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam keluarga berencana. Alat kontrasepsi ini dapat menjadi salah satu upaya dalam mengatur kehamilan yang direncanakan dengan matang dan pencegahan terhadap risiko penyakit menular seksual.

Gambar 15 Persentase Perempuan Yang Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Dan Partisipasi KB Di Provinsi Kalimantan Utara 2024



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara



Pada tahun 2024 menunjukkan banyaknya perempuan berumur 15-49 tahun dan berstatus kawin menurut status pemakaian alat/cara KB dan daerah tempat tinggal. Perempuan yang pernah menggunakan KB sebesar 25,47 persen, sedang menggunakan KB 42,64 persen dan tidak menggunakan 31,89 persen.

Tabel 32 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Menurut Alat/Cara KB Yang Digunakan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Alat/Cara KB Yang Digunakan	Persentase
Sterilisasi /tubektomi/MOW	3,28
Sterilisasi pria/vasektomi/MOP	-
IUD/AKDR/spiral	10,22
Suntikan	44,28
Susuk KB/implant	13,6
Pil	24,61
Kondom pria/karet KB	2,2
Intravag/kondom wanita/diafragma	NA
Metode menyusui alami	-
Pantang berkala/kalender	0,84
Lainnya	NA

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Menurut alat/cara KB yang digunakan oleh paling banyak berupa suntikan yaitu sebesar 44,28 persen, kemudian pil sebesar 24,61 persen, IUD/AKDR/Spiral sebesar 10,22 persen, susuk KB/implant sebesar 13,6 persen. Sedangkan untuk alat/cara KB terendah yaitu sterilisasi pria/vasektomi/MOP sebesar 0 persen dan metode menyusui alami sebesar 0 persen.

4.3 PROFIL PEREMPUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG PENDIDIKAN

4.3.1 ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) MENURUT JENJANG PENDIDIKAN SD, SLTP DAN SLTA

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu tanpa memandang usia penduduk tersebut dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan tersebut.

Pada tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara APK untuk jenjang Pendidikan SD/MI sebesar 101,52 mengalami kenaikan dari dua tahun sebelumnya, yaitu 100,70 di Tahun 2023. APK untuk jenjang Pendidikan SMP/MTS sebesar 97,60 sedangkan APK untuk jenjang SMA/SMK/MA sebesar 97,78.

Tabel 33 Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024

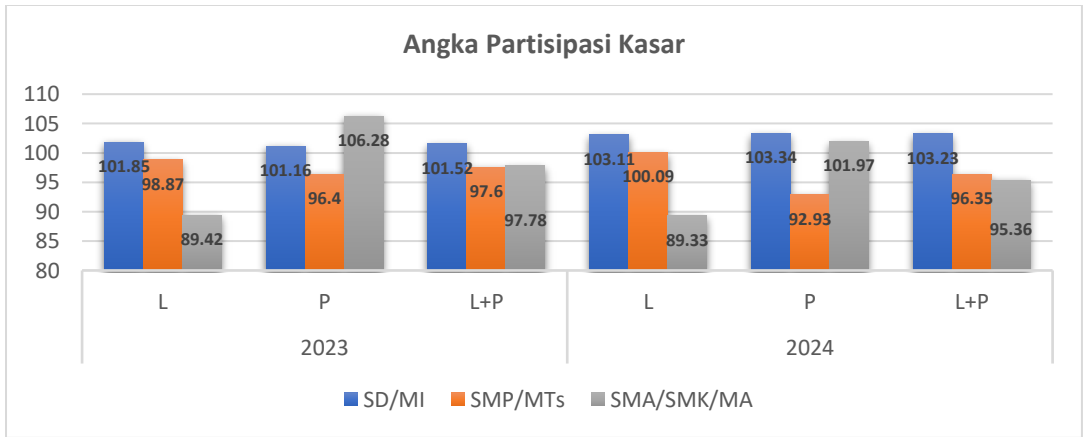
Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	2023			2024		
	L	P	L+P	L	P	L+P
SD/MI	101,85	101,16	101,52	103,11	103,34	103,23
SMP/MTs	98,87	96,40	97,60	100,09	92,93	96,35
SMA/SMK/MA	89,42	106,28	97,78	89,33	101,97	95,36

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

terdapat beberapa murid pada jenjang Pendidikan SD/MI yang lagi dengan jenjang pendidikannya.

Pada tahun 2024 terjadi kenaikan APK pada siswa laki-laki jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs yang tertinggi terdapat pada jenjang SD/MI yaitu sebesar 103,11 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa

Gambar 16 Angka Partisipasi Kasar (APK) Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 - 2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

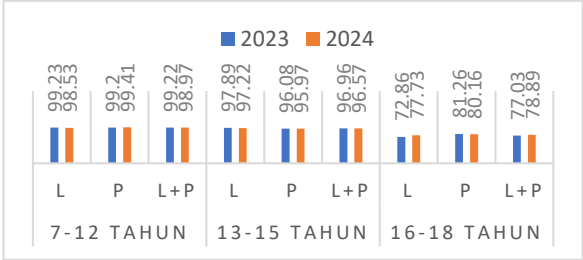


4.3.2 ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) PENDUDUK BERUMUR 5-18 TAHUN

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Pada tahun 2023 APS perempuan di Provinsi Kalimantan Utara tertinggi pada kelompok umur 7 – 12 tahun sebesar 99,20.

APS Formal penduduk perempuan di Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2024 lebih tinggi dari penduduk laki-laki pada kelompok umur 16-18 tahun, sedangkan pada kelompok umur 13-15 dan 7-12 tahun, dimana APS Formal penduduk perempuan lebih besar dibanding penduduk laki-laki.

Gambar 17 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal di Provinsi Kalimantan Utara



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Tabel 34 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Gender	7 - 12 Th	13 - 15 Th	16 - 18 Th
Laki-laki	98,53	97,22	77,73
Perempuan	99,41	95,97	80,16
Laki-Laki dan Perempuan	98,97	96,57	78,89

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Pada tahun 2024 Angka partisipasi Sekolah (APS) penduduk perempuan di Provinsi Kalimantan Utara pada kelompok umur 7-12 tahun atau setingkat SD tertinggi sebesar 99,41, selanjutnya pada kelompok umur 13-15 tahun atau setingkat SMP, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk

perempuan sebesar 95,97, lebih rendah jika dibandingkan Angka partisipasi Sekolah (APS) penduduk laki-laki yaitu sebesar 97,22.

4.3.3 ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) MENURUT JENJANG PENDIDIKAN SD, SMP DAN SMA

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Jenjang pendidikan yang dimaksud adalah jenjang SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/SMK/MA/ sederajat.

• APM SD/MI/SEDERAJAT

Jumlah murid umur 7-12 tahun yang bersekolah di tingkat SD/MI/ sederajat dibagi jumlah penduduk umur 7-12 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%)

• **APM SMP/MTs/SEDERAJAT**

Jumlah murid umur 13-15 tahun yang bersekolah di tingkat SMP/MTs/ sederajat dibagi jumlah penduduk umur 13-15 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

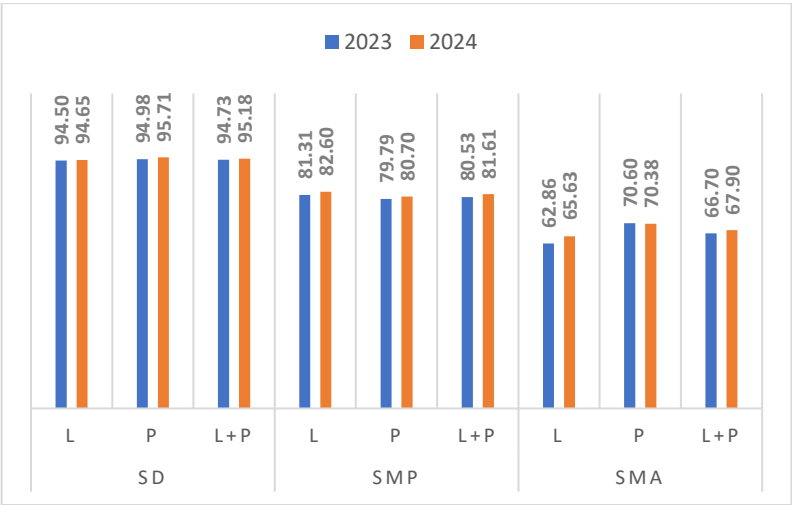
• **APM SMA/MA/SEDERAJAT**

Jumlah murid umur 16-18 tahun yang bersekolah di tingkat SMA/MA/ sederajat dibagi jumlah penduduk umur 16-18 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Kegunaan : Melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Interpetasi : Angka melek huruf berkisar antara 0-100. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.

Gambar 18 Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 dan 2024



APM Formal perempuan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 tertinggi pada jenjang Pendidikan SD/Sederajat pada angka 95,71 persen, sedangkan terendah pada jenjang Pendidikan

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

SMA/Sederajat yaitu sebesar 70,38 persen. Hal tersebut menggambarkan bahwa hanya 70,38 persen perempuan usia sekolah SMA/Sederajat yang menempuh Pendidikan SMA/Sederajat.

Tabel 35 Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

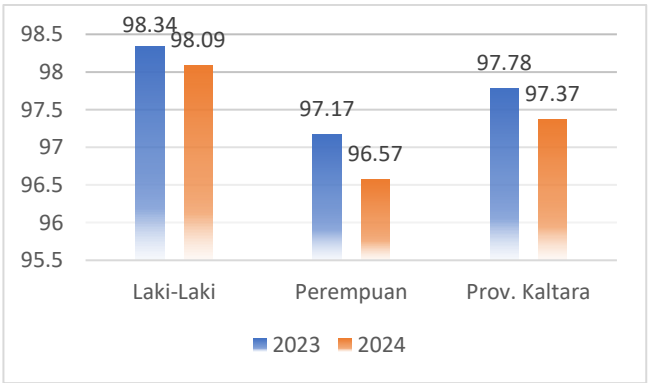
APM	Jenis Kelamin	2023	2024
SD	L	94,50	94,65
	P	94,98	95,71
	L+P	94,73	95,18
SMP	L	81,31	82,60
	P	79,79	80,70
	L+P	80,53	81,61
SMA	L	62,86	65,63
	P	70,60	70,38
	L+P	66,70	67,90

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

4.3.4 ANGKA MELEK AKSARA PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KE ATAS

Pada tahun 2024 persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek aksara sudah mencapai 97,37 persen, dengan capaian penduduk perempuan usia 15 Tahun ke atas yang melek aksara sebesar 96,57 persen masih lebih rendah dibanding capaian penduduk laki-laki usia 15 Tahun ke atas yang melek huruf sebesar 98,09 persen.

Gambar 19 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

4.3.5 PENDUDUK PEREMPUAN MENURUT JENIS PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN

Penduduk menurut jenis pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki.

- Kegunaan



Mengetahui tingkat kualitas pendidikan penduduk dengan menggunakan jenjang pendidikan tertentu sebagai batasan minimalnya - Sebagai bahan analisi pasar kerja.

- Interpretasi
Nilai angka tamat berkisar antara 0-100. Semakin tinggi ijazah/STTB yang dimiliki oleh sebagian besar penduduk suatu wilayah maka mencerminkan semakin tinggi taraf intelektualitas masyarakat di wilayah tersebut.

Tabel 36 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas Menurut Kab/Kota dan Status Bersekolah Tahun 2024

Kab/Kota	Status pendidikan						Total
	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih sekolah di SD/ sederajat	Masih sekolah di SMP/ sederajat	Masih sekolah di SMA/ sederajat	Masih sekolah di Perguruan Tinggi	Tidak Bersekolah Lagi	
Malinau	7.11	12.85	5.91	5.24	1.69	67.20	100.00
Bulungan	6.09	12.83	5.40	5.16	1.93	68.59	100.00
Tana Tidung	7.99	14.21	5.59	4.03	1.39	66.79	100.00
Nunukan	5.59	11.85	6.35	5.00	1.33	69.88	100.00
Tarakan	5.10	11.08	5.04	6.74	3.97	68.06	100.00
Prov. Kaltara	5.79	11.97	5.62	5.65	2.45	68.52	100.00

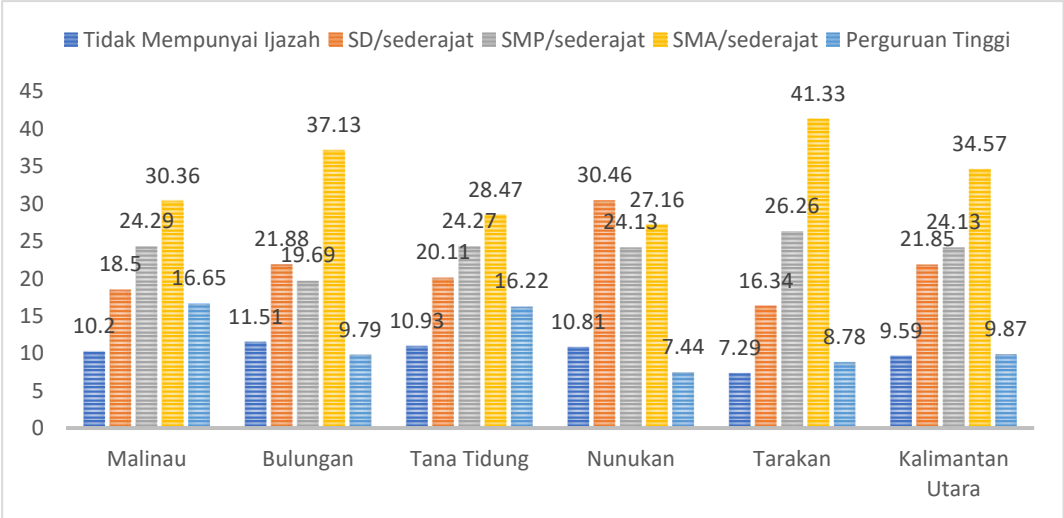
Pada tahun 2024 penduduk usia 5 tahun ke atas di Kalimantan Utara bisa dikatakan sebagian besar masih sekolah pada tingkat Pendidikan SD/ Sederajat sebesar 11,97 persen secara

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

keseluruhan dan yang tertinggi sebesar 14,21 persen berada di Kabupaten Tana Tidung, kemudian diikuti pada tingkat Tidak/Belum pernah sekolah sebesar 5,79 persen secara keseluruhan dan yang tertinggi berada di Kabupaten Tana Tidung sebesar 7,99 persen.

Pada tahun 2023 penduduk perempuan berumur 15 tahun keatas berdasarkan ijazah/STTB tertinggi yang tamatkan pada tingkat SMA/Sederajat Provinsi Kalimantan Utara sebesar 29,10 persen. Dimana ijazah/STTB tertinggi yang tamatkan pada tingkat SMA/Sederajat berada di Kota Tarakan dengan jumlah 36,06 persen, kemudian Kab. Malinau sebesar 25,64 persen, Kab. Tana Tidung sebesar 24,69 persen dan terendah Kab. Bulungan sebesar 25,67 persen.

Gambar 20 Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, Dan Ijazah/STTB Tertinggi Yang Dimiliki Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

4.3.6 RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

- Kegunaan
RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.
- Interpretasi
Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Tabel 37 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2022-2024

Kab/ Kota	2022		2023		2024	
	L	P	L	P	L	P
Malinau	9,57	8,89	9,63	8,9	9,85	9,04
Bulungan	9,77	8,82	9,78	8,83	9,79	8,95
Tana Tidung	9,42	8,5	9,63	8,51	9,8	8,72
Nunukan	8,6	8,18	8,62	8,2	8,63	8,33
Tarakan	10,64	9,99	10,65	10,29	10,66	10,3
Kalimantan Utara	9,77	9,09	9,78	9,17	9,79	9,21

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

RLS Perempuan Kalimantan Utara pada tahun 2024 sebesar 9,21 tahun. Hal ini berarti secara rata-rata penduduk perempuan Provinsi Kalimantan Utara yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9 tahun lebih dan tertinggi pada kota Tarakan yaitu sebesar 10,3 tahun.

4.4 PROFIL PEREMPUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG EKONOMI DAN KETENAGA KERJAAN

4.4.1 KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

Peran UMKM di Indonesia sangat signifikan bagi perekonomian terutama dalam menciptakan lapangan kerja serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan. UMKM di negara berkembang termasuk di Indonesia umumnya memiliki karakteristik dengan jumlah yang sangat banyak, tersebar di seluruh daerah dan menyerap tenaga kerja atau padat karya. Hingga saat ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat menopang perekonomian Indonesia.

Pemerintah telah mencanangkan upaya peningkatan akses sumber pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Skema pelaksanaan KUR berdasarkan Permenko 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR sebagaimana diubah dalam Permenko Perekonomian No 15 Tahun 2020 menjadi supermikro (plafon 0-10 jt) , mikro (plafon > 10-50 jt) dan kecil (plafon > 100-500).

Berdasarkan data tabel dibawah, perempuan penerima KUR Provinsi Kalimantan Utara terbanyak pada skema KUR Mikro yang diberikan oleh Bank BUMN sebanyak 5.270 orang. Dimana Jumlah penerima KUR tertinggi di Kota Tarakan sebanyak 1.663 orang dengan skema mikro pada Bank BUMN. Secara total di wilayah Kalimantan Utara perempuan penerima skema KUR terbanyak pada Bank BUMN.

Tabel 38 Jumlah Perempuan Penerima Kredit Usaha Rakyat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara 2024

Kab/Kota	Bank BUMN			BPD			Bank Swasta		
	Super mikro	Mikro	Kecil	Super mikro	Mikro	Kecil	Super mikro	Mikro	Kecil
Tarakan	342	1.380	193	-	46	27	-	-	4
Bulungan	81	873	100	3	62	35	-	-	-
Tana Tidung	19	104	3	-	28	12	-	-	-
Malinau	36	412	69	-	15	20	-	-	-
Nunukan	61	1.280	221	-	56	41	-	-	-
Kalimantan Utara	539	4.049	586	3	207	135	-	-	4

Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara

4.4.2 PEREMPUAN PELAKU USAHA PERIKANAN

Perempuan pelaku usaha perikanan di Provinsi Kalimantan Utara memainkan peran yang sangat penting dalam mengembangkan sektor perikanan, baik dalam usaha tangkap

maupun budidaya. Sebagai provinsi yang memiliki garis pantai panjang dan kekayaan sumber daya laut, Kaltara menawarkan potensi besar bagi para perempuan untuk terlibat dalam industri perikanan. Banyak perempuan yang terlibat dalam pengolahan hasil laut, seperti pembuatan ikan asin, terasi, hingga abon ikan, serta dalam budidaya ikan air tawar dan laut. Selain itu, mereka juga berperan dalam pemasaran dan distribusi produk perikanan, baik di pasar lokal maupun ekspor. Keterlibatan perempuan dalam sektor ini tidak hanya membantu meningkatkan ekonomi keluarga, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian daerah. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, perempuan di Kaltara juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses ke modal, pelatihan, serta dukungan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan melalui pelatihan, akses permodalan, dan penguatan jaringan usaha menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan peran mereka dalam industri perikanan dan mendorong keberlanjutan usaha yang mereka kelola.

Perempuan pelaku usaha perikanan di Kalimantan Utara memiliki potensi besar dalam meningkatkan ekonomi lokal. Dengan dukungan yang tepat dan akses terhadap sumber daya, mereka dapat berkontribusi lebih signifikan dalam sektor perikanan serta meningkatkan kesejahteraan komunitas mereka. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara peran perempuan pelaku usaha perikanan pada tahun 2024 sebanyak 6 orang sebagai penangkapan ikan, 279 orang sebagai Pembudidaya , 0 orang sebagai pengelolaan ruang laut, 19 orang sebagai pemasaran ikan, 256 orang sebagai pengolahan ikan dan 0 orang sebagai pengangkutan ikan.

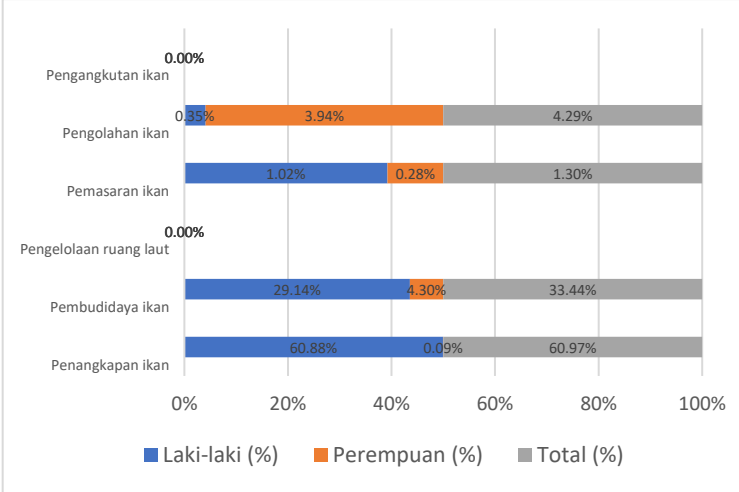
Tabel 39 Jumlah Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

No		Kab/kota		Profesi Utama												total	
				Penangkapan ikan		Pembudidaya ikan		Pengelolaan ruang laut		Pemasaran ikan		Pengolahan ikan		Pengangkutan ikan			
				L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Bulungan	1871	0	94	12	0	0	6	4	0	36	0	0	1971	52		
2	malinau	214	1	83	22	0	0	0	0	9	48	0	0	306	71		
3	Nunukan	577	1	885	151	0	0	31	2	2	38	0	0	1495	192		
4	Tana Tidung	219	0	77	14	0	0	7	9	1	33	0	0	304	56		
5	Tarakan	1071	4	752	80	0	0	22	3	11	101	0	0	1856	188		
6	Prov kaltara	3952	6	1891	279	0	0	66	18	23	256	0	0	5932	559		

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara



Gambar 21 Persentase Pelaku Usaha Perikanan Menurut Jenis Profesi dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara

se-Kalimantan Utara yaitu sebanyak 559 orang (34,35 persen) dari seluruh perempuan pelaku usaha perikanan se-Kalimantan Utara. Adapun kaum laki-laki lebih mendominasi terbanyak pada profesi nelayan dan pembudidaya ikan. Secara total peran perempuan pelaku usaha perikanan se-Kalimantan Utara baru sebesar 8,61 persen dibanding kaum laki-laki sebesar 91,39 persen.

4.4.3 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Peningkatan penawaran tenaga kerja perempuan apabila tidak diimbangi dengan peningkatan terhadap permintaan tenaga kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi perempuan dapat menyebabkan terjadinya pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Mereka yang dikategorikan sebagai pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha, atau mereka yang sudah diterima bekerja/memiliki usaha tetapi belum mulai bekerja/belum memulai usahanya, dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena sudah putus asa untuk mendapatkan pekerjaan.

Perempuan pelaku usaha perikanan paling banyak sebagai pembudidaya ikan dengan 3,94 persen yang masih rendah dibanding laki-laki dengan 4,29 persen dari seluruh pelaku usaha perikanan (laki-laki dan perempuan) di Kalimantan Utara. Dimana Kabupaten Nunukan merupakan wilayah dengan jumlah peran perempuan pelaku usaha



Pada tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Utara sebesar 3,90 persen, dimana TPT penduduk perempuan di Kalimantan Utara sebesar 3,70 persen. TPT Kalimantan Utara mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,01 persen di Tahun 2023. Namun untuk TPT penduduk perempuan meningkat menjadi 3,70 persen dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,64 persen di Tahun 2023. Sedangkan TPT penduduk laki-laki justru mengalami

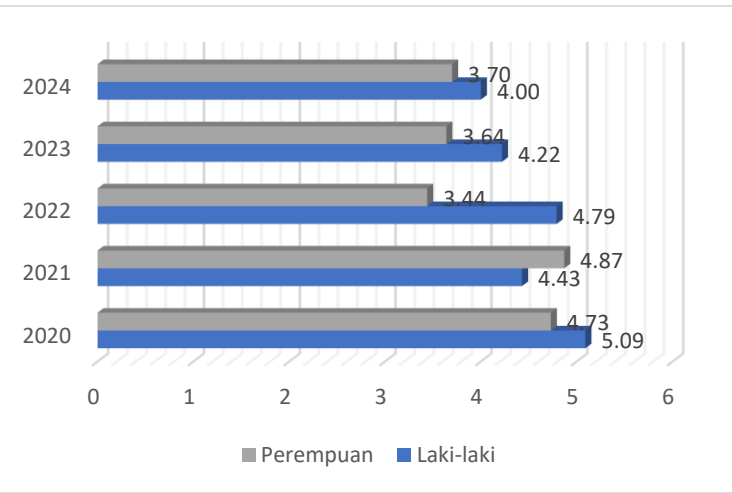
penurunan menjadi 4,00 persen dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,22 persen di Tahun 2023.

Tabel 40 TPT Penduduk Berdasarkan Kabupaten Kota Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 - 2024

Kabupaten/Kota	2022	2023	2024
Malinau	3,30	3,19	3,10
Bulungan	5,03	4,54	4,33
Tana Tidung	3,33	3,24	3,67
Nunukan	2,74	2,69	2,71
Tarakan	5,76	5,25	5,11
Kalimantan Utara	4,33	4,01	3,90

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Gambar 22 TPT Penduduk Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 - 2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan data tahun 2024 TPT penduduk tertinggi pada Kota Tarakan sebesar 5,11 persen dan terendah pada Kabupaten Nunukan yaitu sebesar 2,71 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terdapat penurunan TPT kecuali pada Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan.

Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Utara merupakan salah satu fokus penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah.

4.4.4 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)

Ukuran untuk menunjukkan keterlibatan perempuan dalam dunia ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) bagi perempuan. TPAK merupakan

proporsi penduduk yang termasuk angkatan kerja, yakni mereka yang bekerja dan menganggur terhadap penduduk usia kerja.

- **Kegunaan**
Mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah
- **Interpretasi**
Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tabel 41 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2022-2024

Kabupaten/Kota	2022	2023	2024
Malinau	73,55	74,26	73,23
Bulungan	64,24	71,86	71,89
Tana Tidung	74,49	75,88	74,01
Nunukan	69,10	71,93	75,53
Tarakan	65,49	66,14	63,64
Kalimantan Utara	67,62	70,35	70,35

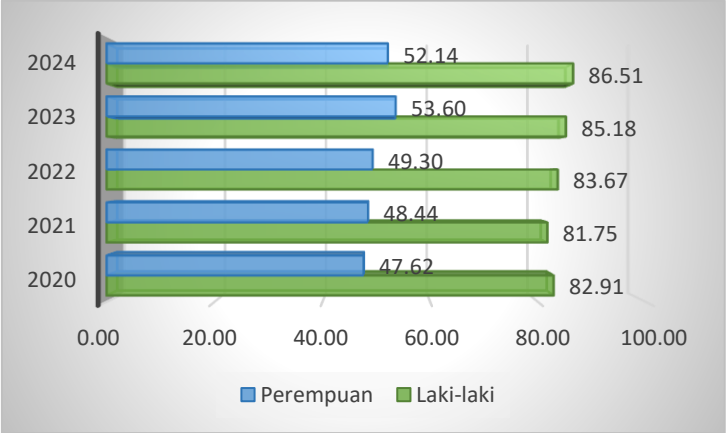
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan tabel dapat dilihat pada tahun 2024 TPAK penduduk tertinggi pada Kabupaten Nunukan sebesar 75,53 persen dan terendah pada Kota Tarakan yaitu sebesar 63,64 persen. Jika dibandingkan dengan penduduk laki-laki maka TAPK perempuan jauh di bawah penduduk laki-laki yaitu hanya sebesar 52,14 persen.

Tahun 2024 TPAK Provinsi Kalimantan Utara **Tidak Mengalami Kenaikan** tetap pada angka **70,35**. Sedangkan pada TPAK Perempuan **Mengalami Penurunan** Menjadi **52,14**.



Gambar 23 TPAK Penduduk Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provisi Kalimantan Utara



4.4.5 PEREMPUAN PEKERJA TENAGA MANAJER, PROFESIONAL, ADMINISTRASI DAN TEKNISI

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa trend perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi dan teknisi cenderung mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Dimana pada tahun 2022 sebesar 43,18 persen perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi dan teknisi mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 46,49 persen.

Jika dilihat dari tahun sebelumnya di 2023 maka dapat dilihat bahwa terjadi penurunan perempuan sebagai tenaga professional di Malinau menjadi 45,16 persen, Bulungan turun menjadi 44,07 persen, Tana Tidung turun menjadi 41,78, dan Nunukan turun sebesar 5,18 persen menjadi 43,94. Adapun Kota Tarakan justru mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2023, dengan laju kenaikan sebesar 6,03 persen.

Tabel 42 Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Menurut Kabupaten / Kota Tahun 2021-2024

Kab/Kota	2022	2023	2024
Malinau	33,57	45,63	45,16
Bulungan	43,79	46,16	44,07
Tana Tidung	43,66	50,45	41,78
Nunukan	37,91	49,12	43,94
Tarakan	48,38	45,92	51,95
Kalimantan Utara	43,18	46,97	46,49

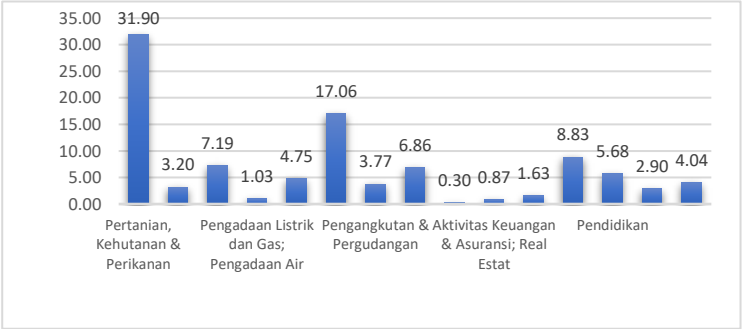
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

4.4.6 PEREMPUAN MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA

Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama biasanya dipakai sebagai salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja, di samping itu juga digunakan untuk mengetahui struktur perekonomian suatu daerah.

Pada tahun 2024 proporsi perempuan berdasarkan lapangan pekerjaan utama terbesar berada pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 31,90 persen, sedangkan yang terkecil pada sektor Komunikasi dan informasi sebesar 0,30 persen.

Gambar 24 Proporsi Penduduk Perempuan 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara



Tabel 43 Penduduk Perempuan 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	36,07	24,12
Pertambangan & Penggalian	4,58	0,65
Industri Pengolahan	6,93	7,66
Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air	1,39	0,37
Konstruksi	7,15	0,27
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi & Perawatan Mobil & Sepeda motor	13,33	24,01
Pengangkutan & Pergudangan	5,34	0,84
Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum	4,00	12,20
Informasi & Komunikasi	0,23	0,42
Aktivitas Keuangan & Asuransi; Real Estat	0,98	0,67
Jasa Profesional & Perusahaan	1,92	1,08
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	9,64	7,31
Pendidikan	3,52	9,69
Aktivitas Kesehatan Manusia & Aktivitas Sosial	1,72	5,10
R,S,T,U Jasa Lainnya	3,20	5,61
Total	100	100

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

4.4.7 PEREMPUAN MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA

Tabel 44 Penduduk Perempuan 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2024

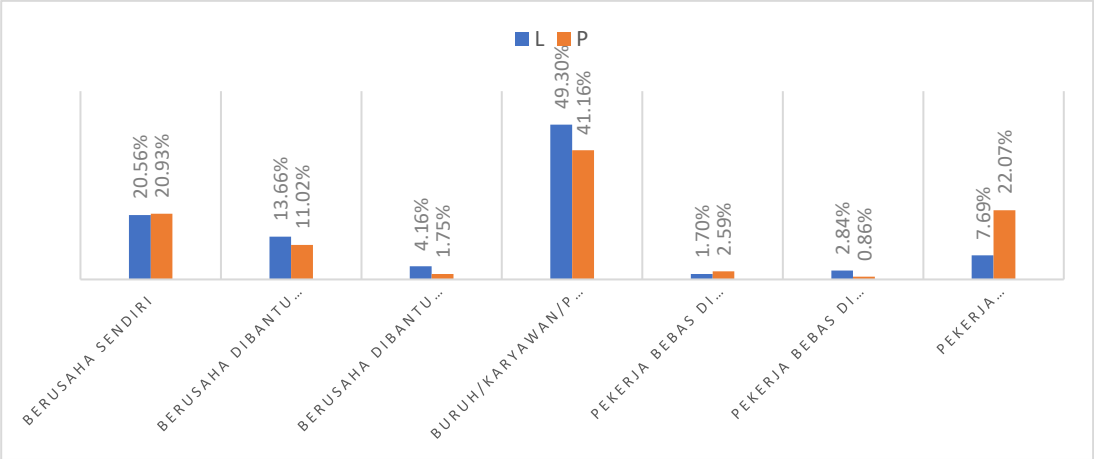
Status Pekerjaan Utama	2022	2023	2024
Berusaha sendiri	24.755	25.426	27.165
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	7.093	17.691	14.557
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	2.077	2.634	2.309
Buruh/karyawan/pegawai	50.754	50.729	54.378
Pekerja bebas di pertanian	7.262	6.303	3.416
Pekerja bebas di nonpertanian	273	1.928	1.136
Pekerja keluarga/tidak dibayar	29.395	28.989	29.166
Kalimantan Utara	121.609	133.700	132.127

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang kedudukan pekerja adalah status pekerjaan bagi penduduk yang bekerja. Status pekerjaan sebagai buruh/karyawan/pegawai merupakan bagian terbesar dari status pekerjaan

penduduk di Kalimantan Utara pada periode Agustus 2024 sebesar 46,30 persen dari total pekerja. Selain sebagai buruh/karyawan/pegawai, bagian yang besar lainnya adalah berstatus berusaha sendiri yang mencapai 20,80 persen, pekerja keluarga/tak dibayar sebesar 12,70 persen, berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar sebesar 12,70 persen, dan status pekerja dengan persentase terkecil adalah pekerja bebas di pertanian sebesar 2,00 persen.

Gambar 25 Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Persentase pekerjaan yang berstatus buruh/pegawai/karyawan mendominasi baik untuk laki-laki maupun perempuan pada tahun 2024. Kondisi pada tahun 2024 baik laki-laki maupun perempuan cenderung bekerja sebagai buruh/karyawan, masing-masing sebesar 41,16 persen dan 49,30 persen. Status pekerjaan lain yang cukup mendominasi adalah berusahasendiri, berdasarkan jenis kelamin proporsi untuk laki-laki dan perempuan relatif sama yaitu sekitar 20,56 persen dibandingkan dengan perempuan dengan status pekerjaan yang sama yaitu sekitar 20,93 persen. Namun sebaliknya, untuk status pekerjaan pekerja keluarga/tidak dibayar yang secara ekonomi tidak mendapatkan imbalan jasa, perempuan lebih mendominasi, yakni sekitar 22,07 persen dan untuk laki-laki sekitar 7,69 persen. Status pekerja keluarga/tidak dibayar kemungkinan besar tidak memiliki kondisi pekerjaan yang layak, jaminan sosial yang memadai atau mempunyai suara dalam serikat pekerja.

4.5 PROFIL PEREMPUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

4.5.1 PARTISIPASI DI LEMBAGA LEGISLATIF

Berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen perempuan dalam lembaga legislatif memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik. Adapun berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Utara, keterlibatan perempuan di Provinsi Kalimantan Utara dalam Lembaga legislatif dalam tiga



tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2022 dan 2023 persentase perempuan yang duduk di Lembaga legislatif sebesar 11,43 persen lalu turun menjadi 8,57 persen pada tahun 2023, kemudia naik menjadi 17,14 persen di tahun 2024

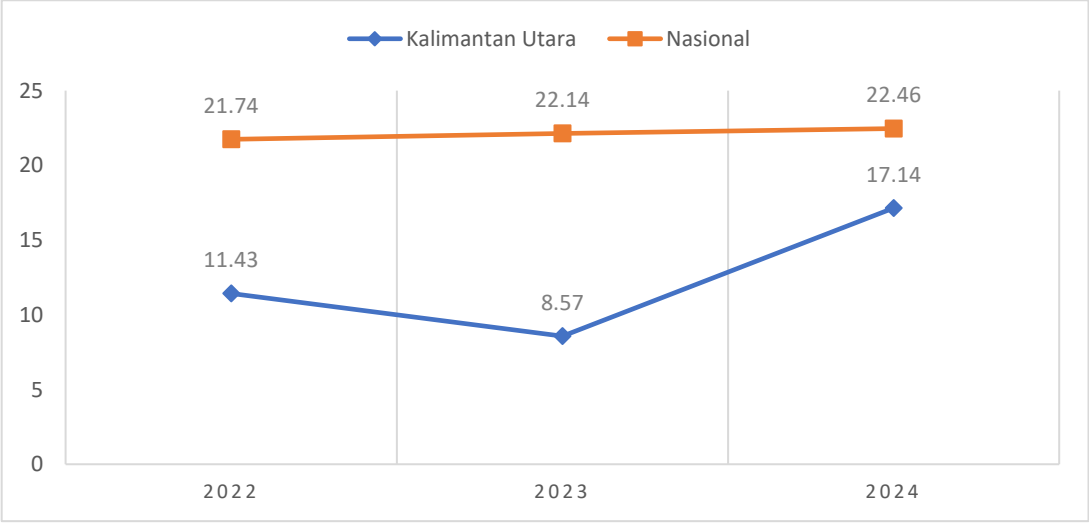
Tabel 45 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kab/Kota Tahun 2022-2024

Kabupaten/Kota	2022	2023	2024
Malinau	20	20	25
Bulungan	20	20	8
Tana Tidung	15	15	15
Nunukan	32	32	23,33
Tarakan	10	10	20
Kalimantan Utara	11,43	8,57	17,14
Nasional	21,74	22,14	22,46

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten Malinau menjadi kabupaten dengan persentase keterlibatan perempuan tertinggi yaitu sebesar 25 persen, dimana lebih tinggi dari angka nasional yang hanya sebesar 22,46 persen. Dampak positif yang mungkin terjadi akibat tingginya persentase legislatif perempuan, seperti peningkatan perhatian terhadap isu-isu perempuan dan keluarga, atau kebijakan yang lebih inklusif di kabupaten Malinau.

Gambar 26 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Tahun 2022-2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

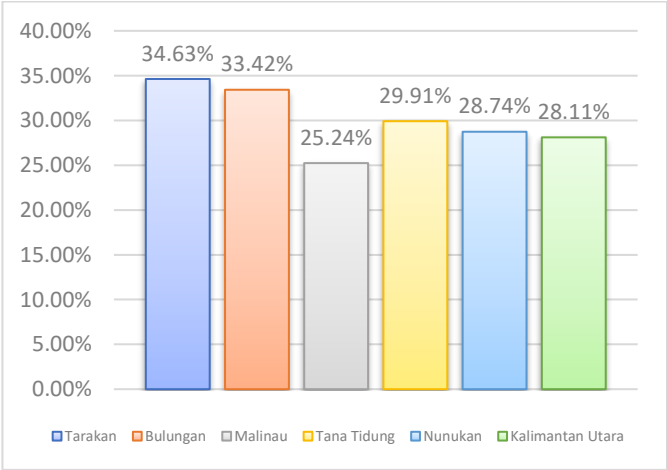
4.5.2 PARTISIPASI DI LEMBAGA EKSEKUTIF

Partisipasi perempuan di lembaga eksekutif merujuk pada keterlibatan perempuan dalam posisi dan jabatan di tingkat pemerintahan yang menjalankan fungsi eksekutif. Capaian PNS perempuan yang menduduki jabatan struktural di Kalimantan Utara mencerminkan kemajuan dalam pemberdayaan perempuan di sektor publik. Dengan terus meningkatnya representasi perempuan di posisi kepemimpinan, diharapkan akan tercipta

lingkungan pemerintahan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan.

Kabupaten Malinau menjadi kabupaten dengan persentase keterlibatan perempuan tertinggi yaitu sebesar 25 persen, dimana lebih tinggi dari angka nasional yang hanya sebesar 22,46 persen. Dampak positif yang mungkin terjadi akibat tingginya persentase legislatif perempuan, seperti peningkatan perhatian terhadap isu-isu perempuan

Gambar 27 Persentase Perempuan Di Lembaga Eksekutif Menurut Pemda Tahun 2024



Sumber: DKISP Provinsi Kalimantan Utara

Tabel 46 Jumlah Keterlibatan Perempuan Di Lembaga Eksekutif Menurut Pemda Tahun 2024

Jabatan	Bulungan		Tana Tidung		Nunukan		Tarakan		Malinau		Kalimantan Utara	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Eselon 2	24	5	20	2	28	3	29	3	27	3	172	23
Eselon 3	102	35	74	23	136	41	84	30	117	40	708	209
Eselon 4	121	84	70	45	208	106	140	101	173	64	1015	509
Total	247	124	164	70	372	150	253	134	317	107	1895	741

Sumber: DKISP Provinsi Kalimantan Utara

Keterlibatan perempuan di Lembaga eksekutif terutama yang menduduki jabatan struktural di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara jauh lebih kecil dibandingkan laki-laki. Dimana pada tahun 2024 persentase PNS perempuan yang menduduki jabatan distruktural tertinggi pada Kota Tarakan sebesar 34,63% persen dan terendah pada Kabupaten Tana Tidung sebesar 25,24% persen.

4.5.3 PENGURUS DAN ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL DAN POLITIK

4.5.3.1 PENGURUS HARIAN / KADER PARPOL

Undang-undang nomor 31 tahun 2002 tentang Partai politik pada pasal 13 atast 3 menyebutkan bahwa kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Pengurus atau kader harian partai politik perempuan memegang peran strategis dalam memperjuangkan kepentingan perempuan dan mendorong partisipasi mereka dalam politik. Dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban, mereka dapat berkontribusi signifikan terhadap kesetaraan gender dan keberlanjutan partai politik dalam jangka panjang. Melalui pendidikan, advokasi, dan pengorganisasian, mereka berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keberadaan perempuan dalam arena politik.

Tabel 47 Jumlah Pengurus Harian/Kader Partai Politik Berdasarkan Jenis Kelamin dan Wilayah Tahun 2024

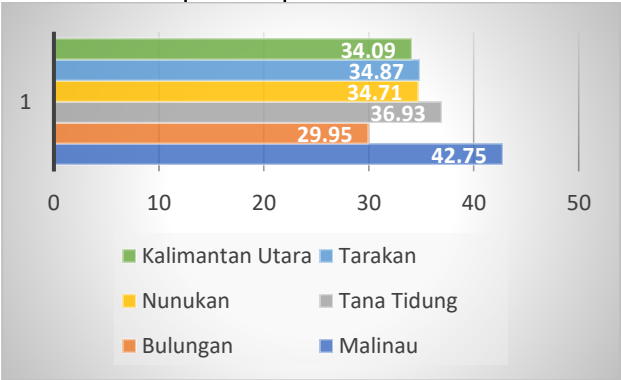
Wilayah	Jumlah Anggota		Total	% Anggota Pengurus /kader Parpol Perempuan
	Laki-laki	Perempuan		
Malinau	241	180	421	42,75
Bulungan	318	136	454	29,95
Tana Tidung	222	130	352	36,93
Nunukan	222	118	340	34,71
Tarakan	198	106	304	34,87
Kalimantan Utara	346	179	525	34,09

Sumber: Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Utara & KPU Kab/Kota

Berdasarkan data tahun 2024 anggota pengurus harian parpol di DPW Kalimantan Utara sebanyak 525 orang. Dimana pengurus harian parpol perempuan sebesar 34,09 persen (179 orang). Sedangkan persentase anggota pengurus harian partai politik terendah berada di DPC Kab. Bulungan yaitu sebesar 29,95 persen (136 orang).

Secara keseluruhan hampir semua persentase anggota pengurus / kader parpol perempuan diatas 30 persen, terkecuali di Kabupaten Bulungan sebesar 35,5 persen. Kab Malinau memiliki persentase anggota pengurus / kader parpol perempuan tertinggi sebesar 42,75 persen.

Gambar 28 Persentase Anggota Pengurus / Kader Parpol Perempuan Tahun 2024



Sumber: Badan Kesbangpol Provinsi Kaltara & KPU Kab/Kota

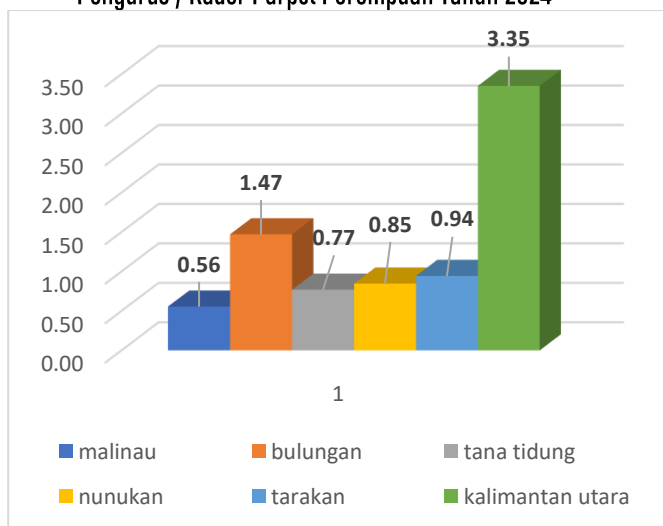


4.5.3.2 JUMLAH PENGURUS HARIAN/KADER TERPILIH MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF

Anggota legislatif perempuan di Kalimantan Utara memainkan peran vital dalam memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak di tingkat provinsi. Dengan latar belakang yang beragam, mereka membawa perspektif yang unik dalam proses pembuatan kebijakan, terutama dalam isu-isu seperti perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti stereotip gender dan keterbatasan akses sumber daya, anggota legislatif perempuan tetap aktif dalam mendorong kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam politik. Melalui berbagai program dan inisiatif, mereka berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan serta berkontribusi pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Utara. Upaya mereka tidak hanya mendukung keterwakilan perempuan, tetapi juga memperkuat demokrasi dan menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi semua warga.

Berdasarkan data tahun 2024 persentase anggota legislatif perempuan terhadap jumlah anggota pengurus harian parpol terbanyak di DPRD Provinsi Kalimantan Utara yaitu sebesar 3,35 persen. Artinya dari jumlah 179 orang pengurus harian parpol perempuan Provinsi Kalimantan Utara yang kemudian terpilih dan duduk di anggota legislatif sebesar 3,35 persen (6 orang).

Gambar 29 Persentase Anggota Legislatif Terhadap Jumlah Pengurus / Kader Parpol Perempuan Tahun 2024



Sumber: Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Utara

4.6 PROFIL PEREMPUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG HUKUM DAN HAM

4.6.1 PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN MENURUT UMUR: ANAK (0<18 TAHUN), DEWASA (25 TAHUN KE ATAS)

Dari tahun 2023 hingga tahun 2024 tren jumlah korban kekerasan perempuan dan kekerasan anak mengalami kenaikan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Kekerasan Perempuan jumlah 139 orang dan kekerasan anak jumlah 212 orang. Pada tahun 2024

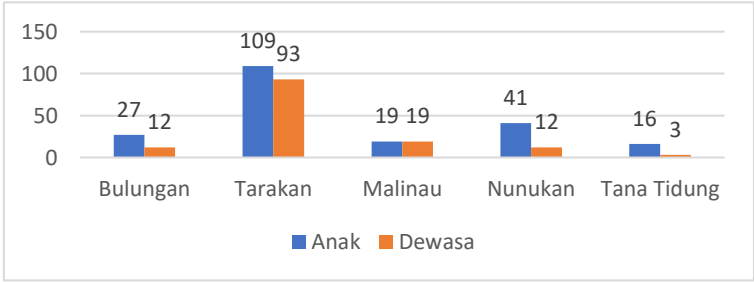
jumlah korban kekerasan perempuan tertinggi di Kota Tarakan dengan jumlah korban sebanyak 93 orang, sedangkan kekerasan anak tertinggi juga berada di Kota Tarakan dengan korban sebanyak 109 orang.

Tabel 48 Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Umur di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024

Kab/Kota	2023				2024			
	Anak		Dewasa		Anak		Dewasa	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Bulungan	3	29	0	12	10	17	0	12
Tarakan	33	60	0	99	18	91	0	93
Malinau	4	5	0	23	1	18	0	19
Nunukan	1	6	0	3	3	38	0	12
Tana Tidung	2	6	0	9	5	11	0	3
Jumlah	43	108	0	146	37	213	0	139

Sumber: UPTD PPPA Provinsi Kalimantan Utara

Gambar 30 Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Usia Menurut Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024



Sumber: UPTD PPA Provinsi Kalimantan Utara

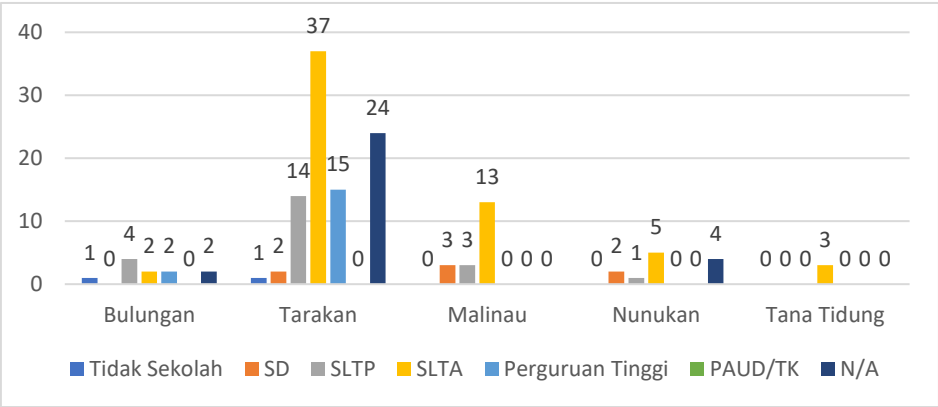
4.6.2 PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

Tabel 49 Jumlah Korban Kekerasan Perempuan Berdasarkan Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Kab/Kota	Tidak Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Perguruan Tinggi	PAUD/TK	N/A	Jumlah
Bulungan	1	0	4	3	2	0	2	12
Tarakan	1	2	14	37	15	0	24	93
Malinau	0	3	3	13	0	0	0	19
Nunukan	0	2	1	5	0	0	4	12
Tana Tidung	0	0	0	3	0	0	0	3
Total	2	7	22	61	17	0	30	139

Sumber: UPTD PPPA Provinsi Kalimantan Utara

Gambar 31 Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Pendidikan Menurut Kab/kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024



Sumber: UPTD PPPA Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan Grafik diatas pada tahun 2024 angka korban kekerasan perempuan tertinggi di Kota Tarakan dengan jumlah korban 139 orang pada pendidikan SLTA 63 orang dan 24 orang pada N/A. Berdasarkan data 139 korban kekerasan perempuan

4.6.3 PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN MENURUT STATUS PEKERJAAN

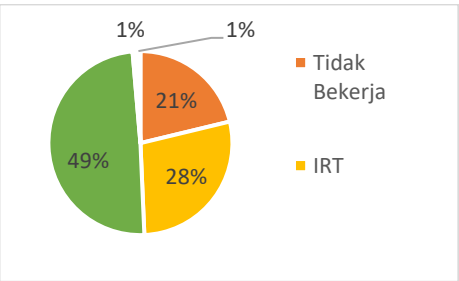
Tabel 50 Jumlah Korban Kekerasan Perempuan Berdasarkan Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Kab/Kota	Tidak Bekerja	IRT	Swasta / Buruh	PNS/ TNI /Polri	Pedagang / Tani / Nelayan	Jumlah
Bulungan	17	10	0	1	0	2
Tarakan	55	48	12	9	2	1
Malinau	6	11	1	0	0	0
Nunukan	17	8	5	0	1	2
Tana Tidung	8	0	2	0	0	0
Kalimantan Utara	103	77	20	10	3	5

Sumber: UPTD PPPA Provinsi Kalimantan Utara

Gambar 32 Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Berdasarkan Tabel pada tahun 2024 jumlah korban kekerasan di Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh korban dengan latar belakang Tidak Ada Pekerjaan sebesar 48 persen (103 orang) dari jumlah korban kekerasan perempuan. Dimana sebanyak 77 orang perempuan yang mengalami kekerasan sebagai Ibu Rumah Tangga diantaranya berada di Kota Tarakan.



Sumber: UPTD PPPA Provinsi Kalimantan Utara



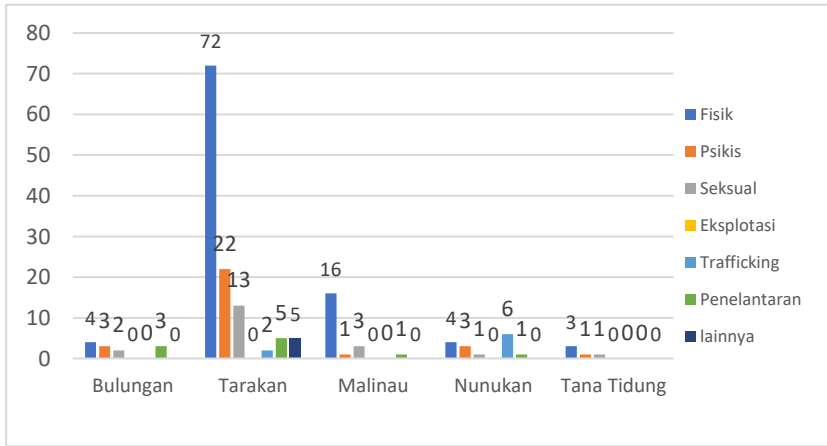
4.6.4 PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN MENURUT BENTUK KEKERASAN

Tabel 51 Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Bentuk Kekerasan Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Kab/Kota	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplotasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya	Jumlah
Bulungan	4	3	2	0	0	3	0	12
Tarakan	72	22	13	0	2	9	5	119
Malinau	16	1	3	0	0	1	0	21
Nunukan	4	3	1	0	6	1	0	15
Tana Tidung	3	1	1	0	0	0	0	5
Kalimantan Utara	99	30	20	0	8	10	5	172

Sumber: UPTD PPPA Provinsi Kalimantan Utara

Gambar 33 Jumlah Korban Kekerasan Menurut Bentuk Kekerasan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024



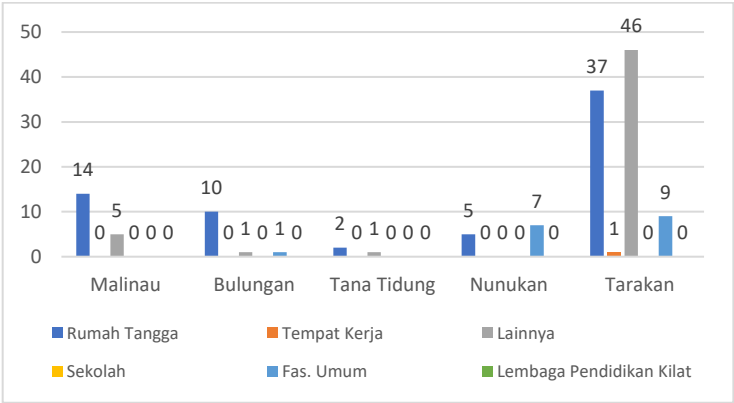
Pada tahun 2024 angka kekerasan fisik menjadi yang tertinggi dengan jumlah total 99 korban, urutan kedua yaitu kekerasan psikis dengan jumlah total 30 korban dan urutan ketiga kekerasan Seksual dengan jumlah total 20 korban.

Sumber: UPTD PPPA Provinsi Kalimantan Utara

Dimana secara umum kasus kekerasan terhadap perempuan tertinggi di Tarakan yang disajikan melalui diagram batang dibawah ini.

4.6.5 PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN MENURUT TEMPAT KEJADIAN

Gambar 34 Jumlah Korban Kekerasan Menurut Tempat Kejadian di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024



Pada tahun 2024 angka kekerasan Rumah Tangga menjadi yang tertinggi dengan jumlah total 68 korban, urutan kedua yaitu ditempat lain jumlah total 53 korban dan urutan ketiga Fasilitas Umum dengan jumlah total 17 korban.

Sumber: UPTD PPPA Provinsi Kalimantan Utara

Tabel 52 Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Tempat Kejadian di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Kab/Kota	Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya	Sekolah	Fas Umum	Lembaga Pendidikan Kilat	Jumlah
Bulungan	10	0	1	0	1	0	12
Tarakan	37	1	46	0	9	0	93
Malinau	14	0	5	0	0	0	19
Nunukan	5	0	0	0	7	0	12
Tana Tidung	2	0	1	0	0	0	3
Kalimantan Utara	68	1	53	0	17	0	139

Sumber: UPTD PPPA Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan data lokasi kejadian di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024, tercatat sebanyak 139 kasus yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota. Kasus tertinggi terjadi di Kota Tarakan dengan jumlah 93 kasus. Jika dilihat lokasi kejadian, kasus paling dominan terjadi dilingkungan Rumah Tangga sebanyak 37 Kasus.

4.6.6 PEREMPUAN PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Tabel 53 Jumlah Perempuan Penghuni Lapas di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 - 2024

Kab/Kota	Tidak Sekolah	PAUD/TK	SD	SLTP	SLTA	Perguruan Tinggi	Jumlah
Tarakan	1	8	23	24	26	4	86
Nunukan	7	17	14	20	23	5	86
Total	8	25	37	44	49	9	172
Kab/Kota							
Status		Jenis Kelamin		Tarakan		Nunukan	
				2023	2024	2023	2024
Penghuni Lapas		Perempuan		31	43	86	84
Jumlah				31	43	86	84

Sumber : Lapas Kelas IIA Tarakan dan Nunukan Kalimantan Utara

Tabel 54 Jumlah Perempuan Penghuni Lapas Berdasarkan Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Kab/Kota	Tidak Bekerja	Tuna Karya	IRT	Swasta / Buruh	PNS/ TNI /Polri	Pedagang / Tani / Nelayan	Lain - Lain	Jumlah
Tarakan	11	0	49	10	2	14	0	86
Nunukan	20	0	48	0	0	0	18	86
Kalimantan Utara	34	0	97	10	2	14	18	172

Sumber : Lapas Kelas IIA Tarakan dan Nunukan Kalimantan Utara



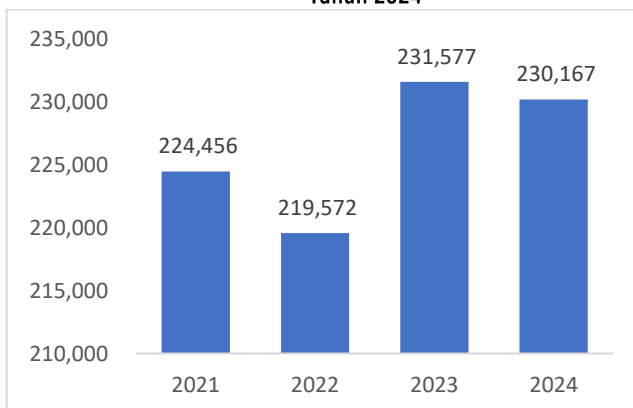
PROFIL ANAK PROVINSI KALIMANTAN UTARA

5.1 PROFIL ANAK PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG SOSIAL

5.1.1 PENDUDUK USIA ANAK

Penduduk usia anak di Kalimantan Utara memiliki peran yang signifikan dalam demografi provinsi ini, dengan jumlah yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi. Anak-anak di Kaltara, yang mencakup usia 0 hingga 16 tahun, menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Meskipun ada kemajuan dalam pembangunan infrastruktur dan program pemerintah, masih terdapat kesenjangan dalam penyediaan fasilitas pendidikan yang berkualitas, terutama di daerah terpencil. Selain itu, isu gizi dan kesehatan anak menjadi perhatian utama, mengingat pentingnya pertumbuhan fisik dan mental yang optimal. Dengan potensi besar yang dimiliki anak-anak ini, penting bagi semua pihak pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, sehingga anak-anak di Kalimantan Utara dapat tumbuh dengan baik dan berkontribusi positif bagi masa depan daerah mereka.

Gambar 35 Jumlah Penduduk Anak 0-16 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024



Sumber : Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara

Jumlah anak usia 0–16 tahun cenderung fluktuatif namun relatif stabil. Rentang jumlah berada di kisaran 219 ribu – 231 ribu jiwa. Terjadi penurunan dari 2021 ke 2022 (-4.884 jiwa). Kemudian lonjakan tajam pada 2023 (+12.005 jiwa dari 2022). Tahun 2024 relatif stabil dengan sedikit penurunan - 1.410 jiwa dari 2023).

5.1.2 STATUS PERKAWINAN ANAK

Perkawinan anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun serta belum memiliki kematangan fisik, fisiologis, dan psikologis untuk mempertanggungjawabkan pernikahan dan anak hasil pernikahan tersebut, serta sah menurut agama dan negara. Perkawinan usia anak di Kalimantan Utara masih menjadi isu yang memprihatinkan, meskipun telah ada upaya untuk menanggulangnya. Di beberapa komunitas, tradisi dan norma sosial sering kali mendorong anak-anak, terutama perempuan, untuk menikah di usia muda. Faktor-faktor seperti kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, dan tekanan dari lingkungan sekitar berkontribusi pada fenomena ini. Anak-anak yang dinikahkan biasanya terpaksa meninggalkan pendidikan formal, sehingga menghambat perkembangan mereka di masa depan. Selain itu, perkawinan usia anak meningkatkan risiko kesehatan, termasuk komplikasi saat hamil dan melahirkan, yang dapat membahayakan nyawa mereka. Berbagai organisasi dan pemerintah setempat telah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perkawinan usia anak, namun tantangan budaya dan ekonomi masih memerlukan perhatian serius untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan.

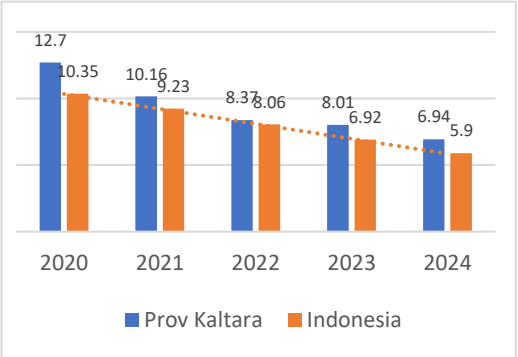
Secara total jumlah anak berstatus kawin berjumlah 409 anak, dimana jumlah anak perempuan berstatus kawin jauh lebih tinggi yaitu sebanyak 325 dibandingkan anak laki-laki berstatus kawin yaitu 84 anak. Kabupaten Nunukan menjadi daerah dengan anak berstatus kawin terbanyak dengan jumlah 159 anak, sedangkan Kabupaten Tana Tidung menjadi yang terendah dengan jumlah 6 anak.

Tabel 55 Jumlah Penduduk Anak Bestatus Kawin Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Berstatus Kawin		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
Malinau	2	41	43
Bulungan	9	45	54
Tana Tidung	2	10	12
Nunukan	9	111	120
Tarakan	6	39	45
Kalimantan Utara	28	246	274

Sumber : Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara

Gambar 36 Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara



5.1.3 HAK SIPIL KEPEMILIKAN AKTE KELAHIRAN ANAK

Akte kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir. Akte kelahiran digunakan untuk mengukur banyaknya anak yang memiliki akte kelahiran sebelum melewati masa umur yang dianggap sebagai anak dan dapat memasuki dunia kerja maupun usia pernikahan. Kepemilikan akte tersebut menjadi salah satu identitas diri dan akan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) serta diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk mengakses layanan dan jaminan sosial serta pelayanan masyarakat.

Tabel 56 Jumlah Penduduk Memiliki Akte Kelahiran dan KIA Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2024

Kabupate/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Memiliki Akte (Jiwa)	Memiliki KIA (Jiwa)
Malinau	88,931	28,983	19,357
Bulungan	173,688	54,864	38,182
Tana Tidung	30,315	10,303	9,448
Nunukan	235,283	72,497	42,875
Tarakan	258,011	82,104	49,540
Kalimantan Utara	786,228	248,751	159,402

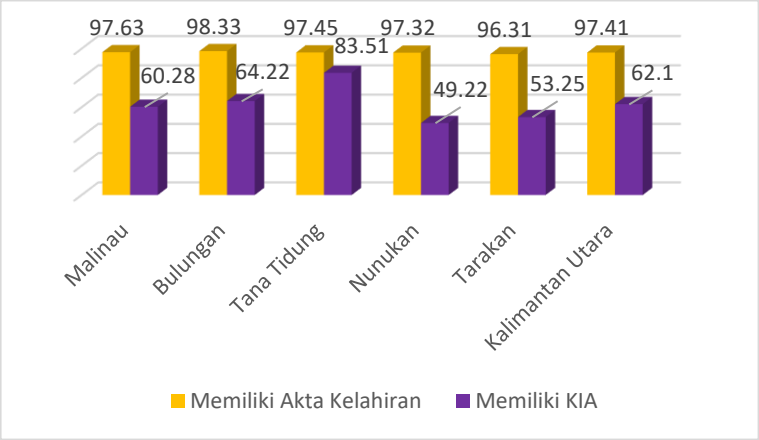
Secara total kepemilikan akte kelahiran Kalimantan Utara telah mencapai 97,41 persen atau sebanyak 234.548 orang. Dimana capaian kepemilikan akte kelahiran tertinggi berada di Kab. Malinau sebesar 97.63 persen dan capaian terendah di Kota Tarakan sebesar 96,31 persen. Sedangkan untuk

Sumber : Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara

kepemilikan KIA Kalimantan Utara telah mencapai 62,1 persen atau sebanyak 131.252 orang.

Anak tanpa dokumen identifikasi resmi akan ditolak mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Lebih jauh, anak dapat memasuki pernikahan atau dunia kerja, dipaksa masuk dalam militer sebelum usia legal yang ditentukan ketika tidak memiliki akte kelahiran.

Gambar 37 Jumlah Anak Berumur 0 - 17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akte Kelahiran dan KIA di Kalimantan Utara Tahun 2024



Sumber : Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara



Ketika sudah dewasa, akte kelahiran diperlukan untuk mendapat jaminan sosial atau pekerjaan di sektor formal, pembelian properti atau lahan, hak memilih dan mendapatkan paspor.

5.1.4 ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya.

Kondisi anak berkebutuhan khusus di Kalimantan Utara masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun ada upaya dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan, banyak anak dengan kebutuhan khusus yang belum mendapatkan perhatian yang memadai. Infrastruktur pendidikan yang inklusif masih terbatas, sehingga banyak anak kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

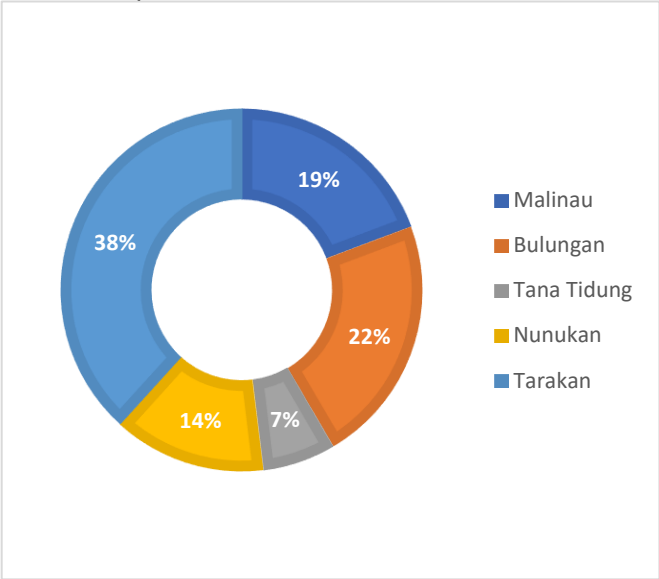
Selain itu, stigma sosial dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebutuhan anak berkebutuhan khusus seringkali menghambat integrasi mereka dalam lingkungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan ramah bagi anak-anak

Tabel 57 Data Peserta Didik Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024				
Kabupaten/Kota	Peserta Didik	Tenaga pendidik	Rasio Pendidik : Peserta Didik	Satuan Pendidikan Kebutuhan Khusus
Malinau	130	4	1 : 8	1
Bulungan	150	7	1 : 6	3
Tana Tidung	44	3	1 : 5	1
Nunukan	92	3	1 : 7	1
Tarakan	258	5	1 : 7	1
Kalimantan Utara	674	22	1 : 7	7

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud (npd.kemendikbud.go.id)



Gambar 38 Data Peserta Didik Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara 2024



Anak berkebutuhan khusus terbanyak dari Kota Tarakan sebanyak 258 anak atau 38 persen, kemudian dari Kab. Bulungan sebanyak 150 anak atau 22 persen, kemudian Kab. Malinau sebanyak 130 anak atau 19 persen. Secara total jumlah anak berkebutuhan khusus di Kalimantan Utara sebanyak 674 anak dengan jumlah total satuan pendidikan kebutuhan khusus sebanyak 7 lembaga.

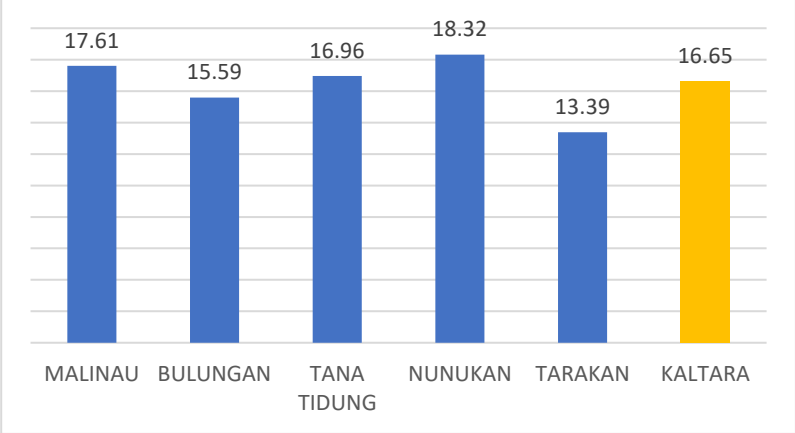
Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud (npd.kemendikbud.go.id)

5.2 PROFIL ANAK PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG KESEHATAN
5.2.1 ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) DAN ANGKA KEMATIAN BALITA (AKBA)

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Karakteristik usia secara jelas mendefinisikan perbedaan yang memisahkan antara anak dari orang dewasa. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Dari sudut pandang anak sebagai aset, anak merupakan salah satu modal sumber daya manusia, jika dipenuhi semua kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kebutuhan sosial ekonomi lainnya. Pemenuhan kebutuhan ini akan membentuk anak tumbuh menjadi manusia berkualitas. Sebaliknya jika kebutuhan anak tidak terpenuhi, dikhawatirkan akan menurunkan kualitas hidup anak atau sebagian dari mereka akan menimbulkan masalah bagi keluarga, masyarakat, maupun negara.

Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate*) Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang dilakukan untuk menekan dan menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB). Angka kematian bayi di Provinsi Kalimantan Utara. Angka kematian bayi menunjukkan jumlah bayi yang meninggal dunia dari setiap seribu bayi yang lahir hidup pada periode tahun tertentu.

Gambar 39 Angka Kematian Bayi Provinsi Kalimantan Utara Hasil Long Form SP2020



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Selama periode satu dekade bonus demografi Kalimantan Utara, Angka Kematian Bayi (AKB) hasil Long Form SP2020 tercatat 16,65 per 1000 kelahiran hidup. Peningkatan persentase bayi yang mendapat imunisasi lengkap serta

peningkatan rata-rata lama pemberian ASI menjadi saah satu yang mendorong bayi semakin mampu bertahan hidup. Angka kematian bayi di Kalimantan Utara tertinggi di Kabupaten Nunukan yaitu sebesar 18,32 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian bayi terendah di Kota Tarakan yaitu sebesar 13,93 per 1000 kelahiran hidup pada Long Form SP2020.

5.2.2 PERSENTASE ANAK USIA 0-59 BULAN DIIMUNISASI

Upaya untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian bayi serta anak balita dilaksanakan program imunisasi baik program rutin maupun program tambahan/suplemen untuk penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). PD3I adalah penyakit-penyakit yang sudah tersedia vaksinnya untuk upaya pencegahannya. Penyakit-penyakit tersebut merupakan target Program Pengembangan Imunisasi (PPI). Tujuan awal PPI adalah untuk memberikan vaksinasi seluruh bayi yang lahir secara lengkap sebelum mereka mencapai usia satu tahun.

Dari tabel tersebut pemberian imunisasi dasar terbesar di Kalimantan Utara pada BCG yaitu sebesar 94,14 persen. Kabupaten / kota yang mendapatkan imunisasi dasar terbanyak di Kota Tarakan sebesar 97,16 persen, menyusul Kabupaten Tana Tidung sebesar 96,93 persen dan Kabupaten Bulungan sebesar 96,10 persen. Sedangkan .

Tabel 58 Persentase Imunisasi Pada Anak Usia 0-59 Bulan Menurut Kab/kota Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

KAB/KOTA	BCG	DPT	POLIO	CAMPAK	HB
Malinau	95.18	92.8	96.04	73.09	94.95
Bulungan	96.1	92.3	96.1	81.7	97.01
Tana Tidung	96.93	93.86	96.79	78.55	94.37
Nunukan	88.38	86.31	87.34	72.06	88.7
Tarakan	97.16	90.4	94.86	80.85	89.02
Kalimantan Utara	94.14	89.98	93.1	77.32	91.28

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara



imunisasi terendah di Kalimantan Utara pada campak yaitu sebesar 77,32 persen. Kabupaten/kota dengan laporan imunisasi campak terendah di Kab. Nunukan yaitu sebesar 72,06 persen.

5.2.3 RATA-RATA LAMA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI

Cara pemberian makanan pada bayi yang baik dan benar adalah menyusui bayi secara eksklusif sejak lahir sampai dengan umur 6 bulan dan meneruskan menyusui anak sampai umur 24 bulan. Mulai umur 6 bulan, bayi mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya. ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi yang mengandung sel darah putih, protein dan zat kekebalan yang cocok untuk bayi. ASI membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal serta melindungi terhadap penyakit.

Persentase penduduk berumur 0-23 bulan yang pernah diberi ASI adalah indikator yang menunjukkan proporsi anak berusia kurang dari dua tahun (baduta) yang pernah menerima Air Susu Ibu (ASI) selama hidup mereka.

Secara provinsi, cakupan bayi yang pernah diberi ASI mencapai 97,15%.

Persentase yang tidak pernah diberi ASI hanya 4,51%. Ini menunjukkan praktik pemberian ASI di Kalimantan Utara sangat tinggi dan hampir merata. Kabupaten Bulungan dan Nunukan memiliki persentase tertinggi sebesar 100 persen telah menyusui dan memberikan ASI terhadap anak berumur 0-23 bulan, sedangkan Tana Tidung memiliki persentase terendah sebesar 92,23 persen.

Tabel 59 Persentase penduduk berumur 0-23 bulan yang Pernah diberi ASI menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024

Kab/kota	Apakah Pernah disusui/diberi ASI?		
	Ya	Tidak	Total
Malinau	95.80	4,26	100,00
Bulungan	100.00	1,64	100,00
Tana Tidung	92.23	8,69	100,00
Nunukan	100.00	5,80	100,00
Tarakan	94.97	4,50	100,00
Provinsi Kalimantan Utara	97.15	4,51	100,00

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Tabel 60 Rata-rata Lama Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Kab/kota	Rata-rata Lamanya Pemberian ASI
	Laki-laki + Perempuan
Malinau	10.89
Bulungan	9.48
Tana Tidung	9.35
Nunukan	9.52
Tarakan	10.26
Provinsi Kalimantan Utara	9.97

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

laki, untuk capaian terendah di Kabupaten Tana Tidung selama 9,35 bulan.

Dari data terlihat bahwa secara total rata-rata lama pemberian ASI eksklusif pada bayi laki-laki dan perempuan di Kalimantan Utara selama 9,97 bulan. Artinya tiap bayi laki-laki dan perempuan yang dilahirkan akan mendapatkan ASI eksklusif selama 10 bulan. Dimana bayi laki-laki rata-rata lama pemberian ASI eksklusif lebih tinggi dibanding bayi perempuan, dengan capaian tertinggi di Kabupaten Malinau yaitu selama 10,89 bulan untuk bayi laki-

5.3 PROFIL ANAK KALIMANTAN UTARA BIDANG PENDIDIKAN

5.3.1 PESERTA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) JALUR FORMAL DAN JALUR NON FORMAL / PENDIDIKAN PRASEKOLAH

Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. PAUD jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Bustanul Athfal (BA), atau bentuk lain yang sederajat. Sementara itu, PAUD jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

Tabel 61 Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Keikutsertaan Pendidikan prasekolah tahun 2024

Kabupaten/Kota	Keikutsertaan Pendidikan Pra Sekolah		
	Masih/Pernah Mengikuti Pra Sekolah TA 2022/2023	Pernah Mengikuti Pra Sekolah TA 2021/2022 dan Sebelum TA 2023/2024	Tidak/Belum Pernah Mengikuti Pra Sekolah
Malinau	27.97	7.61	64.42
Bulungan	16.56	12.79	70.65
Tana Tidung	34.06	10.35	55.59
Nunukan	16.62	8.31	75.07
Tarakan	15.39	2.06	82.56
Kalimantan Utara	18,50	6.84	74.66

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Tabel 62 Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun Yang Pernah/Masih Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pendidikan Pra Sekolah Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Laki-laki + Perempuan		
	Apa jenis pendidikan prasekolahnya?		
	Taman Kanak-kanak/Bustanul Athfal/Raudatul Athfal	Satuan PAUD sejenis/Kelompok Bermain/Taman Penitipan Anak	Total
MALINAU	49.82	50.18	100.00
BULUNGAN	44.50	55.50	100.00
TANA TIDUNG	38.88	61.12	100.00
NUNUKAN	37.14	62.86	100.00
TARAKAN	82.55	17.45	100.00
PROVINSI	52.07	47.93	100.00

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara



5.3.2 PESERTA PENDIDIKAN SD, SMP, SMA DAN SMK

Di Indonesia, program wajib belajar telah diperbaharui dari yang sebelumnya hanya 9 tahun menjadi 12 tahun. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun, merupakan program Pemerintah untuk menjawab kebutuhan dan tantangan jaman. Pemerintah berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan semua warga negara Indonesia yang berusia 7- 19 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP dan 3 tahun di SMA/SMK secara merata. Tidak relevan bila di jaman modern ini masih ada anak-anak Indonesia yang tidak bersekolah dan ada pula yang masih buta huruf. Oleh karena itu pemerintah berusaha meningkatkan kualitas manusia melalui jenjang pendidikan dasar.

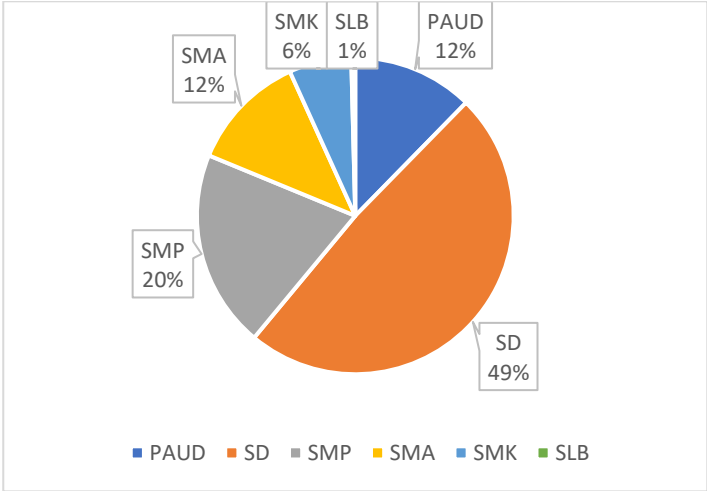
Secara Total peserta pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 165.754 siswa. Jenjang dengan jumlah peserta terbanyak adalah SD (80.728 siswa). Jenjang dengan jumlah paling sedikit adalah SLB (674 siswa).

Tabel 63 Jumlah Peserta Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pendidikan Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan						JUMLAH
	PAUD	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	
Malinau	3.462	10.113	4.564	3.114	875	130	22.258
Bulungan	5.321	18.993	7.564	3.930	2.866	150	38.824
Tana Tidung	1.353	3.487	1.458	997	54	44	7.393
Nunukan	5.821	22.557	9.284	5.808	2.227	92	45.789
Tarakan	4.484	25.578	10.607	6.024	4.539	258	51.490
Kalimantan Utara	20.441	80.728	33.477	19.873	10.561	674	165.754

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud (npd.kemendikbud.go.id)

Gambar 40 Jumlah Peserta Pendidikan Menurut Jenis Pendidikan 2024



Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud (npd.kemendikbud.go.id)

5.3.3 SISWA PUTUS SEKOLAH

Siswa putus sekolah merupakan kondisi anak yang tidak berkesempatan untuk menyelesaikan pendidikan hingga tidak memperoleh keterangan tamat belajar atau ijazah yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Dimana anak mengalami keterlantaran karena sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

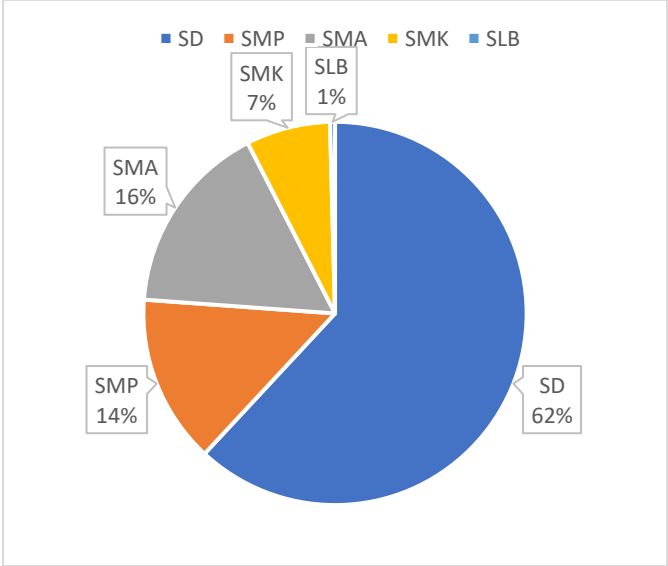
Tabel 64 Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Pendidikan Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan					Jumlah
	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	
Malinau	22	7	15	7	0	51
Bulungan	14	5	21	5	0	45
Tana Tidung	3	0	0	0	0	3
Nunukan	86	19	2	2	1	110
Tarakan	23	3	1	3	0	30
Kalimantan Utara	148	34	39	17	1	239

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud (npd.kemendikbud.go.id)

Siswa putus sekolah di Kalimantan Utara: 239 siswa. Jenjang dengan jumlah putus sekolah tertinggi adalah SD (148 siswa).Jenjang terendah adalah SLB (1 siswa).Distribusi per Jenjang PendidikanSD (148 siswa) mendominasi (± 62%) dari total kasus. Diikuti: SMA: 39 siswa SMP: 34 siswa SMK: 17 siswa. SLB sangat kecil (1 siswa) bisa karena jumlah peserta didik sedikit atau keterbatasan akses.

Gambar 41 Persentase Siswa Putus Sekolah Jenis Pendidikan Tahun 2024



Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud (npd.kemendikbud.go.id)

5.4 PROFIL ANAK PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG HUKUM DAN HAM

5.4.1 ANAK KORBAN KEKERASAN MENURUT UMUR (0-17 TAHUN)

Secara total jumlah korban kekerasan anak Kalimantan Utara tahun 2024 sebanyak 212 orang. Dimana total jumlah korban kekerasan anak perempuan lebih tinggi yaitu 175 orang dibanding korban anak laki-laki yaitu 37 orang. Kasus kekerasan anak tertinggi di Kota Tarakan dengan 109 orang.

Tren kasus kekerasan anak cenderung lebih tinggi pada anak diusia 13-17 tahun terutama anak perempuan, ini terlihat dari data dimana jumlah korban kekerasan anak perempuan di usia 13-17 sebanyak 118 orang dari total keseluruhan korban anak se- Kalimantan Utara sebanyak 212 orang.

Tabel 65 Jumlah Korban Kekerasan Anak Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Usia di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

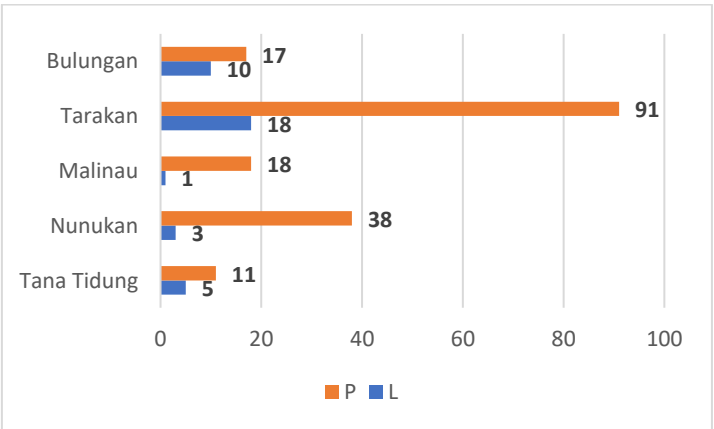
Kab/Kota	Kelompok Usia Anak						Total		
	0 - 5 Tahun		6 - 12 Tahun		13 - 17 Tahun		L	P	L=P
	L	P	L	P	L	P			
Bulungan	4	1	2	4	4	12	10	17	27
Tarakan	1	3	7	18	10	70	18	91	109
Malinau	0	2	1	1	0	15	1	18	19
Nunukan	0	2	0	19	3	17	3	38	41
Tana Tidung	0	0	1	7	4	4	5	11	16
TOTAL	5	8	11	49	21	118	37	175	212

Sumber : UPTD PPA Provinsi Kalimantan Utara

Jumlah kekerasan anak tertinggi berada di Kota Tarakan, dimana sepanjang tahun 2024 ada total 109 kasus kekerasan, dimana 91 kasus kekerasan terhadap anak perempuan

dan 18 kasus terhadap anak laki-Laki. Kabupaten Bulungan dengan total 27 kasus, dimana 17 kasus terhadap anak perempuan dan 10 kasus ter hadap anak laki-laki. Sedangkan untuk total kasus terendah yaitu Kabupaten Tana Tidung dengan total 16 kasus, dimana 11 kasus terhadap anak perempuan dan 5 kasus terhadap anak laki-laki.

Gambar 42 Jumlah Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024



Sumber : UPTD PPA Provinsi Kalimantan Utara



5.4.2 ANAK KORBAN KEKERASAN MENURUT STATUS PENDIDIKAN

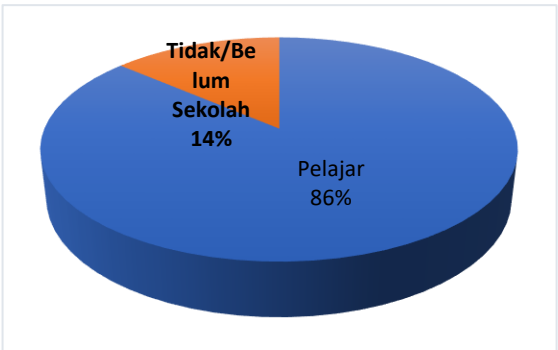
Berdasarkan data tahun 2024 jumlah kekerasan pada anak di Kalimantan Utara sebanyak 212 orang dimana sebanyak 183 orang atau 86 persen berstatus pelajar dan 29 orang atau 14 persen tidak/belum bersekolah. Kota Tarakan sebagai kota dengan pelajar sebagai korban kekerasan tertinggi yaitu 91 orang berstatus pelajar dari total 109 anak korban kekerasan di Kota Tarakan. Sedangkan Kabupaten Tana tidung sebagai kabupaten dengan korban kekerasan terendah yaitu 14 orang berstatus pelajar dari total 16 anak korban kekerasan di Kabupaten Tana Tidung.

Tabel 66 Jumlah Korban Kekerasan Anak Berdasarkan Status Pendidikan dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Kab/kota	Pelajar	Tidak/Belum Sekolah
Bulungan	24	3
Tarakan	91	18
Malinau	17	2
Nunukan	37	4
Tana Tidung	14	2
Kalimantan Utara	183	29

Sumber : UPTD PPA Provinsi Kalimantan Utara

Gambar 43 Persentase Korban Kekerasan Anak Berdasarkan Status Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024



5.4.3 ANAK KORBAN KEKERASAN MENURUT TEMPAT KEJADIAN

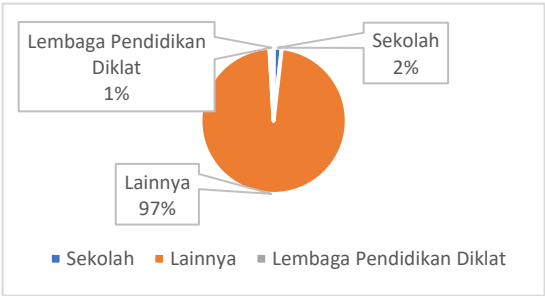
Berdasarkan data tahun 2023 tempat kejadian kekerasan pada anak di lokasi lainnya berjumlah 158 orang, di sekolah berjumlah 11 orang dan lembaga pendidikan kilat berjumlah 1 orang. Kejadian kekerasan anak sebanyak 158 orang di Lainnya membuktikan bahwa kekerasan pada anak dilakukan oleh teman dan Keluarga/Kerabat. Dimana Tarakan menempati urutan teratas kekerasan di sekolah dengan jumlah 103 orang, Bulungan 33 orang, Tana Tidung 13 orang, Nunukan 11 orang dan Malinau 10 orang.

Tabel 67 Jumlah Korban Kekerasan Anak Berdasarkan Tempat Kejadian dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Kab/kota	Sekolah	Lembaga Pendidikan Kilat	Lainnya
Bulungan	2	0	6
Tarakan	0	1	55
Malinau	0	0	14
Nunukan	0	0	24
Tana Tidung	2	0	9
Kalimantan Utara	2	1	108

Sumber : UPTD PPA Provinsi Kalimantan Utara

Gambar 44 Persentase Korban Kekerasan Anak Berdasarkan Tempat Kejadian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024



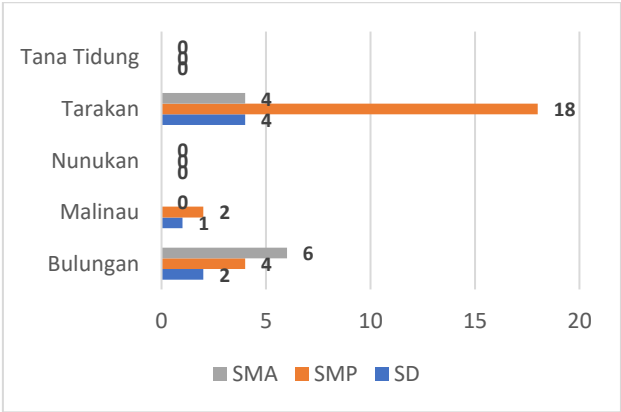
Sumber : UPTD PPA Provinsi Kalimantan Utara

Jika dikaitkan dengan total anak yang mengalami kekerasan, maka terdapat 144 orang diantaranya yang mengalami kekerasan berstatus pelajar dari total 155 orang anak korban kekerasan di Kalimantan Utara sepanjang tahun 2023. Dimana dari total 144 orang pelajar korban kekerasan diantaranya adalah korban kekerasan yang dilakukan di Tempat Lainya dengan pelaku teman dan Keluarga/Kerabat.

5.4.4 ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku berjumlah 43 orang, dimana 41 orang pelaku masih berstatus sebagai pelajar. Kota Tarakan dengan pelaku kekerasan berstatus pelajar terbanyak yaitu berjumlah 17 orang Sedangkan Kabupaten Bulungan dan Nunukan pelaku kekerasan berstatus pelajar berjumlah 8 orang.

Gambar 45 Jumlah Anak Sebagai Pelaku Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024



Sumber : Pengadilan Negeri se-Kalimantan Utara

Tabel 68 Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Status	Kab/Kota				
	Bulungan	Malinau	Nunukan	Tarakan	Tana Tidung
Pelaku Anak	12	3	-	26	0

Sumber : Pengadilan Negeri se-Kalimantan Utara

hukum tertinggi yaitu 91 orang, dengan 46 orang sebag pelaku. Kemudian Kota Tarakan yaitu 25 orang, dengan 8 orang sebagai korban dan 17 orang sebagai pelaku serta Bulungan yaitu 13 orang, dengan 5 orang sebagai korban dan 8 orang sebagai pelaku kekerasan.

Sepanjang 2024 anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 138 orang, dimana sebanyak 60 orang sebagai korban kekerasan dan sebanyak 78 orang sebagai pelaku kekerasan. Kabupaten Nunukan terlihat sebagai Kabupaten dengan anak yang berhadapan dengan

Tabel 69 Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Jenis Pidana di dan Pegadilan Negeri di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Jenis Pidana	PN Tanjung Selor		PN Malinau	PN Nunukan	PN Tarakan	Jumlah
	Bulungan	Tana Tidung				
Perdagangan Manusia	0	0	0	2	0	2
Pembunuhan	0	0	0	0	0	0
UU ITE	0	0	0	1	1	2

UU Kesehatan	0	0	0	0	0	0
Perampokan	0	0	0	0	0	0
Kekerasan Terhadap Anak	0	0	0	1	0	1
Persetubuhan Terhadap Anak	5	0	1	23	5	34
Pencabulan terhadap Anak	0	0	0	8	3	11
Narkotika	0	0	1	0	4	5
Kecelakaan Lantas	1	0	0	0	0	1
Pengeroyokan	0	4	0	1	0	4
Penganiayaan	0	0	0	0	1	1
Perusakan	0	0	0	0	0	0
Senjata Tajam	0	0	0	0	0	0
Ketertiban	0	0	0	0	0	0
Pencurian	4	0	3	6	0	13
Pengancaman	0	0	0	0	0	0
Perjudian	0	0	0	0	3	3
Pelanggaran	0	0	0	0	0	0
Membawa Lari Anak Perempuan	0	0	0	0	0	0
Lain-lain	0	0	0	0	0	0
Jumlah	10	4	5	42	17	78

Sumber : Pengadilan Negeri se-Kalimantan Utara

5.4.5 ANAK PENGHUNI LEMABAGA PEMASYARAKATAN

Anak-anak yang menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) seringkali menghadapi kenyataan hidup yang sangat sulit, jauh dari kebebasan dan kasih sayang keluarga. Mereka mungkin terjerat dalam masalah hukum sejak usia muda, baik karena faktor lingkungan, pengaruh teman sebaya, atau bahkan karena ketidakmampuan keluarga dalam memberikan pendidikan dan perhatian yang cukup.

Kehidupan di dalam Lapas memberi mereka tantangan besar dalam hal rehabilitasi sosial dan pembentukan karakter. Meskipun kondisi mereka sulit, program-program pendidikan dan keterampilan di dalam Lapas berperan penting untuk memberikan harapan akan masa depan yang lebih baik. Pendampingan psikologis dan perhatian dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk membantu mereka keluar dari jeratan masa lalu dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat dengan bekal yang lebih positif.

Jumlah anak penghuni lapas meningkat dari tahun 2023 ke 2024, dari total 0 orang (2023) menjadi 11 orang (2024). Seluruh anak penghuni lapas berstatus sebagai pelaku.

Tabel 70 Jumlah Anak Penghuni Lapas Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 - 2024

Status	Jenis Kelamin	Kab/Kota			
		Tarakan		Nunukan	
		2023	2024	2023	2024
Pelaku	Laki-laki	0	2	3	11
	Perempuan	0	0	0	0
Jumlah		0	2	3	11

Sumber : Lapas Kelas IIA Tarakan dan Nunukan Kalimantan Utara



DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	I
KATA SAMBUTAN	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	VI
DAFTAR GAMBAR	IX
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN	3
2.1 VISI.....	5
2.2 KONDISI GEOGRAFIS.....	6
2.3 KONDISI IKLIM	8
2.4 DEMOGRAFI.....	8
2.5 PENDUDUK	9
2.6 PERSEBARAN DAN KEPADATAN PENDUDUK.....	10
2.7 SOSIAL EKONOMI.....	11
2.7.1 KEMISKINAN	11
5.1.1 RATA – RATA PENGELUARAN PER KAPITA	12
5.1.2 PENDUDUK BERDASARKAN STATUS PEKERJAAN UTAMA.....	13
5.1.3 PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	14
3.1 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	16
3.2 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)	20
3.3 INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)	23
3.4 INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG).....	26
4.1 PROFIL PEREMPUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG SOSIAL	30
4.1.1 KONDISI KEMISKINAN EKSTREM DI PROVINSI KALTARA.....	31
4.1.2 ANALISIS DATA DEPRIVASI PEREMPUAN DI KALIMANTAN UTARA BERDASARKAN REGSOSEK	32



4.1.2.1 PENDIDIKAN.....	32
4.1.2.2 KESEHATAN.....	32
4.1.2.3 DISABILITAS	33
4.1.2.4 INFRASTRUKTUR DASAR	33
4.1.2.5 KETENAGAKERJAAN	33
4.2 PROFIL PEREMPUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG KESEHATAN	34
4.2.1 UMUR HARAPAN HIDUP (UHH) PEREMPUAN.....	34
4.2.2 PENDUDUK YANG MENGALAMI KELUHAN KESEHATAN DALAM SEBULAN TERAKHIR.....	35
4.2.3 ANGKA KESAKITAN	36
4.2.4 AKSES KESEHATAN MASYARAKAT.....	37
4.2.5 KELUARGA BERENCANA.....	40
4.3 PROFIL PEREMPUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG PENDIDIKAN	42
4.3.1 ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) MENURUT JENJANG PENDIDIKAN SD, SLTP DAN SLTA.....	42
4.3.2 ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) PENDUDUK BERUMUR 5-18 TAHUN	43
4.3.3 ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) MENURUT JENJANG PENDIDIKAN SD, SMP DAN SMA	43
4.3.4 ANGKA MELEK AKSARA PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KE ATAS.....	45
4.3.5 PENDUDUK PEREMPUAN MENURUT JENIS PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN.....	45
4.3.6 RATA-RATA LAMA SEKOLAH	47
4.4 PROFIL PEREMPUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG EKONOMI DAN KETENAGA KERJAAN.....	48
4.4.1 KREDIT USAHA RAKYAT (KUR).....	48
4.4.2 PEREMPUAN PELAKU USAHA PERIKANAN	48
4.4.3 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT).....	50
4.4.4 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)	51
4.4.5 PEREMPUAN PEKERJA TENAGA MANAJER, PROFESIONAL, ADMINISTRASI DAN TEKNIISI.....	53
4.4.6 PEREMPUAN MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA.....	53
4.4.7 PEREMPUAN MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA.....	54



4.5	PROFIL PEREMPUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN.....	55
4.5.1	PARTISIPASI DI LEMBAGA LEGISLATIF	55
4.5.2	PARTISIPASI DI LEMBAGA EKSEKUTIF	56
4.5.3	PENGURUS DAN ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL DAN POLITIK	58
4.6	PROFIL PEREMPUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG HUKUM DAN HAM	59
5.1	PROFIL ANAK PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG SOSIAL.....	64
5.1.1	PENDUDUK USIA ANAK.....	64
5.1.2	STATUS PERKAWINAN ANAK	65
5.1.3	HAK SIPIL KEPEMILIKAN AKTE KELAHIRAN ANAK.....	66
5.1.4	ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS	67
5.2	PROFIL ANAK PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG KESEHATAN.....	68
5.2.1	ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) DAN ANGKA KEMATIAN BALITA (AKBA)	68
5.2.2	PERSENTASE ANAK USIA 0-59 BULAN DIIMUNISASI	69
5.2.3	RATA-RATA LAMA PEMBERIAN ASI EKSklusif PADA BAYI	70
5.3	PROFIL ANAK KALIMANTAN UTARA BIDANG PENDIDIKAN	71
5.3.1	PESERTA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) JALUR FORMAL DAN JALUR NON FORMAL / PENDIDIKAN PRASEKOLAH	71
5.3.2	PESERTA PENDIDIKAN SD, SMP, SMA DAN SMK	72
5.3.3	SISWA PUTUS SEKOLAH	73
5.4	PROFIL ANAK PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG HUKUM DAN HAM	74
5.4.1	ANAK KORBAN KEKERASAN MENURUT UMUR (0-17 TAHUN)	74
5.4.2	ANAK KORBAN KEKERASAN MENURUT STATUS PENDIDIKAN	75
5.4.3	ANAK KORBAN KEKERASAN MENURUT TEMPAT KEJADIAN	75
5.4.4	ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM	76
5.4.5	ANAK PENGHUNI LEMABAGA PEMASYARAKATAN	77



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Wilayah Administrasi Pemerintahan Menurut Kecamatan, Desa/Kelurahan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	7
Tabel 2	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Kalimantan Utara Tahun 2023-2024	9
Tabel 3	Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan menurut Kabupaten/Kota Kalimantan Utara Tahun 2024	11
Tabel 4	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024	12
Tabel 5	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	15
Tabel 6	IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022-2024	17
Tabel 7	Umur Harapan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota 2022-2024	18
Tabel 8	Harapan Lama Sekolah Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2022-2024	18
Tabel 9	Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi dan Kabupaten/Kota 2022-2024	19
Tabel 10	Pengeluaran Perkapita Pertahun (Rp.000) Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2022-2024	19
Tabel 11	IPG Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022-2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 12	Umur Harapan Hidup Laki-laki & Perempuan Kab/Kota Tahun 2022-2024	21
Tabel 13	Harapan Lama Sekolah Laki-laki dan Perempuan Kab/Kota 2022-2024	22
Tabel 14	Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan Kab/Kota Tahun 2022-2024	22
Tabel 15	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Perempuan (Rp.000) Kab/Kota Tahun 2022-2024	23
Tabel 16	IDG Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2022-2024	24
Tabel 17	Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kab/Kota Tahun 2022-2024	25
Tabel 18	Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kab/Kota 2022-2024	25
Tabel 19	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	25
Tabel 20	IKG Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2022-2024	27
Tabel 21	Proporsi Perempuan Pernah Kawin 15-49 tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam 2 Tahun Terakhir Tidak di Fasilitas Kesehatan Menurut Kab/Kota, 2022-2024	27
Tabel 22	Proporsi Perempuan Pernah Kawin 15-49 tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Yang Pertama Kali Berumur Kurang dari 20 tahun Menurut Kab/Kota, 2022-2024	28
Tabel 23	Keterlibatan Perempuan di Legislatif Kab/Kota tahun 2022-2024 (persen)	28
Tabel 24	Persentase Penduduk Perempuan dengan Pendidikan Minimal SMA Menurut Kab/Kota 2022-2024	29



Tabel 25 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kab/Kota 2022-2024.....	29
Tabel 26 Data Deprivasi Perempuan Berdasarkan REGSOSEK.....	32
Tabel 27 Umur Harapan Hidup Kab/Kota Tahun 2022-2024	35
Tabel 28 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Kab/Kota dan Tempat Berobat Jalan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	38
Tabel 29 Persentase Penduduk yang berobat Jalan menurut Tempat berobat Jalan berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Utara 2024.....	39
Tabel 30 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	39
Tabel 31 Persentase Penduduk yang Rawat Inap menurut Tempat Rawat Inap 2024 menurut Kab/Kota Provinsi Kalimantan Utara	39
Tabel 32 Persentase Perempuan pernah Kawin berumur 15-49 tahun menurut Alat/Cara KB yang digunakan di Provinsi Kalimantan Utara 2024	41
Tabel 33 Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara 2023-2024	42
Tabel 34 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	43
Tabel 35 Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Kalimantan Utara 2024.....	45
Tabel 36 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke atas Menurut Kab/Kota dan Status Bersekolah Tahun 2024.....	46
Tabel 37 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2022-2023	47
Tabel 38 Jumlah Perempuan Penerima Kredit Usaha Rakyat menurut Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara 2024	48
Tabel 39 Jumlah Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan menurut Jenis Kelamin dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	49
Tabel 40 TPT Penduduk berdasarkan Kab/Kota di Kalimantan Utara 2022-2024.....	51
Tabel 41 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penduduk Usia 15 Tahun menurut Kab/Kota Tahun 2022-2024	52
Tabel 42 Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional menurut Kab/Kota Tahun 2021-2024	53
Tabel 43 Penduduk Perempuan 15 tahun ke Atas yang bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kalimantan Utara 2024	54
Tabel 44 Penduduk Perempuan 15 Tahun ke Atas yang bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kalimantan Utara Tahun 2022-2024.....	54
Tabel 45 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kab/Kota Tahun 2022-2024...	56
Tabel 47 Jumlah Keterlibatan Perempuan di Lembaga Eksekutif Pemda 2024	57
Tabel 48 Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Umur di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024	60
Tabel 49 Jumlah Korban Kekerasan Perempuan berdasarkan Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	60
Tabel 50 Jumlah Korban Kekerasan Perempuan berdasarkan Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	61



Tabel 51 Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Bentuk Kekerasan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 62

Tabel 52 Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Tempat Kejadian di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 63

Tabel 53 Jumlah Perempuan Penghuni LAPAS di Kalimantan Utara 2023-2024..... 63

Tabel 54 Jumlah Perempuan Penghuni LAPAS berdasarkan Pekerjaan di Kalimantan Utara Tahun 2024 63

Tabel 55 Jumlah Penduduk Anak berstatus Kawin menurut Jenis Kelamin dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024..... 65

Tabel 56 Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kelahiran dan KIA menurut Kab/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2024..... 66

Tabel 57 Data Peserta Didik Anak Berkebutuhan Khusus menurut Kab/Kota 2024 67

Tabel 58 Persentase Imunisasi pada Anak Usia 0-59 Bulan menurut Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024..... 69

Tabel 59 Persentase penduduk berumur 0-23 bulan yang pernah diberi ASI menurut Kab/Kota Tahun 2024..... 70

Tabel 60 Rata-rata Lama Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 70

Tabel 61 Persentase Penduduk berumur 0-6 Tahun menurut Kab/Kota dan Keikutsertaan Pendidikan prasekolah Tahun 2024 71

Tabel 62 Persentase Penduduk berumur 0-6 Tahun yang Pernah/Masih mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Kab/Kota dan Jenis Pendidikan Pra Sekolah Tahun 2024 71

Tabel 63 Jumlah Peserta Pendidikan menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pendidikan Tahun 2024 72

Tabel 64 Jumlah Siswa Putus Sekolah menurut Kab/Kota dan Jenis Pendidikan 2024 73

Tabel 65 Jumlah Korban Kekerasan Anak berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Usia di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 74

Tabel 66 Jumlah Korban Kekerasan Anak berdasarkan Status Pendidikan dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 75

Tabel 67 Jumlah Korban Kekerasan Anak berdasarkan Tempat Kejadian dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 75

Tabel 68 Jumlah Anak berhadapan dengan Hukum berdasarkan Jenis Kelamin dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 76

Tabel 69 Jumlah Anak berhadapan dengan Hukum berdasarkan Jenis Pidana di Pengadilan Negeri di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024..... 76

Tabel 70 Jumlah Anak Penghuni LAPAS berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024 77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Persentase penduduk berdasarkan jenis kelamin Provinsi Kalimantan utara Tahun 2024	9
Gambar 2	Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.....	10
Gambar 3	Persebaran Penduduk Kabupaten/Kota Kalimantan Utara Tahun 2024	10
Gambar 4	Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan Makanan Dan Bukan Makanan Kalimantan Utara Tahun 2024	13
Gambar 5	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita (Rupiah) Menurut Kab/Kota 2024	13
Gambar 6	Persentase Penduduk Usia 15 Keatas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama 2024	14
Gambar 7	Persentase Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kalimantan Utara Tahun 2024	14
Gambar 8	Angka Kemiskinan Kab/Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 – 2024	30
Gambar 9	Angka Kemiskinan Ekstrem Provinsi Kalimantan Utara 2021-2024.....	31
Gambar 10	Trend Umur Harapan Hidup Perepmuan Kab/Kota 2022-2024.....	35
Gambar 11	Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap	36
Gambar 12	Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin Kalimantan Utara 2022-2024.....	37
Gambar 13	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan terakhir di Provinsi Kalimantan Utara 2022-2024.....	38
Gambar 14	Persentase Penduduk yang pernah rawat Inap dalam setahun Terakhir di Provinsi Kalimantan Utara 2024.....	40
Gambar 15	Persentase Perempuan yang Pernah Kawin berumur 15-49 tahun menurut Kab/Kota dan Partisipasi KB di Kalimantan Utara 2024	40
Gambar 16	Angka Partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Kalimantan Utara 2023-2024	42
Gambar 17	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal di Kalimantan Utara 2024.....	43
Gambar 18	Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk di Kalimantan Utara 2023-2024...	44
Gambar 19	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf di Kalimantan Utara 2024	45
Gambar 20	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, Dan Ijazah/STTB Tertinggi Yang Dimiliki Tahun 2024	47
Gambar 21	Persentase Pelaku Usaha Perikanan menurut Jenis Profesi dan Jenis Kelamin di Kalimantan Utara 2024	50
Gambar 22	TPT Penduduk Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 – 2024	51
Gambar 23	TPAK Penduduk Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	52
Gambar 24	Proporsi Penduduk Perempuan 15 Tahun ke Atas yang bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kalimantan Utara.....	53
Gambar 25	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.....	55



Gambar 26 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Tahun 2022-2024..... 56

Gambar 27 Persentase Perempuan di Lembaga Eksekutif menurut Pemda 2024 57

Gambar 28 Persentase Anggota Pengurus/Kader Parpol Perempuan Tahun 2024 58

Gambar 29 Persentase Anggota Legislatif terhadap Jumlah Pengurus/Kader Parpol Perempuan Tahun 2024 59

Gambar 30 Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Usia Menurut Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara 2024 60

Gambar 31 Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Pendidikan menurut Kab/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2024 61

Gambar 32 Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Utara 2024 61

Gambar 33 Jumlah Korban Kekerasan menurut Bentuk Kekerasan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 62

Gambar 34 Jumlah Korban Kekerasan Menurut tempat Kejadian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 62

Gambar 35 Jumlah Penduduk Anak 0-16 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 64

Gambar 36 Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang berstatus Kawin atau berstatus Hidup bersama sebelum Umur 18 Tahun di Kalimantan Utara 2020-2024... 65

Gambar 37 Jumlah Anak berumur 0-17 Tahun menurut Kab/Kota dan Kepemilikan Akte Kelahiran dan KIA di Kalimantan Utara 2024 66

Gambar 38 Data Peserta Didik Anak Berkebutuhan Khusus menurut Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara 2024 68

Gambar 39 Angka Kematian Bayi Provinsi Kalimantan Utara Hasil Long Form SP2020 ... 69

Gambar 40 Jumlah Peserta Pendidikan menurut Jenis Pendidikan 2024 72

Gambar 38 Data Peserta Didik Anak Berkebutuhan Khusus menurut Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara 2024 68

Gambar 39 Angka Kematian Bayi Provinsi Kalimantan Utara Hasil Long Form SP2020 ... 69

Gambar 40 Jumlah Peserta Pendidikan menurut Jenis Pendidikan 2024 72

Gambar 41 Persentase Siswa Putus Sekolah Jenis Pendidikan Tahun 2024..... 73

Gambar 42 Jumlah Anak Korban Kekerasan berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan 69

Gambar 43 Persentase Korban Kekerasan Anak berdasarkan Tempat Kejadian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 72

Gambar 44 Jumlah Anak sebagai Pelaku berdasarkan Tingkat Pendidikan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 76

Tanjung Selor, 23 November 2023

No. : B-355/65563/OT.130/11/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Rekomendasi Kegiatan Statistik

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Utara
Di

Tempat

Sehubungan dengan pemberitahuan rancangan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral melalui portal Romantik, bersama ini disampaikan pernyataan rekomendasi terkait pelaksanaan kegiatan statistik sektoral tersebut.

Instansi Penyelenggara : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan
Utara
Judul : **Kompilasi Produk Administrasi Profil Gender dan Anak Provinsi
Kalimantan Utara**
Dinyatakan : **LAYAK**
No. Rekomendasi : **V-23.6500.013**
Nomor rekomendasi ini harus dicantumkan pada kuesioner/lembar kerja
Catatan : *terlampir*

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Kalimantan Utara


Mas'ud Rifai, SST., M.M.

Lampiran Surat

Nomor : B-355/65563/OT.130/11/2023

Tanggal : 23 November 2023

Rekomendasi Rancangan Kegiatan Statistik

Judul	: Kompilasi Produk Administrasi Profil Gender dan Anak Provinsi Kalimantan Utara
Penyelenggara	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara
Resume	: https://romantik.web.bps.go.id/lihat-rekomendasi/K-23.6500.013
Rekomendasi	: 1. Melaksanakan kegiatan statistik sesuai dengan rancangan yang diajukan dan disetujui oleh BPS Provinsi Kalimantan Utara. 2. Penyelenggaraan kegiatan statistik merujuk pada <i>Generic Statistical Business Process Model</i> (GSBPM) yang berlaku secara internasional. a. Penerapan GSBPM bertujuan agar data statistik yang dihasilkan berkualitas, tata kelola proses bisnis terdokumentasi, serta dapat menyediakan suatu kerangka penjaminan kualitas pada setiap tahap kegiatan. b. Tahapan GSBPM meliputi identifikasi kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Tahapan kegiatan tersebut dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kegiatan statistik pada masing-masing instansi. 3. Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip Satu Data Indonesia (SDI), metadata statistik harus disusun. a. Metadata statistik memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan statistik, variabel yang digunakan, dan indikator yang dihasilkan. b. Panduan penyusunan metadata statistik merujuk pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. 4. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, setelah kegiatan statistik selesai dilaksanakan, hasil penyelenggaraan kegiatan statistik tersebut diserahkan ke BPS dalam bentuk <i>softcopy</i> publikasi dan metadata.



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Dinas Pemberdayaan Perempuan Kaltara



dp3ap2kb_kaltara



<https://dppppappkb.kaltaraprov.go.id>



dp3ap2kb.kaltara@gmail.com